



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu `alaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Gubernur wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia Nomor 100.2.2.7/9136/OTDA tanggal 19 Desember 2022 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 memuat capaian kinerja yang terdiri dari profil daerah, perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 yang memuat data dan informasi yang akan digunakan oleh kepala daerah sebagai bahan untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan sebagai alat deteksi dini permasalahan dalam melaksanakan kebijakan. Keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menjadi bahan yang sangat berharga dalam perumusan kebijakan Pemerintah dan pembangunan daerah tahun berikutnya.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, sehingga terwujudnya Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung yang Maju, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan 2025.

Wassalamualaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh.

Pangkalpinang, Maret 2023

**Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

A handwritten signature in green ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'R' and 'D', representing the name Ridwan Djamiluddin.

RIDWAN DJAMALUDDIN

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	
PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	I-1
a. Undang-undang Pembentukan Daerah.....	I-1
b. Data Geografis Wilayah.....	I-2
c. Jumlah Penduduk.....	I-4
d. Jumlah Kabupaten/Kota (Untuk Provinsi).....	I-5
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	I-6
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	I-6
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I-6
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	I-6
b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I-7
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	I-7
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	I-11
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	I-66
BAB II	
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	II-1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	II-1
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	II-2
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	II-47
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-56
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	II-59

BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
	PEMBANTUAN	III-1
1.	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	III-1
2.	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi.....	III-1
3.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	III-1
	3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi.....	III-4
	3.1.1 Target Kinerja.....	III-4
	3.1.2 Realisasi.....	III-8
	3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota.....	III-50
	3.2.1 Target Kinerja.....	III-50
	3.2.2 Realisasi.....	III-50
	3.3 Permasalahan dan Kendala.....	III-50
	3.4 Saran dan Tindak Lanjut.....	III-50
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN	
	MINIMAL	IV-1
4.1	Urusan Pendidikan.....	IV-1
	4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-1
	4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-1
	4.1.3 Realisasi.....	IV-2
	4.1.4 Alokasi Anggaran.....	IV-4
	4.1.5 Dukungan Personil.....	IV-6
	4.1.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV-6
4.2	Urusan Kesehatan.....	IV-6
	4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-6
	4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-7
	4.2.3 Realisasi.....	IV-8
	4.2.4 Alokasi Anggaran.....	IV-9
	4.2.5 Dukungan Personil.....	IV-10

4.2.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-10
4.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-11
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-11
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-12
4.3.3	Realisasi.....	IV-12
4.3.4	Alokasi Anggaran.....	IV-13
4.3.5	Dukungan Personil.....	IV-14
4.3.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-14
4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-1
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-15
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-15
4.4.3	Realisasi.....	IV-16
4.4.4	Alokasi Anggaran.....	IV-17
4.4.5	Dukungan Personil.....	IV-17
4.4.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-18
4.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV-18
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-18
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-18
4.5.3	Realisasi.....	IV-19
4.5.4	Alokasi Anggaran.....	IV-20
4.5.5	Dukungan Personil.....	IV-22
4.5.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-22
4.6	Urusan Sosial.....	IV-24
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-24
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-25
4.6.3	Realisasi.....	IV-27
4.6.4	Alokasi Anggaran.....	IV-31
4.6.5	Dukungan Personil.....	IV-32
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-33

4.7 Program dan Kegiatan.....	IV-36
4.7.1 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan.....	IV-36
4.7.2 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan.....	IV-53
4.7.3 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-55
4.7.4 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat	IV-56
4.7.5 Program dan Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-56
4.7.6 Program dan Kegiatan Urusan Sosial	IV-57
BAB V PENUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Dalam penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD dan pelaksanaan EPPD telah mengalami perubahan, sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perubahan tersebut mencakup format sekaligus substansi LPPD dan EPPD memuat data dan informasi secara elektronik yang akan digunakan Pemerintah untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan Otonomi Daerah secara keseluruhan. Hasil dari laporan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah melalui LPPD dan EPPD tersebut akan menjadi umpan balik yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, alat deteksi dini permasalahan penerapan kebijakan nasional dan daerah serta dasar utama pengambilan kebijakan otonomi daerah.

1.1.1 Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Undang-undang pembentukan daerah;

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang ke 32 (tiga puluh dua), dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada awal terbentuknya provinsi, terdapat 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

b. Data geografis wilayah;

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 105°50' sampai 108°30' Bujur Timur dan 1°50' sampai 3°10' Lintang Selatan. Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyau, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Bentuk wilayah sangat berpengaruh terhadap pemilihan *type land utilization, land management* dan pengembangan infrastruktur yang pada prinsipnya ditentukan oleh *geological formation*, termasuk di dalamnya gaya-gaya teknik dan proses erosi. *Geological formation* tersebut menentukan relief wilayah.

1) Batas Wilayah

Berdasarkan batas wilayahnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Selat Karimata di sebelah Timur;
- Laut Jawa di sebelah Selatan;
- Selat Bangka di sebelah Barat; dan
- Laut Natuna di sebelah Utara.

2) Luas Wilayah

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu:

- Kabupaten Bangka luas wilayah : 2.950,68 km²
- Kabupaten Bangka Barat luas wilayah : 2.820,61 km²
- Kabupaten Bangka Tengah luas wilayah : 2.155,77 km²
- Kabupaten Bangka Selatan luas wilayah : 3.607,08 km²
- Kabupaten Belitung luas wilayah : 2.293,61 km²
- Kabupaten Belitung Timur luas wilayah : 2.506,91 km²
- Kota Pangkalpinang luas wilayah : 89,40 km²

Berdasarkan wilayah administrasi, pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2016 sebagai berikut:

- Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 19 kelurahan dan 62 desa;
- Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 60 desa;
- Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 56 desa;
- Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa;
- Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 7 kelurahan dan 42 desa;
- Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa;
- Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan.

3) Topografis

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan Hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di Pulau Bangka terdapat pada puncak Gunung Maras dengan ketinggian 699 meter dan di Pulau Belitung titik tertinggi pada puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya beragam mulai dari daratan, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah.

4) Geologi

Kondisi geologi di *wilayah* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup potensial untuk kawasan pengembangan. Hampir diseluruh wilayah. Material timah (tin), Kaolin, Kuarsa (quartz) dan bilitonite (dikenal dengan nama "satam"). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir

kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

5) Hidrologi

Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda Shelf) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter.

Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka.

Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai antara lain: Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Kotawaringin, Sungai Ajang Mabat dan Sungai Kurau di Pulau Bangka, sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, Sungai Lenggang.

6) Klimatologi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dimana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Curah hujan berkisar antara 67,9 mm sampai dengan 409 mm atau curah hujan rata-rata per tahun 238,45 mm. Pada bulan Agustus dan September suhu udara berkisar antara 23,5 °C sampai dengan 32,1 °C dengan kelembaban udara terendah 72–73%. Kelembaban udara tertinggi mencapai 89% dan umumnya terjadi pada bulan Desember.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 mencapai 1.472.427 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,99 dan rasio jenis kelamin 104,92. Rasio jenis kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 sebesar 104,92 yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022

Kabupaten /Kota	Penduduk (jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	330.793	337.337	343.821	323.107	324.232
Belitung	186.155	189.824	193.493	181.735	183.353
Bangka Barat	209.011	213.163	217.332	200.325	201.948
Bangka Tengah	192.429	196.196	200.016	198.022	200.110
Bangka Selatan	205.901	209.973	213.966	206.246	206.937
Belitung Timur	127.064	129.572	132.069	127.296	127.899
Pangkalpinang	208.520	212.727	216.893	225.162	227.948
Kepulauan Bangka Belitung	1.459.873	1.488.792	1.517.590	1.461.893	1.472.427

Sumber: DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Semester I

d. Jumlah Kabupaten/Kota;

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, yang pada saat awalnya terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung, serta 1 (satu) Kota yaitu Kota Pangkalpinang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemekaran, dengan membentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 7 (tujuh), terdiri dari 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terperinci dapat dilihat pada Tabel I.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kecamatan				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Bangka	Sungailiat	8	8	8	8	8
Kab. Bangka Barat	Muntok	6	6	6	6	6
Kab. Bangka Tengah	Koba	6	6	6	6	6
Kab. Bangka Selatan	Toboali	8	8	8	8	8
Kab. Belitung	Tanjungpandan	5	5	5	5	5
Kab. Belitung Timur	Manggar	7	7	7	7	7
Kota Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	7	7	7	7

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kecamatan				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		47	47	47	47	47

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2022)

e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Perangkat Daerah sebanyak 27 terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah: 1 unit
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Inspektorat : 1 unit
Pergub Nomor 5 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Dinas : 18 unit
Pergub Nomor 6 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Badan : 6 unit
Pergub Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka.
5. Sekretariat DPRD : 1 unit
Pergub Nomor 4 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun jumlah pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebanyak 5.890 orang.

- f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebesar Rp.2.956.135.100.866,00 dengan realisasi Rp.2.402.190.953.686,00.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;

Pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Sejumlah permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, sehingga menjadi fokus perhatian untuk pembangunan di masa mendatang.

Permasalahan daerah adalah masalah utama daerah yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan.

1. Masih rendahnya PDRB Sub Sektor Pertanian
2. Masih rendahnya PDRB Sub Sektor Perikanan
3. Masih rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan
4. Masih adanya masyarakat yang menganggur
5. Masih lambatnya penurunan tingkat kemiskinan.
6. Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat desal.
7. Masih rendahnya akses pendidikan masyarakat.
8. Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat.
9. Belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan.
10. Belum optimalnya penatakelolaan pemerintah.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah;

Visi Kepala Daerah Kepulauan Bangka Belitung adalah "***Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi***", yang ditempuh melalui 6 (enam) Misi yaitu:

- 1) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
- 2) Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal;
- 4) Meningkatkan Kesehatan Masyarakat;
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi.
- 6) Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah;

Dalam visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, terdapat Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dirumuskan dan ditetapkan menjadi program unggulan pembangunan daerah dengan mencermati,

menganalisis dan memperhatikan kaidah-kaidah teknokratik dan aturan penyusunan RPJMD. Program unggulan pembangunan daerah tersebut sebagai berikut:

1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan

Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

2. Pembangunan Bahari

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

3. Pengembangan Pariwisata

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep waterfront city.

4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat;

pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatnya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Fokus kegiatan Mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pemdampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir.

6. Pengembangan Energi Dan Infrastruktur Kewilayahan

Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan brand babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kemen ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasikan untuk membangun kemandirian Energi.

7. Pembangunan Pendidikan

Fokus kegiatan Membangun kultur masyarakat babel yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti babel mengaji, sajadah fajar, ruahan, dll secara rutin; Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar-menengah di

seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA); Meningkatkan kualitas Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Universitas Unggul Nasional dengan mendatangkan Professor bertaraf internasional secara periodik sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun sekolah Tinggi Pariwisata dan Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/*entrepreneur* bidang pariwisata di Babel.

8. Pembangunan Kesehatan

Fokus kegiatan Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak mampu; Program ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan Bayi; penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui training, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan baik dengan insentif khusus untuk menunjang kinerja; Program Babel Sehat melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Babel.

9. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

Fokus kegiatan Nongkrong bareng ("Nobar") program rutin bersama SKPD, Wakil Gubernur, bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, warung, dsb) dan maya (WhatsApps Groups atau BBM Groups); Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi (smart city); Mengutamakan sistem pelayanan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan administrasi kependudukan menjadi lebih ringkas; Mempermudah pelayanan dengan berbagi perangkat teknologi yang terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses promosi jabatan di pemprov melalui fit and proper test dengan lelang jabatan.

10. Pembangunan Berdemokrasi

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembutan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat;

meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi.

11. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulangnya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

12. Pengendalian Lingkungan Hidup

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahad; pengendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca.

- d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah hingga kegiatan prioritas pembangunan daerah. Adapun kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DINAS PENDIDIKAN
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	DINAS PENDIDIKAN
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKA	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemetintah Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	KESEHATAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS KESEHATAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN
	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	
	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
	Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS	RUMAH SAKIT JIWA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RUMAH SAKIT JIWA
	penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RUMAH SAKIT JIWA
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
	PENATAAN RUANG	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	SATPOLPP	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
	BPBD	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
	SOSIAL	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS SOSIAL
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	DINAS SOSIAL
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINAS SOSIAL
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	DINAS SOSIAL
	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS SOSIAL
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS SOSIAL
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS SOSIAL
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	TENAGA KERJA	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS TENAGA KERJA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA
	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS TENAGA KERJA
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu)	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAA	DINAS TENAGA KERJA
	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	CAPIL	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
		BERENCANA
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provins	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Profil Kependudukan	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
	PANGAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PANGAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS PANGAN
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS PANGAN
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PANGAN
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PANGAN
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PANGAN
	Penataan Prasarana Pertanian	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PANGAN
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS PANGAN
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DINAS PANGAN
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PANGAN
	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
	LINGKUNGAN HIDUP	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (RPPLH) Provinsi	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	
	Perbenihan Tanaman Hutan	
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produk	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produk	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produk	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem penting, Daerah Penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	PERHUBUNGAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PERHUBUNGAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINAS PERHUBUNGAN
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DINAS PERHUBUNGAN
	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provins	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provins	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
	PTSP	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan PerundanganUndangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan PerundanganUndangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAA	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pembinaan Lembaga Adat yang	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provin	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
	Pengelolaan Museum Provinsi	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	ARSIP	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	
	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 mil	
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerja	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
	SEKRETARIAT	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	SEKRETARIAT DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Sumber Daya Alam	
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	SEKRETARIAT DAERAH
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
	Fasilitasi Keprotokolan	
	DPRD	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	SEKRETARIAT DPRD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
	Fasilitasi Tugas DPRD	
	PERENCANAAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	dan Kewilayahan	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
	KEUANGAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
	Pembinaan Pengelolaan	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	KEPEGAWAIAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
	Mutasi dan Promosi ASN	
	Pengembangan Kompetensi ASN	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	Pengembangan Kompetensi Teknis	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	BADAN PENGHUBUNG
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
	INSPEKTORAT	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	INSPEKTORAT DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT DAERAH
	Pendampingan dan Asistensi	
	KESATUAN BANGSA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

Sumber : RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Otonomi yang seluas-luasnya diberikan kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan adalah satunya

diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM dan mekanisme penerapan SPM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sama-sama wajib menerapkan SPM untuk 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lebih lanjut penerapan Standar Pelayanan Minimal diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan terkait dengan mutu pelayanan dasar, pengaturan lebih rinci ditetapkan oleh masing-masing Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh Menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut, diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Dalam penerapan SPM juga harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Untuk itu, mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian, namun mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan pada pengumpulan data secara empiris, penghitungan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana

memenuhkan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Perubahan paradigma lainnya mengenai SPM adalah dalam konteks belanja daerah. Telah ditentukan secara tegas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Oleh sebab itu, bukan kinerja pemerintah daerah yang menjadi prioritas utama melainkan terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

Untuk itu dalam rangka memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat Bangka Belitung. Hal tersebut dalam upaya mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah: ***"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"***.

Penerapan SPM oleh Pemerintah Provinsi dipandang perlu agar pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menjadi lebih terukur. Hal ini dikarenakan SPM sudah disertai tolok ukur pencapaian target kinerja yang logis dan riil sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparat Pemerintah Daerah sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di daerah

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 /Prt/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Kebijakan Umum

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dirumuskan kebijakan umum dan program pembangunan pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Kebijakan umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebagaimana tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah telah memuat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu : ***"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"***.

Selanjutnya dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut. maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. ***Pembangunan ekonomi*** adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran

pemerintah perkapita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

- b. ***Berbasis potensi daerah*** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah.

2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. ***Infrastruktur*** adalah pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
- b. ***Konektivitas daerah*** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. ***Sumber daya manusia*** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. ***Unggul dan handal*** adalah mempunyai tingkat pendidikan yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan mempunyai daya saing yang tinggi.

4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

Kesehatan Masyarakat adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. ***Tata Kelola Pemerintahan yang baik*** adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
- b. ***Pembangunan demokrasi*** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Pengendalian bencana** adalah mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana.
- b. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan.
2. Pembangunan Bahari.
3. Pengembangan Pariwisata.
4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan.
5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat .
6. Pengembangan Energi dan Infrastruktur dan Infrastruktur Kewilayahan.
7. Pembangunan Pendidikan.
8. Pembangunan Kesehatan.
9. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik.
10. Pembangunan Berdemokrasi.
11. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan.
12. Pengendalian Lingkungan Hidup.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2022 dapat semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pencapaian visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Tahun 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkait langsung dengan penerapan SPM diwujudkan antara lain melalui beberapa prioritas antara lain: **pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik serta peningkatan pembangunan bidang kebencanaan.**

Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh satuan

kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

Arah Kebijakan

Tahun 2022 adalah merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Untuk tema prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 adalah **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul”**.

Berdasarkan pada tema pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah peningkatan belanja daerah yang dialokasikan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama terkait pasca pandemi Covid-19 seperti Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Trantibunlinmas.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan adalah 1) Pendidikan menengah; setiap Warga Negara Indonesia usia 16 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan. 2) Pendidikan Khusus; setiap Warga Negara Indonesia usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan.

b. SPM Bidang Kesehatan

Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan untuk SPM bidang kesehatan untuk Provinsi antara lain: 1) Kejadian luar biasa (KLB); 2) Kebencanaan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang: 1) setiap warga negara berhak memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan standar air bersih; 2) setiap warga negara berhak memperoleh pengelolaan air limbah rumah tangga sesuai dengan standar.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana yang punya rumah; setiap korban bencana berhak memperoleh rumah sesuai dengan standar rumah layak huni.

e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu: 1) setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran menerima layanan sesuai standar; 2) setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran memerlukan pertolongan; 3) setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana menerima layanan sesuai standar; 4) setiap warga negara korban bencana berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan); 5) setiap warga negara berhak mendapatkan layanan akibat gangguan trantibum; 6) setiap warga negara berhak mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktivitas.

f. SPM Bidang Sosial

Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang sosial (pemerintah provinsi): 1) rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam panti dan/atau lembaga, setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar; 2) rehabilitasi sosial anak dalam panti dan/atau lembaga; setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar; 3) rehabilitasi sosial lanjut usia dalam panti dan/atau lembaga, setiap lanjut usia berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar; 4) rehabilitasi sosial tuna sosial dalam panti dan/atau lembaga, setiap tuna sosial berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga; 5) pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana, setiap korban bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021 (N-1)	Capaian Kinerja Tahun 2022 (N)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,69	72,24	0,77
2	Angka Kemiskinan	4,67	4,61	-1,28
3	Angka Pengangguran	5,03	4,77	-5,17
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,05	4,40	-12,87
5	Pendapatan Per kapita	58.338.817	63.752.237	9,3
6	Ketimpangan Pendapatan	0,247	0,255	3,24

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan				
		Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	83	Dapodik	
		Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5.224	Keputusan Kepala Dinas Pendidikn Prov. Kep, Babel	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah Menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5.148	Keputusan Kepala Dinas Pendidikn Prov. Kep, Babel	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	30.109	Dapodik	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah Menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	24.964	Dapodik	
		Jumlah kebutuhan Minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	1.645		
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah Menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	1.631	dapodik	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah Menengah Atas	932	Dapodik	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah Menengah kejuruan	797	Dapodik	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga Kependidikan pada jenjang sekolah menengah	504		
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	413		
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	137	Dapodik	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	151	Dapodik	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	708		
		Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	50	Dapodik	
		Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	45	Dapodik	
		Jumlah tenaga laboratium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	9	Dapodik	
		Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/workshop pada	24	Dapodik	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	108	Dapodik	
		Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	9		
		Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	359		
		Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	1.265		
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus	275		
		Jumlah pendidik pada pendidikan khusus	168		
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	72		
		Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	55		
		Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	102		
		Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	8		
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada	22		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2		
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	27		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	28.601		
		Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	7		
		Jumlah SDM di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	35		
		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	42		
		Jumlah kegiatan Edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	6		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.079		
		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat Provinsi	40		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang Kemungkinan KLB Lintas kabupaten/kota	3		
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	151,23		
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	140.709,60		
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	196,76		
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	12,59		
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan /rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	1		
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	0		
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	7008,2		
		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	84,61		
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	47,29		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0		
		Pemenuhan dokumen RISPAM Lintas kabupaten/kota	1		
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	0		
		Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	0		
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	2		
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0		
		Jumlah SPALD Regional	0		
		Total kapasitas SPALD Regional	0		
		Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	0		
		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	36		
		Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	Tidak		
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	850,99		
		Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	2		
		Panjang jalan yang dibangun	0		
		Panjang jembatan yg dibangun	0		
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	9,85		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Panjang jembatan yang diganti /dilebarkan	0		
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	2,61		
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	784,5		
		Panjang jalan yang dipelihara	838,53		
		Panjang jembatan yang dipelihara	3.793,11		
		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	3		
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	2.408		
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	1.551		
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	1		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	1		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	1		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	1		
		Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	1		
		Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri	1		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)			
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1		
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	1		
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1		
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1		
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1		
4	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0		Tidak ada bencana tahun 2020
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0		
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0		
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0		
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0		
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0		
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh \geq 10-15 Ha	154,6		
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0		
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	1,662		
		Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	5		
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0		
		Jumlah pengembang yang teregistras	0		
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0		
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	54		
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1.060		
		Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	153		
		Jumlah Perda Perkada yang ditegakkan	5		
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	10		
		Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	21		
		Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	1		
		Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	1		
		Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	1		
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	1		
		Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	0		
		Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	1		
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	1		
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	3		
6	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	27		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	37		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	2		
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	16		
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	6		
		Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	2		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di dalam panti	6		
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	132		
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	3		
		Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	1		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Kependudukan di dalam panti	1		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	10		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	23		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	18		
		Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	14		
		Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	4		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	2		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	2		
		Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	24		
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	5		
		Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	4		
		Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	5		
		Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	2		
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	19		
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	4		
		Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti	0		
		Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	4		
		Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	4		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	4		
		Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	13		
		Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	14		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	2		
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	7		
		Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	13		
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	5		
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	108		
		Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	5		
		Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	2		
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	13		
		Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi NomorIndukKependudukan di dalam panti	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar	6		
		Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	18		
		Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga	13		
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran	1		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	3		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	1		
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	0		
		Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan pembuatan Nomor Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam panti Induk	2		
		Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	15		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	0		
		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	72		
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	25		
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	2		
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	150		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	300		
		Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	646		
7	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	1		
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0		
		Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja	0		
		Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	0		
		Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/okupasi	88,23		
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	50		
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	3,33		
		Persentase penganggur yang dilatih	1,49		
		Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	62,89		
		Persentase penyerapan lulusan	50,09		
		Persentase LPK yang terakreditasi	55		
		Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) diberikan pelatihan yang	0		
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia(CPMI/CTKI)	0		
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	013		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	0,2		
		Data tingkat produktivitas total	73.246.513		
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	13,49		
		Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	90		
		Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun	14,801		
		Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	39,44		
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	59,49		
		Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	0,8		
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1,1		
		Jumlah mogok kerja	0		
		Jumlah penutupan perusahaan	0		
		Jumlah perselisihan kepentingan	2		
		Jumlah perselisihan hak	10		
		Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	1		
		Jumlah perselisihan PHK	28		
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	137		tandatanya
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	11		
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	1		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	3.498.479		
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	55		
		Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	0		
		Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	0		
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	0		
		Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	936		
		Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	55		
		Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	13		
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	0		
		Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemerintah Daerah Provinsi			
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) Online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)	5		
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi keulangannya	0		
		Jumlah izin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/ perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia (PPTKIS) yang diterbitkan swasta	0		
		Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI)	0		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	80		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	196		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	138		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial	160		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	242		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja	229		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	0		
		Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	3.535		
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	27		
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	82		
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2		
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1		
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100		
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2		
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	0		
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	3		
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah	2		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terstandarisasi			
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100		
		Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	15		
		Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan Bantuan keuangan/fasilitas Pemerintah Provinsi (APBD provinsi) oleh Daerah	0		
9	Pangan	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	4		
		Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1.092		
		Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	112.89		
		Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	0		
		Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	4		
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	1		
		Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	1		
		Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	0		
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	0		
		Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	26		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Pertanahan	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	0		
		Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	0		
		SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	0		
		Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	0		
11	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	a. 57,68 b. 89,75 c. 39,28		
		Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	100		
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	38,46		
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	0		
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0		
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH			
		Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	19		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi pelayanan Adminduk	100		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	26		
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	2		
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	346		
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	305		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1		
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,3		
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility	29		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rate/ASFR 15-19)			
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBP (advokasi dan KIE)	73,94		
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBP	30		
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	13,98		
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,23		
		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBP yang efektif	100		
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	72,74		
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	14,28		
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	78,57		
15	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	0		
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	75		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	40,14		
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	96,29		
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	96,29		
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	4		
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	100		
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100		
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100		
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100		
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100		
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100		
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100		
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100		
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100		
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	92,30		
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	74,07		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	87,16		
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	6		
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	92,96		
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100		
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	96,92		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	29,41		
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	19,61		
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	50		
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	67,5		
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	4,1		
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,98		
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	32		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		provinsi			
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan pembiayaan untuk koperasi wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1,94		
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	9,8		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	11,76		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	9,8		
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	28,62		
		Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	54,5		
		Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	0,64		
		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	2,54		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan Fasilitasi pemasaran	0,27		
		Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0		
		Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	8,07		
18	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi tanggal 28 Juli 2017		
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1		
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1		
		Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one on one meeting</i>	1		
		Kegiatan pameran penanaman modal	1		
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	2		
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	31		
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1.397		
		Laporan realisasi penanaman modal	6.650.684.491.000		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	313		
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	63		
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	38.382		
19	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	24		
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0		
		Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	102		
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0		
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	3		
		Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	18		
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	5		
		Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	23.927		
		Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1		
20	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	3		
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	4		
		Jumlah survey Statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	3		
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	4		
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100		
		Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100		
21	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	66,66		
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	71,73		
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	73,91		
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola	7,40		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		hubungan komunikasi sandi			
22	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	439		
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	25		
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	7		
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	1		
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	19		
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	1		
		Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0		
		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	25		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	7		
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	23		
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	0		
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0		
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	5		
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	7		
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	10		
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	5		
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0		
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	2		
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0		
23	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1,79		
		Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	0,024		
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,005		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,186		
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	3.463		
		Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	253		
		Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	843		
		Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	12		
		Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	139		
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0		
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0		
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	31		
24	Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	0,2		
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	0,013		
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100		
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0,1		
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	643		
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0		
		Penyelamatan arsip perangkat daerah	22		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi			
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	107		
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0		
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0		
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya (wpp	711		
		Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5-30 GT	0		
		Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	43		
		Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	0		
		Jumlah kapal yang terdaftar	0		
		Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		diterbitkan			
		Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100		
		Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	82,23		
		Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	189		
		Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	30		
		Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	0		
		Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	21		
		Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	62		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	0		
26	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	1		
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	2		
		Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	0		
		Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	209.001.607.000		
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	0		
		Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	3,19		
		Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	1,71		
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	2.902		
		Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	449.541		
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	5		
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0		
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	29		
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0,02		
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	75		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	3		
27	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	73		
		Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	16		
		Dokumen pengawasan benih yang beredar	1		
		Prasarana pertanian yang digunakan	100		
		Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	626,5		
		Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	674		
		Penerbitan izin usaha pertanian	10		
		Persentase sarana pertanian yang digunakan	100		
		Persentase fasilitas penanggulangan bencana	100		
		Persentase jumlah usulan usaha pertanian	100		
28	Kehutanan	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	13		
		Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	11		
		Luas lahan kritis yang direhabilitasi	91,18		
		Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	328		
		Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	0,509		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	1		
		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	2		
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	13		
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	25		
		Menurunnya gangguan kawasan Tahura	184		
		Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	32		
		Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	33		
		Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	0		
		Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	4		
		Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	6		
		Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	3		
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	0		
		Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	1		
		Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi	2		
		Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi	2		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	1		
		Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	1		
		Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	3		
		Perda/Pergub terkait IUJP	1		
		Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	1		
		Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	0		
		Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	0		
		SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	0		
		Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	1		
		Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	1		
		Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	1		
		Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi			
		Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	0		
		Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	0		
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	22,22		
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh Fasilitas pengembangan produk	100		
		Persentase pelaku usaha yang Memperoleh pelatihan/fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	100		
		Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	20		
		Jumlah penanganan pengaduan konsumen	43		
		Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	771		
		Jumlah komoditi potensial yang dipantau	1		
		Indeks Kinerja BPSMB	5		
		Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	100		
		Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	0		
		Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	0		
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100		
		Pengawasan pupuk dan pestisida Terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	109,97		
		Jumlah barang beredar yang diawasi	10		
		Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi a. Tersedianya bangunan pusat distribusi b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi c. Beroperasinya pusat industri d. Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Ada		
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	6.62		
		Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	100		
31	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	100		
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IUI) bagi industri besar yang diterbitkan	0		
		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0		
		Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	0		
32	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	1		
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	4		
		Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	4		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	95,01		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	51,42		
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,47		
		Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100		
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	3,40		
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan provinsi	15,29		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	35,98		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0		
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0		
		Rasio kemantapan jalan	91,67		
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	64,41		
4	Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100		
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100		
		Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	1,075		
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	0,76		
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100		
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	66,66		
		Persentase penanganan pra bencana	100		
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100		
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100		
7	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	28,57		
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,046		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3247774.158		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	68,71		
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	56,95		
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang - undangan bidang ketenagakerjaan	7,63		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	5,92		
		Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	0,21		
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	1,37		
9	Pangan	Persentase Cadangan Pangan	43,42		
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100		
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		umum yang selesai tepat waktu			
		Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	100		
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	71,67		
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	23		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100		
		Pemanfaatan data kependudukan	92,59		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100		
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	37,5		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,49		
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	74,38		
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,96		
15	Perhubungan	Rasio konektivitas provinsi	0,688		
		V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,17		
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang	96,30		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	57,14		
		Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	77,78		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	5,88		
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	27,10		
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	88,67		
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,12		
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,27		
		Peningkatan Prestasi Olahraga	14		
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100		
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	35,65		
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	88,88		
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	49,26		
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16,05		
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	75,25		
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	128,67		
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	95,71		
		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang	72,83		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		berlaku			
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	17,20		
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	102,97		
		Tingkat hunian akomodasi	33,72		
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	154.828		
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	4,06		
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-78.675		
28	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	71,43		
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	0,53		
		Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	54,56		
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	100		
		Persentase Desa yang Teraliri Listrik	100		
30	Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	-1,19		Belum rilis BPS
		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100		
		Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai	96,53		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Dengan Ketentuan Berlaku			
		Tertib Usaha	100		
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	98,98		
		Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	82,35		
		Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	6,62		
31	Perindustrian	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	105,40		
		Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP	94,04		
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	46,05		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan	0		Surat keterangan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	95		
32	Transmigrasi		0		Tidak ada IKK

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	18,09		
		Rasio PAD	37,63		
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	61,60		
		Opini Laporan Keuangan	WTP		
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3		
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3		
2	Pemerintahan (Pengadaan)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	100		
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	27,49		

No .	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	53,61		
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	58,02		
3	Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	87,50		
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	33,41		Data turun
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	51,72		
4	Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	18,73		
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	13,88		
		Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? Ya 2. Apakah ada manual untuk Menyusun daftar		

No .	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			asset tetap? Ya 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? Ya 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? Ya		
		Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	38,32		
5	Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan <i>(information on resources available to frontline service delivery units)</i>	79		
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah <i>(public access to fiscal information)</i>	100		

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat :

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.2
Target Kinerja Tahun 2022

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2022	TARGET AKHIR RPJMD TH 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian	5,98	5,98
2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	4,59	4,59
3	Meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	2,25	2,25
4	Meningkatkan PDRB sektor Pertambangan dan Energi	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan Energi	1,76	1,76
5	Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	2,75	2,75
6	Menurunkan tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	5,40	5,40
7	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	64,80	64,80
8	Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,00	5,00
9	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1.479.389	1.479.389

10	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	100	100
11	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	54	54
12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	71,84	71,84
13	Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	13,00	13,00
14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah Terakreditasi A	60	60
15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68,5	68,5
16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,08	2,08
17	Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,05	89,05
18	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	57,50	57,50
19	Meningkatkan Pembangunan Olah Raga	Indeks Pembangunan Olah Raga	0,45	0,45
20	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Sejahtera	67	67
21	Meningkat Kesehatan Masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	86,22	86,22
22	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	67,50	67,50
23	Meningkatkan Kebebasan Sipil	Nilai Kebebasan Sipil	87,82	87,82
24	Meningkatkan Hak-hak politik	Nilai Hak-hak Politik	81,85	81,85

25	Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	Nilai Kelembagaan Demokrasi	80,54	80,54
26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,41	0,41
27	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,99	75,99

b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PREDIKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian	5,98	3,79	63,17	Cukup Berhasil
2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	4,59	-3,59	-78,21	Kurang Berhasil
3	Meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	2,25	43,0 *)	1.911,11	Sangat Berhasil
4	Meningkatkan PDRB sektor Pertambangan dan Energi	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan Energi	1,76	6,78 *)	385,23	Sangat Berhasil
5	Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	2,75	15,45 *)	561,82	Sangat Berhasil
6	Menurunkan tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	5,40	4,77	111,66	Sangat Berhasil
7	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	64,80	71,09	109,71	Sangat Berhasil
8	Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,00	4,69	106,2	Sangat Berhasil
9	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1.479.389	1.479.389 *)	100,00	Berhasil
10	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	100	77,49	77,49	Cukup Berhasil
11	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	54	10	18,52	Kurang Berhasil

12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	71,84	81,27	113,13	Sangat Berhasil
13	Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	13,00	12,18	93,69	Cukup Berhasil
14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah Terakreditasi A	60	45,71	76,18	Cukup Berhasil
15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68,5	65,8 *)	96,06	Cukup Berhasil
16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,08	1,75	115,86	Sangat Berhasil
17	Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,05	89,11 *)	100,07	Sangat Berhasil
18	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	57,50	53,67 *)	93,34	Cukup Berhasil
19	Meningkatkan Pembangunan Olah Raga	Indeks Pembangunan Olah Raga	0,45	0,50 *)	111,11	Sangat Berhasil
20	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Sejahtera	67	66,83	99,75	Cukup Berhasil
21	Meningkat Kesehatan Masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	86,22	98,11	113,79	Sangat Berhasil
22	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	67,50	69,53	13	Sangat Berhasil
23	Meningkatkan Kebebasan Sipil	Nilai Kebebasan Sipil	87,82	68,80	78,34	Cukup Berhasil
24	Meningkatkan Hak-hak politik	Nilai Hak-hak Politik	81,85	77,80	95,05	Cukup Berhasil
25	Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	Nilai Kelembagaan Demokrasi	80,54	74,93	93,03	Cukup Berhasil
26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,41	0,35	85,37	Cukup Berhasil

27	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,99	71,67	94,32	Cukup Berhasil
----	--	---	-------	-------	-------	----------------

*) data tahun lalu

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tabel 2.4
Pengukuran Capaian Kinerja
Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2021

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian	1,02	3,79	Turun
2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	5,04	-3,59	Naik
3	Meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	43,00	43,0 *)	Tetap
4	Meningkatkan PDRB sektor Pertambangan dan Energi	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan Energi	6,78	6,78 *)	Tetap
5	Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	10,24	15,45 *)	Naik

6	Menurunkan tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	5,03	4,77	Turun
7	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	47,84	71,09	Naik
8	Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,67	4,69	Naik
9	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1.409.026	1.479.389 *)	Naik
10	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	61,20	77,49	Naik
11	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	57,14	10	Turun
12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	57,14	81,27	Naik
13	Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	Angka harapan lama sekolah,	12,17	12,18	Naik
14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah Terakreditasi A	46,76	45,71	Turun
15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,8	65,8 *)	Tetap

16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,84	1,75	Turun
17	Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,11	89,11 *)	Tetap
18	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	53,67	53,67 *)	Tetap
19	Meningkatkan Pembangunan Olah Raga	Indeks Pembangunan Olah Raga	0,50	0,50 *)	Tetap
20	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Sejahtera	99,95	66,83	Turun
21	Meningkat Kesehatan Masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	88,68	98,11	Naik
22	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	68,87	9,53	Naik
23	Meningkatkan Kebebasan Sipil	Nilai Kebebasan Sipil	79,12	68,80	Turun
24	Meningkatkan Hak-hak politik	Nilai Hak-hak Politik	66,20	77,80	Naik
25	Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	Nilai Kelembagaan Demokrasi	92,97	74,93	Turun
26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,34	0,35	Naik

27	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,05	71,67	Turun
----	--	---	-------	-------	-------

Ket :

**) Data Tahun 2021*

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Tahun RPJMD

Tabel 2.5
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Tahun RPJMD

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2022	STATUS PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian	5,98	3,79	Tidak tercapai sebesar 2,19
2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	4,59	-3,59	Melebihi target sebesar 8,18
3	Meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	2,25	43,0 *)	Melebihi target sebesar 40,75
4	Meningkatkan PDRB sektor Pertambangan dan Energi	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan Energi	1,76	6,78 *)	Melebihi target sebesar 5,02
5	Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	2,75	15,45 *)	Melebihi target sebesar 12,7
6	Menurunkan tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	5,40	4,77	Tidak tercapai sebesar -0,63
7	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	64,80	71,09	Melebihi target sebesar 6,29
8	Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,00	4,69	Tidak tercapai sebesar -0,31

9	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1.479.389	1.479.389 *)	Tercapai
10	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	100	77,49	Tidak tercapai sebesar -22,51
11	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	54	10	Tidak tercapai sebesar -44
12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	71,84	81,27	Melebihi target sebesar 9,43
13	Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	13,00	12,18	Tidak tercapai sebesar -0,82
14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah Terakreditasi A	60	45,71	Tidak tercapai sebesar -14,29
15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68,5	65,8 *)	Tidak tercapai sebesar -2,7
16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,08	1,75	Tidak tercapai sebesar -0,33
17	Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,05	89,11 *)	Melebihi target sebesar 0,06
18	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	57,50	53,67 *)	Tidak tercapai sebesar -3,83
19	Meningkatkan Pembangunan Olah Raga	Indeks Pembangunan Olah Raga	0,45	0,50 *)	Melebihi target sebesar 0,05
20	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Sejahtera	67	66,83	Tidak tercapai sebesar -0,17

21	Meningkat Kesehatan Masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	86,22	98,28	Melebihi target sebesar 12,06
22	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	67,50	68,87 *)	Melebihi target sebesar 1,37
23	Meningkatkan Kebebasan Sipil	Nilai Kebebasan Sipil	87,82	68,80	Tidak tercapai sebesar -19,02
24	Meningkatkan Hak-hak politik	Nilai Hak-hak Politik	81,85	77,80	Tidak tercapai sebesar -4,05
25	Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	Nilai Kelembagaan Demokrasi	80,54	74,93	Tidak tercapai sebesar -5,61
26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,41	0,35	Tidak tercapai sebesar -0,06
27	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,99	71,67	Tidak tercapai sebesar -4,32

Ket :

*) Data Tahun 2020

e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai;

Tabel 2.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian	5,98	-0,73	-12,21	17.938.652.650	8.649.898.171	48,22	0
2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	4,59	5,05	110,02	32.422.952.886	18.296.641.538	56,43	14.126.311.348
3	Meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	2,25	43,0 *)	1.911,11	3.259.261.595	2.615.151.762	80,43	644.109.833
4	Meningkatkan PDRB sektor Pertambangan dan Energi	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan Energi	1,76	6,78 *)	385,23	412.659.192	402.969.718	97,65	9.689.474
5	Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	2,75	15,45 *)	561,82	16.822.932.243	3.686.772.116	21,92	13.136.160.127
6	Menurunkan tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	5,40	4,77	111,66	12179342880	7018526176	57,63	5.160.816.704
7	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	64,80	71,09	109,71	441.797.222	291.732.969	66,03	150.064.253
8	Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,00	4,69	106,2	3.716.047.657	3.102.438.653	83,49	613.609.004
9	Meningkatkan Kesejahteraan	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1.479.389	1.479.389 *)	100,00	1.944.717.587	1.691.087.709	86,96	253.629.878

	Masyarakat Desa								
10	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	100	77,49	77,49	204.304.683.989	182.091.124.779	89,13	0
11	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	54	10	18,52	7.958.217.161	7.588.480.678	95,35	0
12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	71,84	81,27	113,13	8.248.506.805	5.589.776.519	67,77	2.658.730.286
13	Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	13,00	12,18	93,69	310.523.903.149	285.274.131.670	91,87	0
14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah Terakreditasi A	60	45,71	76,18	241.333.105	206.903.600	85,73	0
15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68,5	65,8 *)	96,06	565.018.896	374.775.946	66,33	0
16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,08	1,75	115,86	786.138.230	641.751.136	81,63	144.387.094
17	Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,05	89,11 *)	100,07	579.709.173	411.873.380	71,09	167.835.793
18	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	57,50	53,67 *)	93,34	6.135.350.101	5.999.735.068	97,79	0
19	Meningkatkan Pembangunan Olah Raga	Indeks Pembangunan Olah Raga	0,45	0,50 *)	111,11	11.959.703.397	11.525.386.553	96,37	434.316.844
20	Meningkatkan	Persentase PMKS	67	66,83	99,75	4.060.113.602	2.654.830.679	65,38	0

	Kesejahteraan Sosial	Sejahtera							
21	Meningkat Kesehatan Masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	86,22	98,28	113,99	195.252.639.653	133.437.885.405	68,34	61.814.754.248
22	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	67,50	68,87 *)	102,03	29.382.212.221	25.119.918.140	85,49	4.262.294.081
23	Meningkatkan Kebebasan Sipil	Nilai Kebebasan Sipil	87,82	68,80	78,34	3.265.360.000	2.527.555.487	77,41	0
24	Meningkatkan Hak-hak politik	Nilai Hak-hak Politik	81,85	77,80	95,05	3.911.635.370	3.909.732.940	99,95	0
25	Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	Nilai Kelembagaan Demokrasi	80,54	74,93	93,03	3.911.635.370	3.909.732.940	99,95	0
26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,41	0,35	85,37	960.120.715	819.950.728	85,4	0
27	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,99	71,67	94,32	7.610.734.051	6.061.740.140	79,65	0
TOTAL EFISIENSI									103.576.708.967

Ket : angka nol pada kolom 10 dihitung dari capaian kinerja dibawah 100% (target kinerja tidak tercapai)

JUMLAH EFISIENSI = Rp. 103.576.708.967

Tingkat efisiensi anggaran dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja anggaran. Semakin kinerja sasarnya tercapai dan penganggarnya masih bersisa dapat dikatakan telah berhasil melakukan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan penghitungan, maka akan diketahui efisien atau tidaknya penggunaan anggaran terhadap pencapaian target sasaran yang sudah ditetapkan.. Dalam memberikan penilaian tingkat efisiensi dapat menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Skala Pengukuran Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja

No	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Anggaran	Kategori
1	100 % s.d. diatas 100 %	< 100	Efisien
2	< 100 %	< 100	Tidak efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 27 indikator sasaran kinerja terdapat **14** indikator kinerja yang penggunaan anggarannya efisien dan **13** indikator kinerja yang penggunaan anggarannya **tidak efisien**. Dari **14** indikator kinerja yang efisien dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 103.576.708.967,-** atau terbilang (*Seratus Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).

f. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Pembagian alokasi anggaran disesuaikan dengan sasaran kinerja Pemerintah Daerah tersebut. Secara keseluruhan Total Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.135.693.402.453,99- , sedangkan realisasi Anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.889.116.434.827,00,- atau mencapai 88,45 %

1. Kinerja sasaran meningkatkan PDRB sub sektor pertanian diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan PDRB sub sektor pertanian tahun 2021 dikurangi PDRB sub sektor pertanian tahun 2020 dibagi PDRB sub

sektor pertanian tahun 2020 dikali 100%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui laju pertumbuhan PRDB sub sektor pertanian mengalami kontraksi sebesar -0,73%.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	4,86	-0,73*)	5,98	-0,73*)	-14,67%	5,98	-14,67%

Keterangan: *) Sumber Data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
*) PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2021

Formula Perhitungan Capaian Indikator :
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian

$$\frac{\text{PDRBi}(t) - \text{PDRBi}(t-1)}{\text{PDRBi}(t-1)} \times 100\%$$

PDRBi(t) : PDRB sub sektor i tahun t
PDRBi(t-1) : PDRB sub sektor i tahun t-1

$$\text{Realisasi} = \frac{6.824.176,20 - 6.874.405,69}{6.874.405,69} \times 100\% = -0,73$$

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan PRDB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2021 sebesar 1,02%, sedangkan untuk laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian sendiri tahun 2021 sebesar -0,73%. Hal ini menandakan laju pertumbuhan PDRB pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar -0,73% dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian tahun 2020. Laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian didukung oleh 5 sub sektor meliputi tanaman pangan; tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan.

Diantara kelima sub sektor tersebut laju pertumbuhan sub sektor tanaman pangan menyumbang kontraksi tertinggi sebesar -7,50%, dilanjutkan dengan sub sektor tanaman hortikultura -3,67%, dan sub sektor tanaman perkebunan -0,87%. Sub sektor peternakan menyumbang laju pertumbuhan PDRB pertanian tertinggi di Bangka Belitung sebesar 8,62% dilanjutkan dengan jasa pertanian dan perburuan sebesar 8,07%. Diantara kelima sub sektor tersebut, sektor perkebunan menyumbang nilai PDRB tertinggi sebesar 4.782.975,36 miliar rupiah pada tahun 2021.

Komponen PDRB meliputi konsumsi ditambah investasi ditambah belanja pemerintah ditambah ekspor dikurangi impor. Penurunan laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat dipengaruhi oleh faktor harga. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak memiliki program yang dapat menjaga stabilitas harga pangan di pasar, sehingga fluktuasi harga yang ada dipasar tidak dapat dikendalikan. Berdasarkan data di BPS luas panen padi dari tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat sebesar 2,45% dan produksi padi dari tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat sebesar 22,98%. Namun hasil produksi padi di wilayah Bangka Belitung masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat Bangka Belitung itu sendiri.

Untuk sektor perkebunan, tahun 2021 terjadi penurunan produksi tanaman karet yang menyebabkan penurunan nilai ekspor karet. Selain itu, harga karet di pasar juga mengalami penurunan sebesar 11,01%. Penurunan harga komoditas ekspor ini mempengaruhi nilai laju pertumbuhan PDRB sub sektor perkebunan. Selain karet, komoditas ekspor utama di Bangka Belitung adalah lada, fluktuasi harga lada di pasar akan mempengaruhi keinginan petani dalam memproduksi dan menjual lada. Banyaknya petani lada yang beralih profesi menjadi penambang timah juga akan mempengaruhi produktivitas lada yang dihasilkan di Bangka Belitung.

Belanja pemerintah merupakan salah satu komponen dalam PDRB yang memberikan dampak kecil bagi laju pertumbuhan PDRB di Bangka Belitung. Capaian laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian yang didukung dari program di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai berikut:

1. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** dengan sasaran kinerja program peningkatan produktivitas pertanian mempunyai Indikator kinerja:
 - a. Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi, formula perhitungan indikator ini adalah Perbandingan pengawasan peredaran pada tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya. Capaian kinerja

untuk indikator ini adalah $(100/100) \times 100\% = 100\%$ dari target 100% atau sebesar 100%.

- b. Persentase peningkatan luas tanaman pangan dan hortikultura, formulasi perhitungan indikator ini adalah membandingkan antara luas tanam tahun berjalan dengan tahun akhir RPJMD. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah rataan dari perbandingan luas tanam tahun berjalan dengan target luas tanam tahun akhir RPJMD dari masing-masing komoditas $\Sigma \left(\frac{\text{luas tanam tahun berjalan}}{\text{target luas tanam akhir RPJMD}} \times 100\% \right) = 85,7\%$ dari target 83,32% atau sebesar 102,86%.
- c. Persentase benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat, formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat dibagi jumlah benih total. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\frac{561.052}{10.000.000} \times 100\% = 5,6\%$ dari target 5% atau sebesar 112%.
- d. Persentase ketersediaan benih/bibit pertanian tingkat lapang (daerah), formulasi perhitungan indikator ini adalah Jumlah Ketersediaan benih/bibit pertanian tingkat lapang (daerah) dibagi kebutuhan $\times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $100 - \left(\frac{38}{90} \times 100\% \right) = 57,78\%$ dari target 50% atau sebesar 115,56%.
- e. Persentase pertambahan angka kelahiran ternak, formulasi perhitungan indikator ini adalah perbandingan angka kelahiran ternak tahun berjalan dibandingkan dengan awal RPJMD. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\frac{13.603.290 - 9.830.662}{9.830.662} \times 100\% = 38,37\%$ dari target 43,41% atau sebesar 88,39%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- ✓ Terjalinya sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait.
- ✓ Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran petani tentang pentingnya bibit tanaman berlabel dan bersertifikat.

- ✓ Meningkatnya nilai angka ketersediaan suplay bibit ternak ayam merawang tahun 2022.
- ✓ Meningkatnya luas tanam hortikultura komoditas cabai kecil karena tingginya harga cabai.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- ✓ Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan tambang.
- ✓ Cuaca ekstrim sehingga produksi pertanian menurun.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- ✓ Memberikan penyuluhan kepada petani terkait penyesuaian jadwal tanam dengan musim tanam.
- ✓ Melakukan edukasi/pendekatan kepada petani agar lahan pertanian tidak dialih fungsikan menjadi lahan tambang.

2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan sasaran program peningkatan produksi peternakan mempunyai Indikator persentase penurunan kasus penyakit hewan menular. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) dikurangi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $\left(\frac{161-755}{755}\right) \times 100\% = -78,68\%$ dari target sebesar 100 %. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 32 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- ✓ Pelaksanaan vaksin dan pemberian obat kepada hewan ternak sapi, kambing, dan kerbau untuk mencegah perluasan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- ✓ Penyakit Mulut dan Kuku sudah ditetapkan sebagai wabah dan penyebarannya yang masif sehingga beberapa hewan ternak seperti sapi dan kambing banyak yang terjangkit.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- ✓ Eduksi kepada peternak tentang wabah Penyakit Mulut dan Kuku untuk meningkatkan kesadaran peternak akan bahaya penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku.
 - ✓ Pelaksanaan vaksinasi kepada hewan ternak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengurangi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku.
3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan sasaran program peningkatan produktivitas pertanian mempunyai Indikator kinerja:
- a. Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), formula perhitungan indikator ini adalah jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Capaian indikator kinerja adalah 1 dokumen dari target 1 dokumen. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini sama dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 1 dokumen.
 - b. Dokumen laporan pengendalian dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI), formula perhitungan indicator ini adalah jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Capaian indicator kinerja adalah 1 dokumen dari target 1 dokumen. Capaian kinerja pada tahun 2022 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 1 dokumen.
- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- ✓ Adanya kegiatan yang mendukung penanganan Organisme Pengganggu Tanaman seperti Gerakan Pengendalian (Gerdal) Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
- ✓ Adanya teknologi pengendalian OPT berupa PGPR, *Trichoderma, sp.*, Pestisida Nabati, dan *MS Paenibacillus*.
- ✓ Adanya sosialisasi dan pendampingan dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kebrau (AUTS/K).

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- ✓ Masih kurangnya pengetahuan petani terkait pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
- ✓ Kurangnya kesadaran petani dan peternak untuk mengasuransikan usaha tani dan ternaknya.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- ✓ Pelaksanaan Sekolah Lapang yang bisa memberikan pengetahuan kepada petani dalam menangani Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
- ✓ Edukasi kepada petani dan peternak tentang manfaat dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kebrau (AUTS/K).

4. Program Penyuluhan Pertanian dengan sasaran program peningkatan produktivitas pertanian mempunyai Indikator persentase peningkatan kelas kelompok tani. Formula perhitungan indikator ini adalah selisih antara kelas kelompok tani tahun skarang dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan kelas kelompok tani tahun berjalan. Capaian indikator kinerja adalah $\frac{\sum \text{poktan yang naik kelas tahun ke } n - \sum \text{poktan yang naik kelas tahun } n-1}{\sum \text{poktan yang naik kelas tahun ke } n} \times 100\% = \frac{(54-30)}{30} \times 100\% = 80\%$ dari target sebesar 80%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini sama dengan capaian kinerja pada Tahun 2021 yang sebesar 80%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- ✓ Adanya fasilitasi pembiayaan melalui KUR untuk meningkatkan permodalan kelompok tani;
- ✓ Adanya peningkatan kinerja penyuluh pertanian lapangan dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kelompok tani;
- ✓ Banyaknya sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan informasi yang dapat di akses dari media online untuk menambah/meningkatkan ilmu dan pengetahuan SDM (petani/penyuluh).

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- ✓ Rendahnya kesadaran SDM (petani) terutama yang berkaitan dengan aspek psikologis dan budaya;
- ✓ Kelompok tani sering dijadikan sebagai alat atau wadah untuk memberikan bantuan/subsidi yang berkaitan dengan program pemerintah sehingga pembentukan dan penumbuhan kelompok tani banyak dilakukan karena adanya proyek bantuan tersebut, sehingga berakhir kelompok tani tidak meningkat kelas kemampuannya atau bahkan tidak berungsi.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- ✓ Meningkatkan kapasitas SDM (petani) melalui berbagai kegiatan pendampingan dan Latihan oleh penyuluh pertanian lapangan;
- ✓ Meningkatkan kapabilitas ketenagaan dan kelembagaan penyuluh pertanian

5. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan dengan sasaran program meningkatnya konsumsi pangan yang beragam mempunyai indikator persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras). Formula perhitungan indikator ini adalah produksi beras lokal dibagi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Capaian indikator kinerja adalah $\frac{(164,94-143,84)}{143,84} \times 100\% = 15\%$ dari target sebesar 18%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini sama dengan capaian kinerja pada Tahun 2021 yang sebesar 15%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- ✓ Tingginya minat petani untuk melakukan usaha budidaya padi.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- ✓ Faktor cuaca ekstrim dan alih fungsi lahan pertanian

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- ✓ Menerapkan kebijakan terkait optimalisasi lahan sawah untuk meningkatkan produktivitas.
- ✓ Melibatkan penyuluh pertanian provinsi untuk melakukan pendampingan ke petani

6. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sasaran program meningkatnya konsumsi pangan yang beragam mempunyai Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan a) Kelompok Pangan Padi- Padian, b) Kelompok Pangan Kacang-kacangan, c) Kelompok Pangan buah dan sayur. Formula perhitungan indikator ini adalah pengolahan data skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan dari a) Kelompok Pangan Padi- Padian, b) Kelompok Pangan Kacang-kacangan, c) Kelompok Pangan buah dan sayur. Capaian indikator kinerja adalah a) 1,4; b) 3; c) 20,4 dari target sebesar a) 2; b) 4; c) 21,8.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- ✓ Gencarnya promosi tentang penganekaragaman konsumsi pangan lokal.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- ✓ Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi ideal masyarakat yang dianjurkan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- ✓ Menggiatkan upaya-upaya dalam meningkatkan Skor PPH konsumsi pangan lokal khususnya kacang-kacangan, sayur dan buah melalui advokasi, kampanye, sosialisasi, dan promosi.

7. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan sasaran program meningkatnya konsumsi pangan yang beragam mempunyai Indikator Menurunnya daerah rentan rawan pangan. **Formula perhitungan indikator ini adalah persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan tahun berjalan dibandingkan tahun akhir renstra.** Capaian indikator kinerja adalah $\left(\frac{9-19}{19}\right) \times 100\% = 52,63\%$ dari target sebesar 15%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 17%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- ✓ Menurunnya tingkat angka kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung yang berimbas kepada tingginya kemampuan masyarakat dalam akses pangan.

8. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan sasaran program meningkatnya konsumsi pangan yang beragam mempunyai Indikator persentase pangan yang aman dikonsumsi. Formula perhitungan indikator ini adalah jumlah pangan yang dikonsumsi dibagi jumlah sampel dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $\frac{(83,3+100+88,46)}{3} \times 100\% = 90,6\%$ dari target sebesar 90%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi 100,67% dari target yang ditetapkan.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- ✓ Tingginya tingkat kesadaran stakeholder/ pelaku usaha pertanian untuk mendaftarkan usahanya sehingga produk pertanian yang dihasilkan bersertifikat prima.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- ✓ Penggunaan pestisida atau pupuk kimia yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, mengakibatkan produk pertanian yang dihasilkan memiliki kadar kandungan bahan kimia yang tinggi.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- ✓ Melakukan sosialisasi Teknik budidaya pertanian yang sesuai dengan Good Agriculture Practice (GAP).

2. Kinerja sasaran Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	$\frac{\text{PDRBi}(t) - \text{PDRBi}(t-1)}{\text{PDRBi}(t-1)} \times 100\%$ <p> PDRBi(t) : PDRB sub sektor i tahun t PDRBi(t-1) : PDRB sub sektor i tahun t-1 </p>

			$\frac{(3.810.539 - 3.627.778)}{3.627.778} \times 100\% = 5,04^*$
--	--	--	---

Keterangan: *) Sumber Data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 *) PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2021

Kinerja sasaran meningkatkan PDRB sub sektor perikanan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan PDRB sub sektor perikanan tahun 2021 dikurangi PDRB sub sektor perikanan tahun 2020 dibagi PDRB sub sektor perikanan tahun 2020 dikali 100%.

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 5,05 atau sebesar **110%** dari target 4,59 . Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.8
 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi*	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	4,35	5,04	4,59	5,05	110%	4,59	110%

Analisis Ketercapaian Sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 5,05 %, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 110 % (tercapai).
- b. PDRB Sub Sektor Perikanan masih menggunakan data tahun 2021 sehingga tidak bisa dibandingkan antara tahun 2021 dengan 2022

Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, laju pertumbuhan PRDB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2021 sebesar 1,02%, sedangkan untuk laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan sendiri tahun 2021 sebesar 5,05 %. Hal ini menandakan laju pertumbuhan PDRB perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 5,05 % dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan tahun 2020. Adapun nilai PDRB pada sektor perikanan sebesar 3.810.539 (Juta rupiah) pada tahun 2021.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. **Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil** dengan sasaran kinerja program Meningkatnya wilayah Kelautan dan Perikanan yang diawasi serta wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dimanfaatkan mempunyai Indikator kinerja Luasan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil yang termanfaatkan (Ha) formula perhitungan indikator ini adalah Penjumlahan luasan ruang laut yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan luasan kawasan konservasi yang dikelola di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 628.010,59 hektar dari target 1.050.000 hektar atau sebesar 59,81.%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 627.612,90 hektar

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Pendampingan Verifikasi lapangan terkait PKKPRL sudah dilaksanakan di Kabupaten/Kota
- b. Terjalannya koordinasi yang baik dengan Loka Serang UPT Kementerian Kelautan Perikanan pengampu Pemanfaatan Ruang Laut dan koordinasi dengan kelompok di desa terkait pendampingan pengelolaan konservasi

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Belum tersedianya Fasilitas pendukung di kawasan konservasi;
- b. Belum adanya lembaga pengelola kawasan konservasi

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Pengadaan fasilitas pendukung di kawasan konservasi;
- b. Terbentuknya kelembagaan pengelola kawasan konservasi

2. **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** dengan sasaran program Meningkatnya Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap mempunyai Indikator Pertumbuhan Produksi Perikanan tangkap formula perhitungan indikator ini jumlah produksi perikanan tangkap tahun berjalan (t) dikurang jumlah produksi perikanan tangkap tahun sebelumnya (t-1) dibagi jumlah produksi perikanan tangkap tahun sebelumnya (t-1) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(221.810.91 : 220.491,2) / 220.491,2 \times 100\% = 0,60\%$ dari target sebesar 1,85% atau persentase capaian sebesar 32,43 %. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar -1,03.%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luasan wilayah perairan laut yang cukup besar dibandingkan daratan dan didukung oleh potensi sumberdaya keanekaragaman hayati perairan darat dan laut yang besar. Sehingga sangat mendukung dalam dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih tingginya eksploitasi kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan pencurian ikan (illegal fishing) yang berdampak berkurangnya stok ikan (over fishing)
- b. Masih kurang tersedianya sarana alat tangkap ikan yang ramah lingkungan khususnya bagi nelayan lokal/tradisional.
- c. Masih kurangnya kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut bagi nelayan lokal/tradisional.
- d. Masih banyaknya nelayan melakukan pelanggaran kapal perikanan terkait data perizinan kapal perikanan dan informasi log book yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan.
- e. Sulitnya nelayan lokal/tradisional memperoleh akses permodalan dari pihak perbankan(Bank cable)
- f. terbatasnya ketersediaan BBM subsidi bagi nelayan lokal/tradisional.
- g. Tingginya aktivitas pertambangan mineral pasir/timah di laut sangat berpengaruh kepada hasil tangkapan ikan oleh nelayan.
- h. Belum optimalnya aktivitas dan maksimalnya kegiatan hilir perikanan tangkap melalui ketersediaan Sarana dan prasarana pendukung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) , Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan yang ada di Pulau Bangka dan Pulau Belitung.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pentingnya kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan agar terjadi keberlanjutan sumberdaya ikan di perairan (suistunable)
- b. Penyaluran bantuan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan bagi nelayan lokal/tradisional
- c. Penyaluran bantuan Kapal penangkapan ikan dan angkut ikan bagi nelayan lokal/tradisional
- d. Sosialisasi dan Penataan perizinan usaha perikanan tangkap melalui integrasi perizinan pusat dan daerah dan pengumpulan dan verifikasi data log Book penangkapan ikan yang benar.
- a. Sosialisasi dan bimbingan teknis akses permodalan usaha perikanan tangkap melalui kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) Nelayan

dan penguatan kapasitas kelembagaan nelayan (KUB dan Koperasi Nelayan).

- e. Pendataan data kuota BBM subsidi kapal nelayan dan perbaikan sistem distribusi penyaluran BBM subsidi nelayan di SPBN sehingga tepat sasaran.
- f. Perlu dilakukan sosialisasi pengaturan terkait kegiatan aktivitas penangkapan ikan yang terdampak aktivitas penambangan pasir/timah di laut.
- g. Perlu dilakukan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana TPI, PPI dan Pelabuhan Perikanan dan sistem manajemen pengelolaan pelabuhan perikanan.

3. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**, Meningkatnya Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya mempunyai Indikator Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Produksi Perikanan Budidaya tahun berjalan (t) dikurang Jumlah Produksi Perikanan Budidaya tahun sebelumnya (t-1) dibagi Jumlah Produksi Perikanan Budidaya tahun sebelumnya (t-1) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(8.777,03:9.143,68) : 9.143,68 \times 100\% = -4,01\%$ dari target sebesar 4,2% atau persentasi capaian -95,48% . Capaian Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021 yaitu $(9.143,68: 8164,26): 8164,26 \times 100\%$ sebesar 12 %. Hal ini disebabkan turunnya hasil produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 karena beberapa kendala yang tercantum dalam faktor penghambat dibawah ini.

- a. Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
 - b. Sudah tersedianya sarana yang sudah dimiliki oleh pelaku pembudidaya
 - c. Sumber daya lingkungan mendukung proses budidaya ikan
- Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:
- a. Belum tersedianya benih yg bermutu secara kontinyu
 - b. Perubahan cuaca yang secara tiba-tiba
 - c. Naiknya harga pakan pabrikan untuk kegiatan budidaya
 - d. Pasar untuk budidaya kerapu masih dimonopoli oleh supplier sehingga pelaku usaha kesulitan dalam memasarkan hasil budidayanya
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai
- a. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan Stake holder terkait dengan ketersediaan benih yang sesuai yang dibutuhkan
 - b. Berkoordinasi dengan BMKG untuk mengetahui prakiraan cuaca

- c. Pembuatan pakan mandiri dengan berbahan baku lokal
- d. Penambahan komoditas baru untuk kegiatan budidaya
- e. Menciptakan pembudidaya baru skala rumah tangga
- f. Mencari atau mendapatkan pasar baru untuk komoditas kerapu

4. **Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan**

dengan sasaran program meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat aturan mempunyai Indikator Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%) formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Pelaku usaha yang taat peraturan dibagi jumlah pelaku usaha yang diperiksa dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(177:243) \times 100\% = 72,83\%$ dari target sebesar 75,00%. Dengan persentase capaiannya sebesar 97,33 %. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 78,57.%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Pembinaan dan penyadartahuan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya dalam melengkapi dokumen perizinannya telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan khususnya pada Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Mayoritas pemeriksaan atau pengawasan dilakukan kepada Nelayan Kecil, sementara Nelayan kecil di Bangka Belitung relatif belum taat dan sadar hukum
- b. Pada Tahun 2022, terdapat perubahan aturan atau regulasi yang signifikan pada proses perizinan. Kapal yang dulunya berukuran 6-10 GT yang hanya wajib Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) dan berlaku selama berusaha, untuk saat ini wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Sehingga pelaku usaha banyak yang kesulitan dalam mengurus izin ataupun memperpanjang perizinannya.
- c. Belum adanya waktu yang jelas dalam penyelesaian proses perizinan pada instansi yang menerbitkan izin (Proses perizinan relatif lama).

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan pembinaan secara kontinyu kepada nelayan kecil untuk melengkapi dokumen perizinannya

- b. Perlu adanya sosialisasi ketaatan pelaku usaha perikanan secara terus menerus mengingat aturan yang berubah
- c. Perlu menetapkan SOP terkait waktu kepengurusan perizinan serta sinergisme dengan Instansi yang terlibat dalam kepengurusan izin dengan memperbanyak gerai perizinan di titik sentra pelaku usaha sehingga memudahkan para pelaku usaha melengkapi dokumen perizinannya

5. **Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan** dengan sasaran program Meningkatnya laju pertumbuhan produksi usaha pengolahan hasil perikanan mempunyai indikator Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%) dengan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Produksi usaha pengolahan hasil perikanan tahun berjalan (t) dikurang Jumlah Produksi usaha pengolahan hasil perikanan tahun sebelumnya (t-1) dibagi jumlah Produksi usaha pengolahan hasil perikanan tahun sebelumnya (t-1) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(47.446:43.166,41):43.166,41 \times 100\% = 9,91\%$ dari target sebesar 3,5%. Persentase capaiannya sebesar 283%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2021 sebesar 86,15%.

Tingginya capaian indikator program disebabkan data base awal produksi pengolahan hanya pada Unit Pengolahan Ikan skala mikro, sedangkan pada beberapa tahun ini data produksi pengolahan bersumber dari Unit Pengolahan Ikan skala mikro, menengah dan besar.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Melimpahnya hasil produksi perikanan sebagai bahan baku utama usaha pengolahan hasil perikanan
- b. Unit-unit pengolahan skala menengah besar yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penyumbang angka volume produksi hasil pengolahan yang dominan, pada tahun 2022 setelah berakhirnya pandemic Covid-19, akses pasar Kembali normal dan permintaan pembeli dalam negeri maupun luar negeri mulai kembali meningkat.
- c. Unit pengolahan ikan skala mikro kecil yang ada di Prov Kep Bangka Belitung banyak yang meningkatkan kapasitas produksinya karena

kembali normalnya permintaan konsumen.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terutama Unit Pengolahan Ikan skala mikro kecil terhadap mutu dan keamanan pangan produk olahan hasil perikanan sebagai salah satu persyaratan ekspor untuk memperluas pasar.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Perlu upaya sosialisasi kepada pelaku usaha dalam jaminan mutu dan keamanan produk olahan hasil perikanan
3. Kinerja sasaran Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB diukur dengan indikator : Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	$\frac{\Sigma W(t) - \Sigma W(t-1)}{\Sigma W(t-1)} \times 100\%$ <p>$\Sigma W(t)$: Jumlah wisatawan tahun t $\Sigma W(t-1)$: Jumlah wisatawan tahun t-1</p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 452.443 jumlah wisatawan atau sebesar 102,4 % dari target 21,74% Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

(tabel ini dapat di buat landscape)

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	21,05 %	43	21,74	102,4	80,66	21,74	Sama dengan kolom 7

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 102,4% (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 80,66% (kolom 7) (tercapai/tidak tercapai*).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 43% (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 21,05% (kolom 3) terdapat peningkatan sebesar 80,66% persentase capaian capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu)
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran berhasil tercapai/tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut (siapkan PK eselon 3):

1. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata mempunyai Indikator kinerja Persentase Destinasi Pariwisata yang Ditingkatkan Kualitasnya formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Kawasan di Destinasi yang Dikelola / Total Jumlah Kawasan di Destinasi x 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 50%. Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
 - a. Adanya dukungan kuat dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan event nasional melalui Calender of Event Wonderful Indonesia.
 - b. Adanya perubahan trend wisata Yaitu : Wisata Alam, individual/private tourism, Domestic Tourism, Wisatawan muda dan menengah ke atas,

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Pengelolaan destinasi wisata masih lemah sehingga kurang menarik,
 - b. Rendahnya pemanfaatan destinasi wisata pada masyarakat,
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
- a. Memperbaiki pengelolaan destinasi wisata agar lebih menarik untuk dikunjungi,

- b. Meningkatkan pemanfaatan destinasi wisata pada setiap kabupaten dan kota,

2. **Program Pemasaran Pariwisata** dengan sasaran program Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara mempunyai Indikator Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara formula perhitungan indikator ini adalah 240.000 (target wisatawan) dibagi 452.443 (jumlah kunjungan wisatawan) dikali 100% . Capaian indikator kinerja adalah Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(240.000/452.443) \times 100\% = 53\%$ dari target $9,50\%$ atau sebesar $43,5\%$. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 43% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Bangka Belitung termasuk 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas,
- b. Mulai normalnya intensitas penerbangan dari dan ke Pangkalpinang serta Belitung,

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih kurangnya peran swasta dalam membangun daya tarik wisata buatan yang memiliki keunggulan tertentu,
- b. Daya tarik wisata alam belum dikelola secara inkremental dan berkelanjutan (sustainable) namun sporadis, temporer dan tanpa perencanaan yang matang,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan promosi pariwisata dan penyelenggaraan event pariwisata, melaksanakan program CHSE untuk industri pariwisata,
- b. Menambahkan jadwal penerbangan dari dan ke pulau bangka serta belitung,

3. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif** dengan sasaran program Meningkatnya Usaha Ekonomi Kreatif Dengan Dukungan Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Kreatif mempunyai Indikator Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terlatih dan Tersertifikasi formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Memiliki Kompetensi} / \text{Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf}) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja ini masih menunggu data dari kementerian pusat.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Berkembangnya bidang ekonomi kreatif khususnya kuliner dan kriya,
- b. Adanya dukungan pemerintah dalam meningkatkan terlatihnya pelaku ekonomi kreatif,

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kualitas SDM Ekraf masih lemah sehingga kurangnya inovasi produk,
- b. Rendahnya pemanfaatan IT oleh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Pembuatan roadmap ekonomi kreatif melibatkan lembaga pemerintah dan kalangan swasta,
- b. Mempersiapkan investor bagi pelaku ekonomi kreatif,

4. **Program Pengembangan Kebudayaan** dengan sasaran program Meningkatnya Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional yang dibina mempunyai Indikator Jumlah Lembaga Adat yang dibina formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Lembaga Adat yang dibina yaitu 1 lembaga dari target sebesar 1 Lembaga. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Meningkatnya SDM dan pranata adat yang dibina,

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kurangnya sikap toleransi dan simpati terhadap kebudayaan masyarakat lain yang dapat menyebabkan masalah kebudayaan,
- b. Pengelolaan aset sejarah dan budaya masih lemah sehingga kurang menarik,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Memberdayakan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat
- b. Menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan,

5. **Program Pengembangan Kesenian Tradisional** dengan sasaran program Meningkatnya pendidikan dan pelatihan SDM Kesenian Tradisional;Meningkatnya kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional mempunyai Indikator Jumlah SDM Kesenian Tradisional yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan; Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya formula perhitungan indikator ini adalah . Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi Jumlah SDM Kesenian Tradisional yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dikali 100%. Capaian indikator kinerja ini masih menunggu data dari kementerian pusat.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Meningkatnya pelaksanaan event kesenian daerah,
- b. Meningkatnya lembaga kesenian tari daerah,

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Belum optimalnya Pembelajaran pada masyarakat berbasis Kesenian,

b. Lunturnya tradisi kesenian daerah,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Perlunya kolaborasi semua pihak dalam merawat dan mengembangkan seni tradisional
- b. Menyelenggarakan berbagai kegiatan pagelaran dan festival kesenian daerah dan tradisi,

6. **Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya** dengan sasaran program Meningkatnya pendaftaran objek cagar budaya mempunyai Indikator Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan. Capaian indikator kinerja adalah 80% dari target sebesar 5 Objek.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Meningkatnya pelestarian dan cagar budaya daerah,

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Penetapan Status Kawasan Cagar Budaya yang belum jelas.,
- b. Perencanaan Pengelolaan Kawasan cagar budaya yang tidak Tuntas,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Penetapan Status Kawasan Cagar Budaya Secara Efektif dan Efisien,
- b. Perencanaan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dilakukan secara Terintegrasi dan Berkesinambungan,

3. Kinerja sasaran Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	$\frac{\text{PDRBi}(t) - \text{PDRBi}(t-1)}{\text{PDRBi}(t-1)} \times 100\%$ <p> PDRBi(t) : PDRB sektor i tahun t PDRBi(t-1) : PDRB sektor i tahun t-1 </p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah atau sebesar dari target Sumber data

diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022(%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	1,76	6,78	1,76	6,78 *)	385,23	1,76	385,23

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut:

- Tercapai 6,78 *), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 385,23 (tercapai) Belum diperoleh hasil capaian tahun ini (data BPS).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 6,78 % (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 1,76 (kolom 3) terdapat peningkatan*) Belum dapat dibandingkan, karena capaian realisasi tahun ini belum ada.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut (siapkan PK eselon 3):

- Program pengelolaan aspek kegeologian dengan sasaran kinerja program Peningkatan Kepatuhan Penataan Izin Air Tanah mempunyai Indikator kinerja Persentase Kepatuhan Penataan Izin Air Tanah, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Pengguna Air Tanah yang memiliki izin dibagi Jumlah Pengguna Air Tanah dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\frac{95}{100} \times 100\% = 95\%$ dari target 75% atau sebesar 126,67 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Program Pengelolaan Aspek Kegeologian merupakan kewenangan provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri 90 Tahun 2019.,
- Output program tingkat kepatuhan perizinan memang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral,

- c. Dukungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pelaksanaan program.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Ketersediaan anggaran yang terbatas,
- b. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia secara kuantitas dan kualitas,
- c. Kurangnya kesadaran pengguna air tanah untuk melengkapi usahanya dengan perizinan air tanah,
- d. Belum dilaksanakannya pemetaan zona konservasi air tanah.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait,
- b. Koordinasi dengan bagian program perencanaan OPD,
- c. Penambahan ketersediaan anggaran,
- d. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui diklat, bimtek.

2. Program pengelolaan mineral dan batubara dengan sasaran program Peningkatan Pengelolaan Pertambangan mempunyai Indikator Persentase Pertambangan yang "good mining practices" formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah WIUP aktif yang dibina dan diawasi dibagi Jumlah total WIUP aktif dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $\frac{41}{169} \times 100\% = 24,26\%$ dari target sebesar 80%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 0% (dikarenakan kewenangan pengelolaan pertambangan diambil alih oleh pemerintah pusat).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Ketersediaan Dana untuk mencapai tingkat pengawasan yang ideal,
- b. Meningkatkan Fungsi Cabdin yang di wilayah masing-masing.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- c. Kewenangan Pertambangan diambil alih oleh Pemerintah Pusat sesuai UU NO 3 Tahun 2020,
- d. Pendelegasian Kewenangan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sesuai Perpres No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 11 April 2022,
- e. Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah baru efektif dilaksanakan pada Bulan Agustus tahun 2022,
- f. Ketersediaan anggaran Pembinaan dan pengawasan sangat kecil.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- c. Mempermudah proses perizinan berusaha bidang Bidang pertambangan Mineral dan Batubara khususnya Mineral Bukan Logam dan Batuan,
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemegang IUP OP secara berkelanjutan,
 - e. Adanya dana pembinaan dan pengawasan untuk IUP OP yang aktif yang cukup memadai.
3. Program pengelolaan energi terbarukan dengan sasaran program Peningkatan Penggunaan Bauran Energi mempunyai Indikator Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah penggunaan energi baru terbarukan dibagi jumlah penggunaan energi total dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $\frac{215.369,5 TOE}{1.247.341,99 TOE} \times 100\% = 17,27\%$ (Perhitungan capaian angka ini merupakan angka capaian tahun 2021 yang dirilis pada bulan Juli 2021 yang digunakan untuk awal tahun 2022) dari target sebesar 10,94%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 8,88%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Koordinasi dengan Dewan Energi Nasional terkait perhitungan bauran energi daerah berjalan baik,
- b. Anggaran kegiatan konservasi energi di wilayah provinsi pada tahun 2022.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- c. Ketersediaan data penggunaan bahan bakar minyak yang valid sulit diperoleh.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- c. Agar anggaran kegiatan konservasi energi di wilayah Provinsi lebih ditingkatkan,
 - d. Mendorong badan usaha dan stakeholder yang melakukan kegiatan penyediaan, perusahaan maupun pemanfaatan energi lebih mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan dibanding dengan energi fosil,
 - e. Tetap menjalin koordinasi yang baik dengan semua pihak yang terkait.
4. Program pengelolaan ketenagalistrikan dengan sasaran program Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik mempunyai Indikator Rasio Elektrifikasi formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Rumah Tangga berlistrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%. Capaian

indikator kinerja adalah $\frac{485.033}{485.033} \times 100\% = 100\%$ dari target sebesar 99,99%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 99,99%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Terlaksananya koordinasi dengan pihak PLN terkait listrik,
- b. Tersedianya anggaran kegiatan pada tahun 2022.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- c. Ketersediaan anggaran kegiatan yang belum memadai,
- d. Ketersediaan data terkait listrik yang masih kurang.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- c. Penambahan anggaran kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi,
- d. Koordinasi ke Kementerian ESDM RI.

5. Kinerja sasaran Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan	$\frac{\text{PDRBi}(t) - \text{PDRBi}(t-1)}{\text{PDRBi}(t-1)} \times 100\%$ <p>PDRBi(t) : PDRB sektor i tahun t PDRBi(t-1) : PDRB sektor i tahun t-1</p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 15,45 atau sebesar 561 dari target 2,75. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

(tabel ini dapat di buat landscape)

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 Terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan	1,5	10,24	2,75	15,45*	561	2,75	561

**) Angka/ nilai realisasi 2022 (angka sementara capaian sampai dengan TW3)*

Analisis Ketercapaian Sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai **15,45** (= Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan= **4,55*** + Presentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan= **10,9***), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar **561** dikarenakan penetapan target pasca pandemi covid-19 yang dalam kondisi sangat rendah 1-2% akibat dari capaian tahun 2019 dikisaran 0 s.d. 1% dan tahun 2020 -4 s.d. -6% adanya lock-down dunia sehingga dilakukan penyesuaian target capaian.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 10,24, terhadap target tahun lalu sebesar 1,5 (kolom 3) terdapat peningkatan sebesar 5,21% ini dikarenakan pertengahan tahun 2021 sebagian lock-down sudah tidak diberlakukan artinya permintaan bahan baku industri sudah mulai terjadi dan aktifitas perdagangan pun mulai tumbuh kembali, hal ini pun berlanjut di tahun 2022.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran berhasil tercapai Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran RPJMD (Sektor Industri Pengolahan)

No	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi	1,00	5,44	2,00	4,55*	227,50%	2,00	227,50%

	<i>Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan</i>							
	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	14,250	17,925	14,500	20,820**	143,59%	14,500	143,59%
	<i>Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliyun Rp)</i>							

**) Angka/ nilai realisasi 2022 (angka sementara capaian sampai dengan TW3)*

****) Angka/ nilai realisasi 2022 (angka sementara capaian sampai dengan TW3+estimasi)*

1. **Program perencanaan dan pembangunan industri** dengan sasaran program:

- Meningkatnya pertumbuhan industri mempunyai Indikator Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri (%) formula perhitungan indikator ini adalah $\frac{\text{Pertumbuhan Usaha Industri (N)} - \text{Pertumbuhan Usaha Industri (N-1)}}{\text{Pertumbuhan Usaha Industri (N)}} \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(2/2) \times 100\% = 100\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 2%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 1%.
- Meningkatnya Kemasan Produk IKM yang diproduksi mempunyai Indikator Persentase Kemasan Produk IKM yang diproduksi (%) formula perhitungan indikator ini adalah $\frac{\text{Jumlah Kemasan Produk IKM yang diproduksi (N)}}{\text{Jumlah Permintaan Kemasan (N)}} \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(80/80) \times 100\% = 100\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 80%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 70%. (UPTD RPK)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Pertumbuhan pada subkategori industri makanan dan minuman,
- b. Kenaikan produksi kelapa sawit yang menjadi bahan baku industri CPO menjadi pendorong tumbuhnya produksi CPO dan turunannya,
- c. Melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada para pelaku usaha UMKM dan pembina Industri tentang kaidah penggunaan kemasan sesuai dengan

peraturan perundangan-perundangan dalam rangka meningkatkan daya saing dan nilai jual produk UMKM.

- d. Meningkatkan sosialisasi tersedianya pemanfaatan fasilitas layanan UPTD. Rumah Promosi dan Kemasan dalam memberikan layanan dibidang desain dan produksi kemasan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UKMM guna menjadikan kemasan produk UMKM menjadi kemasan produk yang berdaya saing dan bernilai jual.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana terhadap mesin dan peralatan agar dapat menghasilkan produk kemasan UMKM yang berkualitas tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada para pelaku usaha UMKM.
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terhadap pegawai dan tenaga desain/operator agar mampu memberikan pelayanan dibidang kemasan secara maksimal seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi.
- g. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelayanan kemasan ditingkat kabupaten/kota untuk menjangkau para pelaku UMKM yang belum terfasilitasi oleh UPTD. Rumah Promosi dan Kemasan guna pemerataan fasilitas layanan.
- h. Melakukan evaluasi dan pengawasan internal dalam rangka menjaga kualitas layanan dan mampu memberikan fasilitasi layanan terbaik bagi para pelaku UMKM.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Sinkronisasi Regulasi Industri
- b. Masih adanya masyarakat/pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang keberadaan fasilitas layanan kemasan yang dimiliki oleh UPTD. Rumah Promosi dan Kemasan Dinas Prindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- c. Masih terdapat para pelaku UMKM yang kurang memahami tentang penggunaan kemasan produk yang baik dan benar sesuai dengan perundang-undangan dan kebutuhan konsumen dalam rangka meningkatkan daya saing produk.
- d. Seiring dengan pesatnya fluktuasi atas harga dan jenis kemasan yang berkembang menjadikan keterbatasan varian produk yang difasilitasi dan

kurang fleksibilitas terhadap perubahan dalam menetapkan pengenaan harga dan varian objek pajak terkait peraturan retribusi daerah.

- e. Keterbatasan teknologi mesin dan peralatan serta keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki dalam memberikan pelayanan kepada para pelaku UMKM.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Harmonisasi Regulasi
- b. Promosi/ Percepatan pembangunan Kawasan Industri Sadai
- c. Percepatan hilirisasi produk-produk dalam RPIP dengan melibatkan stakeholder terkait.
- d. Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya kemasan produk secara efektif dan berkelanjutan kepada para pelaku UMKM di Kabupaten/Kota.
- e. Melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan para stakeholder lainnya baik di Pemerintahan maupun Pihak lainnya dalam rangka sinkronisasi program kegiatan yang dimiliki sehubungan dengan bantuan kepada masyarakat/pelaku UMKM berupa startup kemasan.
- f. Melaksanakan kegiatan Desain On The Spot dalam upaya pembinaan dan memberikan layanan kemasan ditingkat kabupaten/kota untuk menjangkau para pelaku UMKM yang belum terfasilitasi oleh UPTD. Rumah Promosi dan Kemasan guna pemerataan fasilitas layanan.
- g. Upgrading skill Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sumber Daya Mesin dan Peralatan yang dimiliki.

2. **Program pengendalian izin usaha industri** dengan sasaran program Meningkatnya Industri yang sesuai Izin Usaha Industri mempunyai Indikator Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Industri sesuai IUI (N)/ Jumlah Industri sesuai IUI (Babel=50) x 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(80/50) \times 100\% = 160\%$ dari target sebesar 80%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 30%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Adanya dukungan kebijakan pemerintah proses penerbitan perizinan berusaha melalui OSS RBA.

- Kesadaran pelaku usaha pentingnya perizinan yang dimiliki.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Belum optimalnya dukungan alokasi anggaran
- b. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pengendalian izin usaha industri
- c. Terbatasnya jumlah SDM

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan koordinasi lintas sektor terhadap pengendalian izin usaha industry.
- b. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia
- c. Peningkatan alokasi pendanaan dan sarana prasarana.

3. **Program pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan sasaran** program Meningkatnya data informasi industri di SIINAS mempunyai Indikator Prosentase data informasi industri di SIINAs formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah informasi industri di SIINAS (sd. N)/ Jumlah informasi industri di SIINAS (Babel=76) x 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(76/76) \times 100\% = 100,00\%$ dari target sebesar 90%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 70%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya dukungan kebijakan peraturan perundangan
- b. Kesadaran pelaku usaha dalam penginputan data industri
- c. Minimnya dukungan alokasi anggaran dan SDM.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Keterbatasan pengembangan usaha industri hilirisasi produk.
- b. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha industri besar dalam penyampaian data industri,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Mengoptimalkan pengembangan usaha industri hilir.
- b. Optimalisasi pelaksanaan edukasi kepatuhan penyampaian data industri bagi pelaku usaha
- c. Mengoptimalkan dukungan anggaran dan SDM.

Indikator Kinerja Sasaran RPJMD (Sektor Perdagangan)

No	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	1,00	5,78	2,00	10,9*	545,00%	2,00	545,00%
	<i>Presentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan</i>							
	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	11,500	12,666	11,750	14,787**	125,84%	11,750	125,84%
	<i>Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Triliyun Rp)</i>							

**) Angka/ nilai realisasi 2022 (angka sementara capaian sampai dengan TW3)*

****) Angka/ nilai realisasi 2022 (angka sementara capaian sampai dengan TW3+estimasi)*

4. **Program Program perizinan dan pendaftaran perusahaan** dengan sasaran kinerja program Meningkatkan Ketaatan Perdagangan Bahan Berbahaya mempunyai Indikator kinerja Persentase Tertib Usaha formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Pelaku Usaha (N)/ Jumlah Pelaku Usaha (Babel=3) x 100% Capaian kinerja untuk indikator ini adalah (3/3) x 100%= 100,00% dari target 3 atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Meningkatkan sinergi seluruh Kementerian/Lembaga yang melakukan pengawasan di setiap sektor perdagangan terutama mengenai fasilitasi Perdagangan yang melekat atau wajib dipenuhi di setiap sektor perdagangan dalam upaya memperluas jangkauan pembinaan tentang fasilitasi perdagangan, baik kepada pelaku usaha
- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan usaha perdagangan agar memiliki perizinan perdagangan
- Terpantaunya terhadap komitmen pelaku usaha dalam memiliki perizinan perdagangan

- d. Peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap perizinan perdagangan yang mereka miliki serta memfasilitasi pemenuhan komitmen surat izin usaha perdagangan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih terdapat pelaku usaha yang kurang memahami tentang perizinan perdagangan dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- b. Masih adanya pelaku usaha yang enggan untuk koordinasi kepada petugas dalam hal untuk pengurusan perizinan perdagangan

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Penyelenggaraan edukasi dan advokasi pelaku usaha yang efektif; dan
- b. Memfasilitasi Penyediaan sistem pelayanan melalui elektronik.
- c. Kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dalam meningkatkan sosialisasi terkait dengan pengurusan perizinan perdagangan melalui system elektronik.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan administrasi perizinan terhadap pelaku usaha perdagangan

5. **Program peningkatan sarana distribusi perdagangan** dengan sasaran program Meningkatnya sarana dan Barang terdistribusi mempunyai Indikator Persentase barang terdistribusi formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah terdistribusi (N)/ Jumlah dikelola (babel=200Ton) x 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(160/200) \times 100\% = 80\%$ dari target sebesar 80%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 65%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Semakin baiknya sistem distribusi
- b. Meningkatnya jumlah pasokan barang kebutuhan pokok

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih lemahnya sistem pengumpulan data dan informasi
- b. Tidak tersedianya pusat perdagangan grosir

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan pelaku usaha distribusi
- b. Membuat suatu sistem informasi terpadu terkait data informasi perdagangan

6. **Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting** dengan sasaran program Meningkatnya ketersediaan Bapokting dan penyaluran pupuk bersubsidi mempunyai Indikator Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%) formula perhitungan indikator ini adalah Nilai Koefisien Variasi < 11%. Capaian indikator kinerja adalah Koefisien Variasi 6% dari target sebesar 9%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 2,25% (capaian tahun lalu semakin kecil angka yang didapat semakin bagus).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dari produsen hingga sampai ke tingkat distributor dan agen di daerah.
- b. Faktor cuaca dan alam sangat mempengaruhi kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting ke daerah.
- c. Kemampuan produsen untuk selalu memproduksi bahan pokok dan barang penting secara kontinyu.
- d. Masa panen bahan kebutuhan pokok yang sesuai jadwal panen.
- e. Distributor dan pelaku usaha yang tertib, jujur dan disiplin dalam melakukan usahanya.
- f. Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait penentuan HET dan HAP di tingkat daerah.
- g. Kerjasama antar daerah terkait pemenuhan barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk mengatasi dan mengantisipasi kelangkaan barang kebutuhan pokok.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Terhambatnya distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dari produsen ke distributor di daerah hingga ke agen dan toko-toko.

- b. Faktor cuaca dan alam yang tidak menentu sehingga mempengaruhi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting ke daerah.
- c. Kemampuan produsen yang terkadang menurunkan jumlah produksi dikarenakan gagal panen dan lain sebagainya.
- d. Gagal panen yang dikarenakan faktor cuaca maupun faktor penyakit.
- e. Panic Buying masyarakat yang diakibatkan informasi yang salah tentang kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- f. Masih terdapat distributor dan agen yang menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk kepentingan keuntungan pribadi.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Pemantauan tiap waktu agar distribusi dari produsen hingga sampai ke **distribusi** dan agen di daerah lancar.
- b. Antisipasi faktor cuaca dan alam di bulan –bulan tertentu untuk menjaga pasokan dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tetap stabil.
- c. Pemantauan masa panen barang kebutuhan pokok untuk selalu panen sesuai jadwal.
- d. Edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan panic buying apabila mendapat informasi tentang kenaikan harga dan kelangkaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- e. Melakukan pengawasan kepada distributor dan agen-agen agar tidak melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting di saat terjadi kelangkaan barang.
- f. Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting setiap hari.
- g. Melakukan Operasi Pasar dan Pasar Murah untuk antisipasi dan menekan laju inflasi.
- h. Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk melakukan penetapan HET dan HAP barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah.

- 7. **Program pengembangan ekspor** dengan sasaran program Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Non-Migas mempunyai Indikator

Persentase Pertumbuhan nilai ekspor (%) formula perhitungan indikator ini adalah $\text{Nilai Ekspor (N)} - \text{Nilai Ekspor (N-1)} / \text{Nilai Ekspor (N)} \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(6/5) \times 100\% = 120\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 5%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 89,16%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya diversifikasi produk ekspor
- b. Dukungan fasilitasi promosi dari pemerintah pusat/daerah
- c. Pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor daerah

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Turunnya harga pasar global untuk komoditas timah
- b. Belum maksimalnya dukungan promosi produk ekspor
- c. Masih terbatasnya diversifikasi produk ekspor
- d. Belum maksimalnya fasilitas dan sarpras pendukung kegiatan ekspor
- e. Menurunnya ketersediaan bahan baku ekspor
- f. Tingginya biaya produksi, salah satunya karena kenaikan harga bahan bakar minyak dan kenaikan biaya logistik ekspor.
- g. Pemberlakuan Domestic Market Obligatio (DMO) 30% pada produk ekspor turunan kelapa sawit

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor
- b. Meningkatkan promosi produk ekspor daerah
- c. Meningkatkan pembinaan pelaku usaha ekspor
- d. Mendukung peningkatan fasilitas dan sarpras pendukung kegiatan ekspor
- e. Meningkatkan kerjasama antar stakeholder pendukung ekspor

8. **Program standarisasi dan perlindungan konsumen** dengan sasaran kinerja program:

- Meningkatkan Indeks Keberdayaan Konsumen dan Layanan standarisasi produk mempunyai Indikator kinerja Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen (Nilai) formula perhitungan indikator ini adalah Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen (N). Capaian kinerja

untuk indikator ini adalah $(42/42) \times 100\% = 100,00\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 42 atau sebesar 100%.

- Meningkatnya komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku mempunyai Indikator kinerja Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%) formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Ruang Lingkup (N)/ Jumlah Ruang Lingkup (=4) x 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(4/4) \times 100\% = 100,00\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 75% atau sebesar 100%. (UPTD BPSMB)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Meningkatkan sosialisasi pemanfaatan SIMPKTN serta melakukan evaluasi penggunaan SIMPKTN agar dapat dilakukan tracking system pengaduan konsumen ke pemerintah daerah. Dengan ini, diharapkan pemanfaatan SIMPKTN sebagai portal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) dapat menjadi lebih optimal.
- b. Meningkatkan sinergi seluruh Kementerian/Lembaga yang melakukan pengawasan di setiap sektor perdagangan terutama mengenai perlindungan konsumen yang melekat atau wajib dipenuhi di setiap sektor perdagangan dalam upaya memperluas jangkauan pembinaan tentang perlindungan konsumen, baik kepada pelaku usaha maupun konsumen.
- c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembinaan tentang perlindungan konsumen yang diberikan kepada masyarakat (konsumen).
- d. Menyediakan sistem informasi pengaduan konsumen yang terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga pengawas di setiap sektor perdagangan karena pengawasan perdagangan di setiap sektor tidak hanya berfokus di Kementerian Perdagangan melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh Kementerian/Lembaga sesuai bidang tugas dan fungsinya. Keberdayaan konsumen dapat dicapai dengan 2 hal, yaitu perlindungan konsumen (melalui penetapan peraturan perundangan dan pelaksanaan fungsi pengawasan) dan

pendidikan konsumen (melalui pembinaan menjadi konsumen cerdas/berdaya). Dengan adanya sistem informasi pengaduan yang terintegrasi akan memudahkan Kementerian Perdagangan dalam mendistribusikan pengaduan kepada Kementerian/Lembaga yang membidangi.

- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkait perlindungan konsumen, dimana pemerintah dan instansi terkait harus memprioritaskan perlindungan konsumen pada produk yang berdampak luas seperti obat dan makanan karena dikonsumsi secara luas. Demikian pula penegakan hukum pada kasus-kasus konsumen yang berdampak luas harus dilaksanakan dengan prioritas yang tinggi untuk menciptakan efek jera bagi pelaku usaha yang memiliki intensi merugikan konsumen atau untuk menghindari kelalaian pelaku usaha yang berdampak serius.
- f. Peningkatan pemahaman masyarakat akan Hak-hak nya sebagai konsumen untuk berani melaporkan setiap kerugian atas transaksi pembelian/konsumsi yang dilakukan, terutama kerugian yang berdampak luas kepada masyarakat.
- g. Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan peredaran barang/jasa, dengan cara meningkatkan edukasi kepada konsumen mengenai aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- h. Penambahan/Peningkatan akreditasi Laboratorium Pengujian untuk komoditi Potensial

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih terdapat masyarakat yang kurang memahami tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui lembaga perlindungan konsumen. Sehingga perlu adanya edukasi dan sosialisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia kepada

masyarakat melalui pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.

- c. Ketersediaan regulasi layanan pengujian kesadaran pengusaha atas produk ber SNI masih rendah.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Penyelenggaraan edukasi dan advokasi konsumen yang efektif; dan
- b. Penyediaan sistem informasi konsumen yang terintegrasi, andal, dan terpercaya.
- c. Kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dalam meningkatkan sosialisasi atas keberadaan lembaga perlindungan konsumen, khususnya keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa konsumen, baik lokasi kantor, fungsi, kewenangan, dan media penyampaian pengaduan/sengketa konsumen yang dimiliki.
- d. Peningkatan pemahaman masyarakat akan Hak-nya sebagai konsumen untuk berani melaporkan setiap kerugian atas transaksi pembelian/konsumsi yang dilakukan, terutama kerugian yang berdampak luas kepada masyarakat.
- e. Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan peredaran barang/jasa, dengan cara meningkatkan edukasi kepada konsumen mengenai aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- f. Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan peredaran barang/jasa, dengan cara meningkatkan pengenalan kepada konsumen mengenai lokasi dan fungsi dari lembaga-lembaga penyelesaian sengketa konsumen, mulai dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), termasuk Kementerian Perdagangan selaku leading sector perlindungan konsumen.
- g. Mengidentifikasi komoditi potensial untuk SNI/dan Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/HACCP atau standar lainnya yang relevan

h. Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen lada dan pengembangan produk turunan dari Lada

9. **Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri** dengan sasaran program:

- Meningkatnya Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai Indikator Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri (%) formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah produk, yang dipasarkan (N)/ Jumlah produk, yang dipasarkan (tabel=9) x 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(8/8) \times 100\% = 100,00\%$ dari target sebesar 60%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 40%.
- Meningkatnya Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai Indikator Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri (%) formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Produk IKM yang dipasarkan (N) / Jumlah Produk IKM (N) X 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(80/80) \times 100\% = 100,00\%$ dari target sebesar 80%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 70%. (UPTD RPK)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Peran aktif para pelaku UMKM dalam mengikuti program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Kep Babel maupun kemendag RI.
- b. Kualitas media pendukung pemasaran produk seperti kemasan dan media promosi,
- c. Kegiatan promosi produk yang tepat sasaran,
- d. Adanya wadah pemasaran yang dikelola secara baik dan profesional,
- e. Terjalin kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder yang mendukung pemasaran produk,
- f. Adanya sosialisasi peningkatan kualitas usaha dan produk.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Ditingkat provinsi, pelaku usaha lokal mendapat ancaman dari masuknya berbagai macam produk nasional,
- b. Ditingkat nasional, masih kurangnya kesadaran dari pelaku usaha

akan pemanfaatan sosial media dan marketplace sebagai wadah promosi dan pemasaran produk,

- c. Masih minimnya kesadaran atau usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk secara mandiri. Pelaku usaha cenderung sangat bergantung dengan kegiatan-kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan pemerintah dan stakeholder terkait,
- d. Masih minimnya kesadaran pelaku usaha untuk membangun citra dan kualitas produk, sehingga berakibat minimnya daya saing produk dipasar nasional,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Diadakannya kegiatan mempromosikan dan memasarkan produk-produk lokal dari Bangka Belitung ke luar daerah.
 - b. Pengembangan kegiatan promosi dan pemasaran serta Sosialisasi Bangka Buatan Indonesia melalui kegiatan pameran lokal.
 - c. Menciptakan wadah pemasaran yang profesional untuk menjangkau pasar lokal maupun nasional,
 - d. Melakukan kegiatan promosi yang tepat sasaran
 - e. Meningkatkan kualitas lembaga yang mendukung peningkatan kualitas media pemasaran produk, seperti: UPTD Rumah Promosi dan Kemasan,
 - f. Melakukan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait guna mendukung pemasaran produk,
 - g. Melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap peningkatan kualitas usaha dan produk.
6. Kinerja sasaran Menurunkan tingkat Pengangguran diukur dengan indikator Tingkat pengangguran terbuka. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Menurunkan tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	$TPT = (a/b) \times 100\%$ a = Jumlah pengangguran b = Jumlah angkatan kerja

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 111,66% atau sebesar 4,77 dari target 5,40. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tingkat pengangguran terbuka	5,5	5,03	5,40	4,77	111,66	5,40	111,66

Analisis Ketercapaian Sasaran Menurunkan tingkat Pengangguran adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 4,77 (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 111,66 % (kolom 7) (tercapai).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 5,03% (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 5,5 (kolom 3) terdapat kenaikan sebesar 0,26% (capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu)
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran berhasil tercapai/tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. **Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja** dengan sasaran kinerja program *Meningkatnya pencari kerja yang berkompentensi, Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan sektor swasta, Meningkatkan kompetensi dan produktivitas* mempunyai Indikator kinerja *Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan Keterampilan berdasarkan klaster kompetensi, Persentase pencari kerja mendapatkan informasi Layanan BLK, Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas* formula perhitungan indikator ini adalah *Jumlah Perusahaan Yang di Tingkatkan Produktivitas* Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 48 orang dari target 48 orang atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Pengetahuan. Dari pengetahuan seseorang akan memperoleh keterampilan seperti daya pikir dan daya juang, untuk memecahkan

- masalah dan mengambil keputusan;
- b. Keterampilan. Perusahaan lebih menyukai orang-orang yang memiliki keterampilan daripada yang sama sekali tidak punya. Sebab, akan membuat aktivitas kerja menjadi lebih lancar;
- c. Kemampuan. Jika tenaga kerja memiliki kemampuan yang baik, akan mudah untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan;
- d. Sikap. Sikap baik dapat ditunjukkan dengan masuk kantor tepat waktu, disiplin, dan tidak pernah telat. Tentu saja ini menjadi ciri tenaga kerja yang baik;
- e. Perilaku. Jika perilaku baik, akan berdampak positif terhadap produktivitas kerja sehingga juga akan berdampak baik pada peningkatan penjualan produk.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Sarana dan Prasarana yang belum memadai dalam menunjang program kegiatan;
- b. Kurangnya Inovasi dalam pembuatan Program Pelatihan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Sejauh ini upaya yang dilakukan masih sebatas pemberian program pelatihan kejuruan secara umum;
- b. Sedangkan dari segi faktor penghambat seperti sarana dan prasarana, upaya yang dilakukan masih sebatas evaluasi program setiap tahunnya dan pengajuan tambahan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. **Program penempatan tenaga kerja** dengan sasaran program *Meningkatnya tenaga kerja yang ditempatkan* mempunyai Indikator *Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan* formula perhitungan indikator ini adalah *Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan* dibagi *Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar* dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(1.491/2.618) \times 100\% = 56,95\%$ dari target sebesar 5%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 5,6% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Peningkatan Kompetensi SDM Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri
- b. Peningkatan Informasi Pasar Kerja
- c. Pemasaran Tenaga Kerja

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kurangnya Investasi
- b. Kurangnya SDM Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri
- c. Kurangnya Kompetensi Pencari Kerja

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja.
- b. Pemasaran Tenaga Kerja (Job Canvassing).
- c. Peningkatan Investasi.

3. **Program Hubungan Industrial** dengan sasaran program *Meningkatnya hubungan industrial di perusahaan* mempunyai Indikator *Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial* formula perhitungan indikator ini adalah *Jumlah Perusahaan yang mendapat pembinaan* dibagi *Jumlah Perusahaan yang wajib dibina* dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(1626/3535) \times 100 = 45,99\%$ dari target sebesar 45,99%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 26,07% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya dukungan dari Kepala Dinas dan Kepala Bidang.
- b. Adanya dukungan dari Kepala Seksi terkait Kegiatan.
- c. Adanya tim yang solid.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kurangnya Anggaran.
- b. Kurangnya Jumlah SDM.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai :

- a. Penambahan Anggaran.
- b. Penambahan jumlah dan peningkatan SDM.

4. **Program Pengawasan Ketenagakerjaan** dengan sasaran program *Meningkatnya perusahaan yang memahami norma K3* mempunyai Indikator *Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan ketenagakerjaan* formula perhitungan indikator ini adalah *jumlah Perusahaan* dibagi *Jumlah perusahaan yang memahami norma K3* dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(270/3535) \times 100 = 7,64\%$ dari target sebesar 61%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 19,1% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Anggaran untuk Program Pengawasan Ketenagakerjaan pada Tahun Anggaran 2022
- b. Sumber Daya Manusia di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai

dengan kebutuhan

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Anggaran yang tidak memadai dan rasionalisasi anggaran
- b. Sumber Daya Manusia yang tidak mencukupi
- c. Sarana dan Prasana yang tidak sesuai

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai yaitu :

- a. Peningkatan kompetensi SDM bidang Pengawasan yang harus mencukupi
- b. Anggaran yang memadai dan mencukupi

7. Kinerja sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	$IPK = I.PTK + I.PdTK + I.KK + I.PKK + I.Prod + I.HI + I.KLK + I.UPAH + I.JSTK$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 71,09 % dari target 64,80 Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	64	47,84	64,80	71,09	109,71	64,80	109,71

Analisis Ketercapaian Sasaran indeks pembangunan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 71,09 % (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap

target sebesar 109,71 % (kolom 7) tercapai.

- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 47,84 % (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 64% (kolom 3) terdapat peningkatan sebesar 23,25 %.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut (siapkan PK eselon 3):

1. **Program Pengawasan Ketenagakerjaan** dengan sasaran program *Meningkatnya perusahaan yang memahami norma K3* mempunyai Indikator *Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan ketenagakerjaan* formula perhitungan indikator ini adalah *Jumlah Perusahaan* dibagi *Jumlah perusahaan yang memahami norma K3* dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(270/3535) \times 100\% = 7,64\%$ dari target sebesar 61%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 19,1% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Anggaran untuk Program Pengawasan Ketenagakerjaan pada Tahun Anggaran 2022
- b. Sumber Daya Manusia di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Anggaran yang tidak memadai dan rasionalisasi anggaran
- b. Sumber Daya Manusia yang tidak mencukupi
- c. Sarana dan Prasarana yang tidak sesuai

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai yaitu :

- a. Peningkatan kompetensi SDM bidang Pengawasan yang harus mencukupi
- b. Anggaran yang memadai dan mencukupi

2. **Program hubungan industrial** dengan sasaran program *Meningkatnya hubungan industrial di perusahaan* mempunyai Indikator *Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial* formula perhitungan indikator ini adalah *Jumlah Perusahaan yang mendapat pembinaan* dibagi *Jumlah Perusahaan yang wajib dibina* dikali 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini adalah $(1626/3535) \times 100 = 45,99\%$ dari target sebesar 45,99% lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 26,07% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya dukungan dari Kepala Dinas dan Kepala Bidang.
- b. Adanya dukungan dari Kepala Seksi terkait Kegiatan.
- c. Adanya tim yang solid.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kurangnya Anggaran.
- b. Kurangnya Jumlah SDM.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Penambahan Anggaran.
- b. Penambahan jumlah dan peningkatan SDM

3. **Program pelatihan kerja** dan produktivitas tenaga kerja dengan sasaran kinerja program *Meningkatnya pencari kerja yang berkompentensi, Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan sektor swasta, Meningkatkan kompetensi dan produktivitas* mempunyai Indikator kinerja *Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan Keterampilan berdasarkan klaster kompetensi, Persentase pencari kerja mendapatkan informasi Layanan BLK, Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas* formula perhitungan indikator ini adalah *Jumlah Perusahaan Yang di Tingkatkan Produktivitas* Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 48 orang dari target 48 orang atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Pengetahuan. Dari pengetahuan seseorang akan memperoleh keterampilan seperti daya pikir dan daya juang, untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan;
- b. Keterampilan. Perusahaan lebih menyukai orang-orang yang memiliki keterampilan daripada yang sama sekali tidak punya. Sebab, akan membuat aktivitas kerja menjadi lebih lancar;
- c. Kemampuan. Jika tenaga kerja memiliki kemampuan yang baik, akan mudah untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan;
- d. Sikap. Sikap baik dapat ditunjukkan dengan masuk kantor tepat waktu, disiplin, dan tidak pernah telat. Tentu saja ini menjadi ciri tenaga kerja yang baik;
- e. Perilaku. Jika perilaku baik, akan berdampak positif terhadap produktivitas kerja sehingga juga akan berdampak baik pada peningkatan penjualan produk.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Sarana dan Prasarana yang belum memadai dalam menunjang program kegiatan;
- b. Kurangnya Inovasi dalam pembuatan Program Pelatihan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Sejauh ini upaya yang dilakukan masih sebatas pemberian program pelatihan kejuruan secara umum;

- b. Sedangkan dari segi faktor penghambat seperti sarana dan prasarana, upaya yang dilakukan masih sebatas evaluasi program setiap tahunnya dan pengajuan tambahan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. **Program penempatan tenaga kerja** dengan sasaran program *Meningkatnya tenaga kerja yang ditempatkan* mempunyai Indikator *Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan* formula perhitungan indikator ini adalah *Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan* dibagi *Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar* dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(1.491/2.618) \times 100\% = 56,95\%$ dari target sebesar 5%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 5,6% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Peningkatan Kompetensi SDM Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri
- Peningkatan Informasi Pasar Kerja
- Pemasaran Tenaga Kerja

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kurangnya Investasi
- Kurangnya SDM Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri
- Kurangnya Kompetensi Pencari Kerja

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja.
- Pemasaran Tenaga Kerja (Job Canvassing).
- Peningkatan Investasi.

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan $IPK = I.PTK + I.PdTK + I.KK + I.PKK + I.Prod + I.HI + I.KLK + I.UPAH + I.JSTK$	64,80	71,09	109,71%

8. Kinerja sasaran Menurunkan tingkat kemiskinan diukur dengan indikator Persentase Angka Kemiskinan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana :</p> <p>$\alpha = 0$</p> <p>z = garis kemiskinan.</p> <p>y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p>n = jumlah penduduk.</p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 93,81 % atau sebesar 4,69 % dari target 5,00 %. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Angka Kemiskinan	5,5 %	4,67 %	5,00 %	4,69 %	106,20 %	5,00 %	106,20 %

Analisis Ketercapaian Sasaran Persentase Angka Kemiskinan adalah sebagai berikut:

- Tercapai 4,69 % (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 106,20 % (kolom 7) (tercapai/tidak tercapai*).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 4,67 % (kolom 4), terhadap

target tahun lalu sebesar 5,5 % (kolom 3) terdapat peningkatan/penurunan *) sebesar 8,89 % (persentase capaian capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu)

- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran berhasil tercapai/tidak tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut (siapkan PK eselon 3):

1. **Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan** dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani, mempunyai Indikator kinerja Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani dibandingkan dengan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang akan yang di ditangani dikali 100. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $1/8 \times 100\% = 12,50\%$ dari target 8 orang atau sebesar 50 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
- b. Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
- c. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- d. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- e. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- f. Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 18 November 2022 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
- b. Di beberapa kegiatan, terdapat rasionalisasi pagu anggaran, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan sehingga

- berimbang pada target dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan;
- c. Pada Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal :
 - a) Sisa dana yang tidak terealisasi karena Kegiatan ini bersifat respon kasus dan minimnya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk dipulangkan ke daerah Asal;
 - b) Anggarannya banyak terdapat di APBD Perubahan yang efektif pelaksanaannya di bulan November 2022.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia dan Bappena RI. terkait penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan bidang teknis pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas/instansi sosial dan atau pemberdayaan masyarakat desa di Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Menyiapkan dukungan terhadap program dan kegiatan yang memiliki hubungan perencanaan dan penganggaran dalam bentuk dana pendampingan atau *cost sharing* serta penguatan/pengembangan program dalam APBD, sehingga pelaksanaan capaian *outcome* kegiatan berjalan maksimal;
- f. Melakukan optimalisasi sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level Pusat- Provinsi, Provinsi - Kabupaten, lintas sektor maupun lintas program/bidang, untuk memaksimalkan pelayanan dan penanganan masalah menjadi lebih baik efektifitas dan juga pemanfaatannya.

2. **Program rehabilitasi sosial** dengan sasaran program Meningkatnya PMKS yang di Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti mempunyai Indikator :

- 1) Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Non Pemerintah dibandingkan dengan Jumlah PMKS yang akan yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Non Pemerintah dikali 100. Pada tahun 2022 diselenggarakan Rehabilitasi sosial dengan capaian kinerja untuk indikator ini adalah $141/141 \times 100\% = 100,00\%$ dari target 141 orang atau sebesar 50 %.
- 2) Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Pemerintah (UPTD. PSBS), formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun dibandingkan dengan Jumlah PMKS yang akan yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun dikali 100. Pada tahun 2022 diselenggarakan Rehabilitasi sosial dengan capaian kinerja untuk indikator ini adalah $27/40 \times 100\% = 67,50\%$ dari target 40 orang atau sebesar 50 %.
- 3) Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di PSBL, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Sosial Bina Laras dibandingkan dengan Jumlah PMKS yang akan yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Sosial Bina Laras dikali 100. Pada tahun 2022 diselenggarakan Rehabilitasi sosial dengan capaian kinerja untuk indikator ini adalah $27/20 \times 100\% = 135,00\%$ dari target 20 orang atau sebesar 50 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
- b. Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
- c. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- d. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- e. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- f. Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 18 November 2022 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan

- kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
- b. Di beberapa kegiatan, terdapat rasionalisasi pagu anggaran, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan sehingga berimbas pada pada target dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan;
 - c. Kurangnya sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan penanganan masalah sosial khususnya wanita tuna susila antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kab/kota dan instansi terkait.
 - d. Kegiatan ini bersifat respon kasus sehingga apabila tidak ada kasus maka kegiatan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan tidak dapat dilaksanakan;
 - e. Minimnya pembinaan/penyuluhan dari instansi/dinas/aparat terkait.
 - f. Minimnya pembinaan/sosialisasi dari instansi/dinas/aparat terkait kepada calon pekerja migran
 - g. Kurangnya sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kab/kota dan instansi terkait.
 - h. Pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti di Sub Kegiatan Pemulangan ke Daerah Asal, sisa pagu yang tidak terealisasi karena :
 - a) biaya transportasi tiket pesawat untuk klien hanya untuk sekali jalan bukan PP;
 - b) tidak ada lagi biaya Tes Covid.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia dan Bappena RI. terkait penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan bidang teknis pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan

- dinas/instansi sosial dan atau pemberdayaan masyarakat desa di Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Menyiapkan dukungan terhadap program dan kegiatan yang memiliki hubungan perencanaan dan penganggaran dalam bentuk dana pendampingan atau *cost sharing* serta penguatan/pengembangan program dalam APBD, sehingga pelaksanaan capaian *outcome* kegiatan berjalan maksimal;
 - f. Melakukan optimalisasi sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level Pusat- Provinsi, Provinsi - Kabupaten, lintas sektor maupun lintas program/bidang, untuk memaksimalkan pelayanan dan penanganan masalah menjadi lebih baik efektifitas dan juga pemanfaatannya.
3. **Program pengelolaan taman makam pahlawan** dengan sasaran program Meningkatnya TMP yang dikelola, mempunyai Indikator Prosentase TMP yang dikelola, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah TMP yang dikelola dibandingkan dengan Jumlah TMP yang ada dikali 100. Capaian indikator kinerja adalah $1/1 \times 100\% = 100,00\%$ dari target 1 TMP atau sebesar 100 %. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini ~~lebih tinggi/rendah/sama~~ *) dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 100,00 % (capaian tahun lalu).
- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
 - b. Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
 - c. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi;
 - d. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 18 November 2022 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
- b. Di beberapa kegiatan, terdapat rasionalisasi pagu anggaran, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan sehingga

berimbang pada target dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan;

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia dan Bappena RI. terkait penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan bidang teknis pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas/instansi sosial dan atau pemberdayaan masyarakat desa di Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. Menyiapkan dukungan terhadap program dan kegiatan yang memiliki hubungan perencanaan dan penganggaran dalam bentuk dana pendampingan atau *cost sharing* serta penguatan/pengembangan program dalam APBD, sehingga pelaksanaan capaian *outcome* kegiatan berjalan maksimal;
 - f. Melakukan optimalisasi sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level Pusat- Provinsi, Provinsi - Kabupaten, lintas sektor maupun lintas program/bidang, untuk memaksimalkan pelayanan dan penanganan masalah menjadi lebih baik efektifitas dan juga pemanfaatannya.
9. Kinerja sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa diukur dengan indikator Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	$\text{PDRB perkapita} = \frac{\text{PDRB desa}}{\Sigma \text{penduduk}}$ <p>PDRB desa : Nilai PDRB desa Σpenduduk : Jumlah penduduk desa</p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 100,00 % atau sebesar Rp. 1.479.389,- dari target Rp. 1.479.389,-. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022(%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1.409.026	1.409.026	1.479.389	1.479.389	100,00 %	1.479.389	100,00 %

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai Rp. 1.479.389,- (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100,00 % (kolom 7) (tercapai/tidak tercapai*).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp. 1.409.026,- (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar Rp. 1.409.026,- (kolom 3) terdapat peningkatan/penurunan *) sebesar Rp. 70.363,- (4,99 %). (persentase capaian capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu)
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran berhasil tercapai/tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut (siapkan PK eselon 3):

1. Program peningkatan kerjasama desa dengan sasaran kinerja program Meningkatnya kerjasama Desa, mempunyai Indikator kinerja Persentase kerjasama desa yang dilaksanakan, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah kerjasama antar Desa yang dilaksanakan dibandingkan dengan Jumlah kerjasama antar Desa yang akan dilaksanakan dikali 100. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $2/2 \times 100\% = 100,00\%$ dari target 2 kerjasama atau sebesar 50 %. (siapkan PK eselon 3)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
- b. Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
- c. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- d. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 18 November 2022 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
- b. Di beberapa kegiatan, terdapat rasionalisasi pagu anggaran, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan sehingga berimbas pada pada target dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan;
- c. Masih Banyak Desa Yang Belum Terbentuk Kerjasama Desa Sesuai Dengan Permendagri No 96 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
- d. Masih Belum Pahaminya Para Perangkat Desa Mengenai Tata Cara Kerjasama Desa Baik Kerjasama Antar Desa Maupun Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia dan Bappena RI. terkait penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;

- b. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan bidang teknis pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas/instansi sosial dan atau pemberdayaan masyarakat desa di Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Menyiapkan dukungan terhadap program dan kegiatan yang memiliki hubungan perencanaan dan penganggaran dalam bentuk dana pendampingan atau *cost sharing* serta penguatan/pengembangan program dalam APBD, sehingga pelaksanaan capaian *outcome* kegiatan berjalan maksimal;
- f. Melakukan optimalisasi sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level Pusat- Provinsi, Provinsi - Kabupaten, lintas sektor maupun lintas program/bidang, untuk memaksimalkan pelayanan dan penanganan masalah menjadi lebih baik efektifitas dan juga pemanfaatannya.

2. **Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat** dengan sasaran program Meningkatnya lembaga kemasyarakatan yang aktif, mempunyai Indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dan ditingkatkan dibandingkan dengan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif yang akan ditingkatkan dikali 100. Capaian indikator kinerja adalah $309/309 \times 100\% = 100,00 \%$ dari target 309 desa atau sebesar 100 %. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi/rendah/sama *) dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 100,00 %. (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
- b. Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
- c. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- d. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- e. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 18 November 2022 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
- b. Di beberapa kegiatan, terdapat rasionalisasi pagu anggaran, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan sehingga berimbas pada target dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan;
- c. Kurang aktifnya perangkat desa dalam membentuk Lembaga Adat Desa yang nantinya akan dibuat dalam satu Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, serta belum terbentuknya kader dasawisma desa, serta jaringan yang kurang memadai di desa.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia dan Bappena RI. terkait penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan bidang teknis pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas/instansi sosial dan atau pemberdayaan masyarakat desa di Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Menyiapkan dukungan terhadap program dan kegiatan yang memiliki hubungan perencanaan dan penganggaran dalam bentuk dana pendampingan atau *cost sharing* serta penguatan/pengembangan program dalam APBD, sehingga pelaksanaan capaian *outcome* kegiatan berjalan maksimal;
- f. Melakukan optimalisasi sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level Pusat- Provinsi, Provinsi - Kabupaten, lintas sektor maupun lintas program/bidang, untuk memaksimalkan pelayanan

dan penanganan masalah menjadi lebih baik efektifitas dan juga pemanfaatannya.

10. Kinerja sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum diukur dengan indikator Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	$[\{(Pembangunan\ jalan\ yang\ tersedia/Pembangunan\ jalan\ yang\ dibutuhkan) + (Jaringan\ Irigasi\ yang\ tersedia/jaringan\ irigasi\ yang\ dibutuhkan) + (Air\ baku\ yang\ tersedia/air\ baku\ yang\ dibutuhkan) + (talud\ yang\ tersedia/talud\ yang\ dibutuhkan)\} / 4 \times 100\%]$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 77,49% atau sebesar 77,49% dari target 100%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	67,43%	61,2%	100%	77,49	77,49%	100%	77,49%

Analisis Ketercapaian Sasaran Persentase adalah sebagai berikut:

- Tercapai 77,49% dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 77,49%
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran tidak berhasil tercapai. Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut

seharusnya dapat didukung dari program-program sebagai berikut:

1. **Program pengelolaan sumber daya air (SDA)** dengan sasaran kinerja program Meningkatnya luasan kawasan rawan bencana dan terdampak bencana yang terlindungi dari daya rusak air, Meningkatnya Ketersediaan Air Baku, Meningkatnya Layanan Irigasi dengan indikator, Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air, Persentase Penyediaan Air baku, Rasio Layanan Irigasi. Capaian pada tahun ini masing-masing adalah 3,4%, 0%, dan 63,8%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah

- a. Komitmen daerah dalam melaksanakan
- b. Ketersediaan anggaran
- c. SDM yang mumpuni
- d. Proses tender yang akuntabel
- e. Penyedia yang kompeten

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- c. Kurangnya anggaran
- d. Kuantitas dan kualitas SDM yang tidak terpenuhi
- e. Harga material yang fluktuatif
- f. Faktor cuaca dan iklim

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- c. Perencanaan strategis dan teknis harus lebih matang
- d. Pengadaan dan peningkatan kompetensi SDM

2. **Program penyelenggaraan jalan** dengan sasaran program proporsi panjang jaringan dalam kondisi mantap mempunyai Indikator Persentase jalan dalam kondisi mantap formula perhitungan indikator ini panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi panjang jalan keseluruhan dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah 91,67% dari target sebesar 92%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 94,64%

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah

- a. Komitmen daerah dalam melaksanakan
- b. Ketersediaan anggaran
- c. SDM yang mumpuni
- d. Proses tender yang akuntabel
- e. Penyedia yang kompeten

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kurangnya anggaran
- b. Kuantitas dan kualitas SDM yang tidak terpenuhi
- c. Harga material yang fluktuatif

d. Faktor cuaca dan iklim

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Perencanaan strategis dan teknis harus lebih matang
- b. Pengadaan dan peningkatan kompetensi SDM

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum [{(Pembangunan jalan yang tersedia/Pembangunan jalan yang dibutuhkan) + (Jaringan Irigasi yang tersedia/jaringan irigasi yang dibutuhkan) + (Air baku yang tersedia/air baku yang dibutuhkan) + (talud yang tersedia/talud yang dibutuhkan)} / 4 x 100%]	100%	77,49%	77,49%

11. Kinerja sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar diukur dengan indikator Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	(Persentase Realisasi Program A + B + C)/3*100%

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 10% atau sebesar 18,5% dari target 54%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program

pendukung sasaran Perangkat Daerah. Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	25%	0%	54%	10%	18,5%	54%	10%

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar adalah sebagai berikut:

- Tercapai 0 % (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 18,5% (kolom 7).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 0% (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 25% (kolom 3) terdapat peningkatan sebesar 18,5%.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran tidak tercapai. Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

- Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum** dengan sasaran kinerja program meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum mempunyai Indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak, formula perhitungan indikator ini adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dibagi jumlah rumah tangga yang memerlukan akses terhadap air minum layak. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 0%. Tidak ada capaian karena pada tahun 2022 baru dilaksanakan penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah

- Ketersediaan anggaran
- SDM yang mumpuni
- Proses tender yang akuntabel
- Penyedia yang kompeten

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kurangnya anggaran
- Kuantitas dan kualitas SDM yang tidak terpenuhi
- Harga material yang fluktuatif

j. Faktor cuaca dan iklim

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- e. Perencanaan strategis dan teknis harus lebih matang
- f. Pengadaan dan peningkatan kompetensi SDM

2. **Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah** dengan sasaran meningkatnya program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah mempunyai Indikator Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Formula perhitungan indikator ini adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dibagi jumlah rumah tangga memerlukan akses terhadap sanitasi layak dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(144/480) \times 100\% = 30\%$ dari target sebesar 20,8%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 0%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah

- a. Komitmen daerah dalam melaksanakan
- b. Ketersediaan anggaran
- c. SDM yang mumpuni
- d. Proses tender yang akuntabel
- e. Penyedia yang kompeten

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kurangnya anggaran
- b. Kuantitas dan kualitas SDM yang tidak terpenuhi
- c. Harga material yang fluktuatif
- d. Faktor cuaca dan iklim

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Perencanaan strategis dan teknis harus lebih matang
- b. Pengadaan dan peningkatan kompetensi SDM

3. **Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional** tidak dilaksanakan pada tahun 2022 namun akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan diawali dengan penyusunan Jakstrada Persampahan Provinsi. Tidak ada capaian pada tahun 2021 dan 2022.

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Ketersediaan infrastruktur Dasar (Persentase Realisasi Program A + B + C)/3*100%	54%	10%	18,5%

12. Kinerja sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan diukur dengan indikator Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	$(\Sigma \text{Infrastruktur Perhubungan yang tersedia} / \Sigma \text{Infrastruktur yang Dibutuhkan}) \times 100\%$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 113,12 % atau sebesar 81,27 % dari target 71,84 % Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	69,45 %	57,14 %	71,84 %	81,27 %	113,12 %	71,84 %	113,126 %

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Tercapai 81,27 %, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 113,12 % (tercapai).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 57,14 %, terhadap target tahun lalu sebesar 69,45 % terdapat peningkatan sebesar 55,98 %
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. **Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)** dengan sasaran kinerja program Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai Indikator kinerja Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah prasarana pemenuhan Infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan (llaj) terbangun (tahun n) dibagi Jumlah target pemenuhan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terbangun (4 tahun) x 100% Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(14.350/16.204) \times 100\% = 88,56\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 87,37% atau sebesar 101% .

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya mekanisme Bantuan Teknis (Bantek) dalam penganggaran di Kementerian Perhubungan, sehingga kebutuhan prioritas Pemerintah Provinsi dapat diakomodir melalui APBN walaupun kebutuhan tersebut bukan kewenangan kementerian.
- b. Ketersediaan beberapa jenis Fasilitas Perlengkapan jalan dalam e-katalog Nasional maupun sektoral sehingga mempermudah proses pengadaan barang dan jasa.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah namun kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan terutama Lampu Penerangan Jalan Umum sangat banyak.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Memaksimalkan mekanisme pendanaan melalui Bantuan Teknis (Bantek) Kementerian Perhubungan.
 - b. mendorong terbentuknya Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. **Program pengelolaan pelayaran** dengan sasaran program Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan mempunyai Indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Prasarana Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan Terbangun (tahun n) dibagi Jumlah Target Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan Terbangun (4 tahun) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(4.736/10.504) \times 100\% = 45,09\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar

77,78%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 sebesar 57,97% ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 58,33%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya hibah 2 Unit Dermaga Pelabuhan Rakyat (Dermaga Pulau Seliu dan Dermaga Pulau Minadanau) dari Pemerintah Kabupaten Belitung.
- b. Proses penyusunan dokumen pembangunan Pelabuhan telah dipedomani bersama oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun kementerian.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Pembebasan lahan / hibah lahan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi yang membutuhkan waktu yang lama.
- b. Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga alokasi penyusunan dokumen dan pembangunan fisik pelabuhan dibagi menjadi beberapa tahapan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Adanya komitmen bersama dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun kementerian terhadap percepatan pembangunan pelabuhan ,
- b. Menyusun skala prioritas pembangunan dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran.

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan (Σ Infrastruktur Perhubungan yang tersedia / Σ Infrastruktur yang Dibutuhkan) x 100%	71,84 %	81,27 %	113,12 %

13. Kinerja sasaran Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat diukur dengan indikator Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p> HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren </p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 93,69% atau sebesar 12.18 dari target 13,00 Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022(%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	12,32	12,17	13,00	12.18	93,69	12.45	93,69

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 12.18 ,dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 93,69% (tidak tercapai).

- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 12.17 ,terhadap target tahun lalu sebesar 12.32 terdapat peningkatan sebesar 0.01 poin
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD,sasaran tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. **Program pengelolaan pendidikan** dengan sasaran kinerja program Meningkatnya APK SMA, APK SMK, APK Pendidikan Khusus mempunyai Indikator kinerja APK SMA, APK SMK, APK Pendidikan Khusus. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah:
 - a. APK SMA ($30109/64751 \times 100\% = 46.5 \%$) dari target 42%
 - b. APK SMK ($24964/64751 \times 100\% = 38.6 \%$) dari target 36 %
 - c. APK PENDIDIKAN KHUSUS ($1265/2460 \times 100\% = 51.42 \%$) dari target 65%

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Dukungan anggaran APBD untuk peningkatan layanan akses pendidikan melalui pemberian beasiswa, penambahan ruang kelas baru, pembangunan USB (unit Sekolah Baru), Pengadaan sarana mobilitas , Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- b. Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan ke kabupaten/kota untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dll

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah cukup tinggi
- b. Angka Melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah masih rendah
- c. Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat terbatas
- d. Masih ada anak berkebutuhan khusus yang belum teridentifikasi
- e. Terbatasnya jumlah Satuan pendidikan khusus

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Mencegah siswa putus sekolah dengan meningkatkan fungsi pengawasan sekolah
- b. Secara bertahap pemenuhan sarana pendidikan seperti unit sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, pengadaan sarana mobilitas
- c. Secara bertahap pemenuhan guru dan tenaga kependidikan
- d. Memberikan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan ke kabupaten/kota seperti pemberian insentif kepada guru honor, bantuan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- e. Memberikan beasiswa kepada siswa yang ekonomi orang tuanya kurang mampu
- f. Bekerja sama dengan DUKCAPIL dan BPS untuk Pendataan penduduk yang berkebutuhan khusus
- g. Membangun Pusat Layanan Autis di setiap kabupaten/kota atau

menambah jumlah SLB di Kabupaten/Kota

14. Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan dengan indicator persentase sekolah terakreditasi A jumlah anggaran sebesar Rp. 510.386.526.577,- dapat direalisasikan mencapai 93,91% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 95,02%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.

Kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan diukur dengan indikator Persentase Sekolah Terakreditasi A. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah Terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah sekolah menengah atas/kejuruan /pendidikan khusus terakreditasi A}}{\Sigma \text{sekolah menengah atas/kejuruan/pendidikan khusus}}$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah **76,18%** atau sebesar 45.71 dari target 60. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

(tabel ini dapat di buat landscape)

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022(%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Sekolah Terakreditasi A	49,25%	46,76	60	45.71	76,18	60	76,18

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 45.71 ,dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 76,18% (tidak tercapai).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 46,76 ,terhadap target tahun lalu sebesar 49.25 terdapat penurunan sebesar 1.05 poin
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD,sasaran tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. **Program Pengelolaan Pendidikan** dengan sasaran kinerja program meningkatnya satuan pendidikan yang terakreditasi A. formula perhitungan indikator ini adalah perbandingan Jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi A dengan jumlah satuan pendidikan x 100 %. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah:
 - a. Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A ($44/72 \times 100\% = 61.1\%$)
 - b. Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A ($17/59 \times 100\% = 28.8 \%$)
 - c. Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A ($3/9 \times 100\% = 33.3\%$)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Dukungan anggaran APBD untuk pemenuhan sarana prasarana mutu sekolah seperti Laboratorium, perpustakaan dll
- b. Pemenuhan standar Guru dan Tenaga Kependidikan mulai dari kompetensi, kualifikasi, sertifikasi serta sebaran dan jumlah guru dan tenaga kependidikan

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Terjadinya perubahan dalam sistem penilaian akreditasi (yang pada awalnya difasilitasi oleh badan akreditasi nasional dan dinilai oleh asesor di daerah kemudian berubah menjadi sistem penilaian secara online yang dilakukan langsung oleh kementerian Pendidikan
- b. Belum terpenuhinya standar Guru dan Tenaga Kependidikan mulai dari kompetensi, kualifikasi, sertifikasi serta sebaran dan jumlah guru dan tenaga kependidikan
- c. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana mutu
- d. Belum optimalnya fungsi pengawasan sekolah

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Dukungan anggaran APBD untuk pemenuhan standar sarana prasarana mutu dan pemenuhan guru dan tenaga kependidikan
- b. Meningkatkan fungsi pengawasan sekolah

2. **Program pengembangan kurikulum** dengan sasaran kinerja program meningkatnya dokumen kurikulum yang terintegrasi dengan kurikulum nasional mempunyai Indikator kinerja persentase dokumen kurikulum yang terintegrasi dengan kurikulum nasional, formula perhitungan indikator ini adalah perbandingan jumlah dokumen kurikulum yang terintegrasi dengan kurikulum nasional dengan jumlah dokumen kurikulum x 100% . Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 100% atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Dukungan anggaran APBD
- b. Pengembangan kurikulum berbasis Science, Technology, Engineering, Arts dan Maths (STEAM/STEM) dan kearifan Lokal

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. belum semua sekolah mengintegrasikan kurikulum muatan lokal dengan kurikulum nasional

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan Jumlah sekolah yang mengintegrasikan kurikulum muatan lokal dengan kurikulum nasional

3. **Program pendidik dan tenaga kependidikan** dengan sasaran kinerja program meningkatnya guru yang mengajar sesuai dengan kompetensi mempunyai Indikator kinerja persentase guru yang mengajar sesuai dengan kompetensi formula perhitungan indikator ini adalah perbandingan Jumlah guru yang mengajar sesuai dengan kompetensi dengan jumlah guru x 100 %. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 80% dari target 80% atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Dukungan anggaran APBD
- b. Pemindehan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai dengan kompetensi

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

1. Belum terpenuhinya standar Guru dan Tenaga Kependidikan mulai dari kompetensi, kualifikasi, sertifikasi serta sebaran dan jumlah guru dan tenaga kependidikan

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Dukungan anggaran APBD
- b. Menganalisa kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Kompetensi

15. Kinerja sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Anak diukur dengan indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times Indeks K_j)$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 62,78 atau sebesar 91,65 persen dari target 68,50 persen Sumber dari hasil capaian indeks klaster pembentuk IPA menurut wilayah dari Kementerian PPA dan BPS. Data Tahun 2022 bersifat estimasi dikarenakan BPS RI belum meliris IPA tahun 2022. Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

(tabel ini dapat di buat landscape)

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022(%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68,10	59,99	68,50	62,78	91,65	68,50	Sama dengan kolom 7

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi tahun 2022 sebesar 62,78 , dengan demikian prosentase realisasi terhadap target hanya 91,65 %.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 59,99 terhadap target tahun lalu sebesar 68,10, terdapat peningkatan sebesar 3,56 persen.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran kinerja tahun 2022

belum menggambarkan hasil yang diharapkan berdasarkan target yang ditetapkan.

Realisasi capaian Indikator Persentase tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. Program pemenuhan hak anak (pha) dengan sasaran kinerja program meningkatnya SDM dalam pemenuhan partisipasi anak mempunyai Indikator kinerja persentase peningkatan SDM dalam pemenuhan partisipasi anak formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Anak yang diikutsertakan dalam kegiatan Forum anak dan HAN di bagi jumlah keseluruhan anak di kali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(2.165/481.382) \times 100\% = 0,45\%$ dari target 0,189. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 0,183 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Komitmen kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak anak terkait kesehatan dasar dan kesejahteraan anak,
- b. Terbentuknya forum anak di Kabupen/Kota mempermudah komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak,

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Tingginya angka perkawinan anak,
- b. Anggaran yang kurang memadai terkait dukungan sarana dan prasarana ramah anak,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai :

- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi.
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.
 - c. Meningkatkan kualitas Kabupaten dan Kota Layak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melibatkan empat stakeholder terkait yaitu Pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
2. **Program perlindungan khusus anak** dengan sasaran program Meningkatnya ketersediaan SDM perlindungan Anak (sasaran program) mempunyai Indikator Persentase SDM Perlindungan Anak formula perhitungan indikator ini adalah jumlah aktifis PATBM, aktifis LM perlindungan anak, personil UPTD PPA, Satgas PPA,dan lainnya dibagi jumlah seluruh anak dikali 100% dibanding dengan lalu . Capaian indikator kinerja tahun ini adalah

$(1.061/481.382) \times 100\% = 0,22\%$ dari target 0,30. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 0,21. %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Keterlibatan masyarakat melalui gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
- b. Memperkuat kelembagaan unit layanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Pekerja anak
- b. Anak terlantar
- c. Anak putus sekolah

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai yaitu :

- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi.
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

16. Kinerja sasaran Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	$r = (Pt/P0)^{(1/t)-1}$ <p> r = Laju Pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah penduduk tahun t $P0$ = Jumlah penduduk tahun awal T = Periode antarwaktu antara tahun dasar dan tahun t </p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 118,85% atau sebesar 1,75% (sumber data : dkb 2022) dari target 2,08% Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022(%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,08	1,84	2,08	1,75	123,08	2,08	Sama dengan kolom 7

Analisis Ketercapaian Sasaran Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk adalah sebagai berikut:

- d. Tercapai 1,750 % (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 123,08 % (kolom 7) (tercapai/tidak tercapai*).
- e. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 1,84 % (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 2,08 (kolom 3) terdapat peningkatan/penurunan *) sebesar 0,24 % (persentase capaian capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu)
- f. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran berhasil tercapai/tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut (siapkan PK eselon 3):

1. **Program pendaftaran penduduk** dengan sasaran kinerja program meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP dan KIA) mempunyai Indikator kinerja Persentase cakupan masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk berupa Kartu Keluarga, KTP dan KIA, formula perhitungan indikator ini adalah Persentase kepemilikan Dok Dafduk = Persentase Kepemilikan KK + KTP-el + KIA dan dibagi 3 dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $((98,53+100,74+63,13)/3) \times 100\% = 87,47\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 86,33% atau sebesar 101,32%. (siapkan PK eselon 3)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Jaringan komunikasi dan data untuk pelayanan tersedia dengan baik,

- b. Tersedianya anggaran untuk fasilitasi pelayanan,
- c. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak baik secara klasikal, baliho, flyer, maupun media social,
- d. Pelaksanaan pelayanan jemput bola lebih aktif dari tahun sebelumnya karena penularan covid-19 semakin melandai.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- k. Perangkat keras berupa personal komputer atau laptop sudah usang, sudah tidak support untuk sistem dengan versi terbaru saat ini,
- l. Anggaran fasilitasi jemput bola pelayanan terpadu tidak memadai,
- m. Kesadaran masyarakat masih rendah dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- g. Penganggaran yang cukup untuk menggantikan perangkat keras di Disdukcapil Kabupaten/Kota,
- h. Meningkatkan anggaran untuk memfasilitasi Disdukcapil kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan terpadu,
- i. Melaksanakan secara lebih massif sosialisasi kepada masyarakat.

2. **Program pencatatan sipil** dengan sasaran program Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan) mempunyai Indikator Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil berupa anak usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran, masyarakat yang memiliki Akta Kematian, dan Akta Perkawinan formula perhitungan indikator ini adalah Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil = $\frac{\text{Persentase Kepemilikan Akta Kematian} + \text{Akta Kelahiran} + \text{Akte Perkawinan}}{3}$ jenis dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $((99,66+98,54+63,0)/3) \times 100\% = 87,07\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 75,83%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 116,99% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Jaringan komunikasi dan data untuk pelayanan tersedia dengan baik,
- b. Tersedianya anggaran untuk fasilitasi pelayanan terpadu,
- c. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan kerjasama dengan pemangku kepentingan seperti Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- d. Perangkat keras berupa personal komputer atau laptop sudah usang, sudah tidak support untuk sistem dengan versi terbaru saat ini,

- e. Anggaran fasilitasi jemput bola dan pelayanan terpadu tidak memadai,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- d. Penganggaran yang cukup untuk menggantikan perangkat keras di Disdukcapil Kabupaten/Kota,
- e. Meningkatkan anggaran untuk memfasilitasi Disdukcapil kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan terpadu,
- f. Melaksanakan secara lebih massif sosialisasi kepada masyarakat.

3. **Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan**

dengan sasaran program meningkatnya Jumlah PKS dengan Perangkat Daerah dan Lembaga lain mempunyai Indikator Persentase Peningkatan Jumlah PD dan Lembaga lain yang mengadakan Perjanjian kerjasama (PKS) formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PD Provinsi dan sektor lain yang memanfaatkan data dan dokumen kependudukan dibagi 27 dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $((12+5)/27 \times 100\% = 54,84\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 54,84%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 119,34% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Perangkat Daerah yang memerlukan data kependudukan untuk digunakan dalam perencanaan dan pelaporan.
- b. Lembaga lain dalam hal ini adalah mitra usaha yang bersedia memberikan insentif kepada anak-anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak untuk bertransaksi.
- c. Nomor Indentitas Kependudukan sudah menjadi nomor identitas tunggal sebagai basis untuk mendapatkan layanan public.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Perangkat Daerah merasa manfaat diperoleh masih sangat sedikit dibandingkan dengan data balikan yang akan diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri,
- b. Standar Internasional (ISO 27001) yang diwajibkan sebagai persyaratan dalam PKS Pemanfaatan Data,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Memohon ke pusat untuk mengubah kebijakan terkait dengan syarat Standar Internasional (ISO 27001) dalam PKS yang cukup memberatkan instansi pengguna,
- b. Adanya pertukaran data yang lebih maksimal sehingga dapat berimbang dalam manfaat.

4. **Program pengelolaan profil kependudukan** dengan sasaran program meningkatnya penyediaan penyajian database kependudukan tingkat provinsi mempunyai Indikator Persentase penyediaan penyajian database kependudukan tingkat provinsi, formula perhitungan indikator ini adalah jenis dokumen penyajian data dibagi target penyajian data setiap tahun dikalikan 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(2/2) \times 100\% = 100\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini sama dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 100% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Tersedianya anggaran yang cukup,
- b. Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang direlease per semester oleh Kementerian Dalam Negeri RI secara rutin diterima selalu tepat waktu,
- c. Memiliki SDM aparatur yang bekinerja baik

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Jika Kementerian Dalam Negeri RI dalam hal ini Ditjen Dukcapil terlambat dalam merelease DKB,
- b. Terjadi kendala dalam hal pencetakan/penjilidan buku profil dan agregat,
- c. Terbatasnya SDM yang ada di Bidang Dukcapil.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Tetap tersediannya anggaran yang cukup,
- b. Mengajukan tambahan SDM sesuai dengan kebutuhan dalam peta jabatan.
- c. Dst

5. **Program pengendalian penduduk** dengan sasaran program Meningkatnya kabupaten/kota yang memiliki dokumen pengendalian penduduk. mempunyai Indikator persentase kabupaten/kota yang memiliki dokumen pengendalian penduduk. formula perhitungan indikator ini adalah jumlah kabupaten kota yang dibina dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(7/7) \times 100\% = 100\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 71,42% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan secara sinergi
- b. Koordinasi yang baik dengan seluruh mitra kerja program pengendalian penduduk tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

6. **Program pembinaan keluarga berencana (KB)** dengan sasaran program meningkatnya pembinaan keluarga berencana kepada kabupaten/kota mempunyai Indikator persentase kabupaten/kota yang dibina formula perhitungan indikator ini adalah jumlah kabupaten/kota yang dibina dibagi jumlah kabupaten/kota dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(7/7) \times 100\% = 100\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini sama dengan Tahun 2021 yang sebesar 100 % (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan anggaran dalam pembinaan program keluarga berencana di kabupaten kota
- b. Dukungan mitra kerja dan jejaring yang kuat dalam pembinaan program keluarga berencana di kabupaten/kota

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Menciptakan program/inovasi dalam upaya pembinaan program pembinaan keluarga berencana
- b. Memperkuat jejaring kemitraan program keluarga berencana tingkat pusat dan provinsi dalam upaya pembinaan ke kabupaten/kota
- c. Dst

7. **Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)** dengan sasaran program meningkatnya desa/kelurahan yang menjadi kampung KB mempunyai Indikator persentase kampung KB formula perhitungan indikator ini adalah jumlah kampung kb yang dibentuk dibagi jumlah kampung KB dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(118/158) \times 100\% = 74,68\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 85%%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini sama dengan Tahun 2021 yang sebesar 74,68 % (capaian tahun lalu).

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

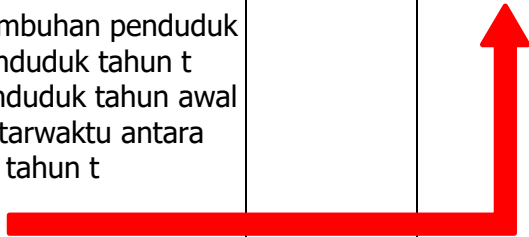
- a. Dukungan anggaran pembentukan kampung KB masih kurang
- b. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola kampung KB
- c. dst

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. peningkatan anggaran pembinaan kampung keluarga berkualitas
- b. peningkatan kapasitas pengelola kampung keluarga berkualitas
- c. Dst

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	<p>Laju Pertumbuhan Penduduk</p> $r = (Pt/P0)^{(1/t)-1}$ <p>r = Laju Pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah penduduk tahun t P0 = Jumlah penduduk tahun awal T = Periode antarwaktu antara tahun dasar dan tahun t</p>	2,08	1,75	118,85%



17. Kinerja sasaran Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$I_{(IPG)} = \{EDEP_{(IPG)}\} / 50$ <p>dan</p> $EDEP_{(IPG)} = \frac{P_f}{X_f} + \frac{P_m}{X_m} \cdot 100$ <p>Pf : proporsi penduduk perempuan Pm : proporsi penduduk laki-laki Xf : proporsi keterwakilan perempuan di parlemen Xm : proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen</p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 89,37 atau sebesar 99,85 % dari target 89,50 . Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. Data Tahun 2022 bersifat estimasi

dikarenakan BPS RI belum merilis IPG tahun 2022. Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

(tabel ini dapat di buat landscape)

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,25	89,11	89,50	89,37	99,85	89,50	Sama dengan kolom 7

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender adalah sebagai berikut:

- Realisasi tahun 2022 tercapai 89,37, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target hanya sebesar 99,85 % .
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 89,11, terhadap target tahun lalu sebesar 99,84 % terdapat peningkatan sebesar 0,01 % .
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran kinerja tahun 2022 belum menggambarkan hasil yang diharapkan berdasarkan target yang ditetapkan.

Realisasi capaian Indikator Persentase tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan** dengan sasaran kinerja program meningkatnya kegiatan yang responsif gender mempunyai Indikator kinerja persentase perangkat daerah yang responsif gender formula perhitungan indikator ini adalah jumlah PD yang responsif gender/jumlah PD keseluruhan x 100%, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(27/27) \times 100\% = 100\%$ dari target 91 % . Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 84,37 %

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengarusutamaan Dalam Pembangunan Daerah.
- Peraturan Gubernur tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
- Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

- Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
- d. Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
 - e. Peraturan Gubernur tentang Penelenggaraan Sekolah Untuk Perempuan Mandiri dan Terlatih.
 - f. SK Gubernur tentang Pembentukan Forum Klink Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Daerah Provinsi.
 - g. SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Pelaksanaan PPRG belum terinternalisasi dalam proses pelaksanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- b. Masih rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Legislatif.
- c. Masih rendahnya Partisipasi perempuan/jumlah perempuan sebagai pejabat publik, mulai dari tingkat desa sampai dengan Provinsi.
- d. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.
- e. Masih rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan.
- f. Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri tentang/stake holder tentang Pemberdayaan perempuan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi.
- b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Ke Masyarakatan Kewenangan Provinsi.
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

2. **Program perlindungan perempuan** dengan sasaran program Meningkatnya Ketersediaan Perlindungan Perempuan mempunyai Indikator Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Perempuan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah aktifis Satgas PPA dibagi Jumlah Total Perempuan dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(158/718.556) \times 100\% = 0,022\%$ dari target sebesar 0,04 %. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 0,020 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
- b. Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan dan

- Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi.
- c. Surat Edaran Gubernur tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemerintah Provinsi.
 - d. Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Provinsi.
 - e. Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Pererintah Provinsi tidak komitmen atas pelaksanaan kebijakan dan program
- b. Sumber Daya SDM, dana dan sarana prasarana kurang memadai

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi.

3. **Program peningkatan kualitas keluarga** dengan sasaran program Meningkatkan kualitas keluarga melalui industri rumahan (IR), mempunyai Indikator Persentase IR yang dibina formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah industri rumahan dibagi Jumlah perempuan keseluruhan dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(4588/718.556) \times 100\% = 0,638\%$ dari target sebesar 0,74 %. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 0,634 % .

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sekolah Untuk Perempuan Menjadi Mandiri dan Terlatih.
- b. Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Cerdas, Inovatif ,Kreatif , Aktif dan Responsif.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Sumber Daya SDM, dana dan sarana prasarana kurang memadai.
- b. Kurangnya dukungan PD, dunia usaha dan masyarakat.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.

- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
 - c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
4. **Program pengelolaan sistem data gender dan anak** dengan sasaran program Meningkatnya OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak, mempunyai Indikator Persentase capaian PD yang menyediakan data pilah gender dan anak formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PD yang menyediakan data pilah gender dan anak dibagi Jumlah PD keseluruhandikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(27/27) \times 100\% = 100\%$ dari target sebesar 90,62 %. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 84,37 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Pererintah Provinsi komitmen atas pelaksanaan kebijakan dan program
- b. Dukungan Sumber Daya SDM, dana dan sarana prasarana memadai

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Tidak seluruh perangkat daerah menyediakan Data terpilah gender dan anak.
- b. Data terpilah gender dan anak tidak dijadikan dasar penyusunan kebijakan daerah.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi.
- b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

18. Sasaran meningkatnya kualitas pemuda dengan indicator kinerja indeks pembangunan pemuda jumlah anggaran sebesar Rp. 2.966.601.551,- dapat direalisasikan mencapai 91,19% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 99,38 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.

Kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pemuda diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Pemuda. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	$\text{Indeks D} = \frac{(\text{Score } x_1 + \dots + \text{score } X_n)}{N} \times 10$ <p>Indeks D = Indeks Domain N = Banyaknya indikator masing2 domain</p> $\text{IPP} = \frac{\text{Indeks D}_1 + \dots + \text{Indeks D}_5}{5}$ <p>IPP = Indeks Pembangunan Pemuda</p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah indikator Indeks Pembangunan Pemuda atau sebesar 53,67 dari target 54,50 Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

(tabel ini dapat di buat landscape)

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Pembangunan Pemuda	54	53,67	54,50	53,67	53,67	54,50	Sama dengan kolom 7

Analisis Ketercapaian Sasaran indikator Indeks Pembangunan Pemuda adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 53,67 % (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 53,67 % (kolom 7) (tidak tercapai).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 53,67% (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 53,67% (kolom 3) belum terdapat peningkatan/penurunan.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut (siapkan PK eselon 3):

1. **Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan** dengan sasaran kinerja program Meningkatkan kapasitas daya saing pemuda mempunyai Indikator kinerja Persentase pemuda yang memiliki keterampilan formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah pemuda yang memiliki keterampilan}) / (\text{Jumlah seluruh pemuda}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $21.030/342.733 \times 100\% = 6,14\%$ dari target 6,2 atau sebesar 62%%. (siapkan PK eselon 3)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Meningkatnya pemuda yang memiliki keterampilan dan berwirausaha,
- b. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam berorganisasi,

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Belum adanya pengembangan organisasi kepemudaan dan melakukan koordinasi ke instansi yang terkait dalam mendukung nilai IPP,
- b. Domain pendidikan, gender dan diskriminasi, partisipasi dan kepemimpinan masih tertinggal dari capaian nasional,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan pengembangan organisasi kepemudaan dan melakukan koordinasi ke instansi yang terkait dalam mendukung nilai IPP,
- b. Meningkatkan lapangan dan kesempatan kerja bagi pemuda,

2. **Program pengembangan kapasitas kepramukaan** dengan sasaran program Meningkatkan kapasitas kepramukaan mempunyai Indikator Persentase organisasi pramuka yang memiliki kapasitas formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Organisasi Pramuka yang aktif}) / (\text{Jumlah seluruh anggota pramuka}) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $14.900/342733 \times 100\% = 4,35\%$ dari target sebesar 2,01 %. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 2,24 % (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kepramukaan,
- b. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam berorganisasi,

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Belum adanya pengembangan organisasi kepemudaan dan melakukan koordinasi ke instansi yang terkait dalam mendukung nilai IPP,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Pengenalan dan Peningkatan Karakter pemuda Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan,

19. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya pembangunan olahraga dengan indicator kinerja indeks pembangunan olahraga jumlah anggaran sebesar Rp. 12.090.097.060,- dapat direalisasikan mencapai 92,52% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 12.223%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.

Kinerja sasaran Meningkatkan Pembangunan Olah Raga diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Olah Raga. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pembangunan Olah Raga	Indeks Pembangunan Olah Raga	$\text{Indeks SDI} = \frac{\text{Indeks (D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D7 + D8 + D9)}}{9}$ <p>Keterangan: D1= Dimensi SDI pertama, D2= Dimensi SDI kedua, dst</p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 0,3736 atau sebesar 0,374 dari target 0,35 Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

(tabel ini dapat di buat landscape)

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Pembangunan Olah Raga	0,3	0,5	0,35	0,3736	0,374	0,35	Sama dengan kolom 7

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut (siapkan PK eselon 3):

- Program pengembangan daya saing keolahragaan** dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Daya Saing Keolahragaan mempunyai Indikator kinerja Indeks Daya Saing Olahraga formula perhitungan indikator ini adalah

SDI= indeks (D1+...+D9)/9. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $SDI = 0,102+0,633+0,604+0,244+0,182+0,418+0,505+0,656+0,019/9 = 0,3736$ dari target 0,35 atau sebesar 0,374%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- c. Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka dan sarana prasarana olahraga,
- d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga,

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih kurangnya SDM keolahragaan yang memiliki sertifikasi,
- b. Sumber daya manusia (atlet) yang belum berkualitas (*low skill*),

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan pelatihan sertifikasi tenaga keolahragaan untuk peningkatan SDM keolahragaan,
- b. Mendukung pelaksanaan event nasional olahraga,

20. Kinerja sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Sosial diukur dengan indikator Indeks Persentase PMKS Sejahtera. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Sejahtera	$PMKS\ Sejahtera = \frac{\text{Jumlah PMKS yang dibantu}}{\Sigma PMKS}$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 99,75 % atau sebesar 66,83 % dari target 67,00 %. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase PMKS Sejahtera	65,92 %	99,95 %	67,00 %	66,83 %	99,75 %	67,00 %	99,75 %

Analisis Ketercapaian Sasaran Persentase PMKS Sejahtera adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 66,83 % (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 66,83 % (kolom 7) (tercapai/tidak tercapai*).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 99,95 % (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 65,92 % (kolom 3) terdapat peningkatan/penurunan *) sebesar 0,20 %. (persentase capaian capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu)
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran berhasil tercapai/tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut (siapkan PK eselon 3):

1. **Program perlindungan dan jaminan sosial** dengan sasaran kinerja program Meningkatnya PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial mempunyai Indikator kinerja Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dibandingkan dengan jumlah PMKS yang akan mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dikali 100. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $80.012/80.006 \times 100\% = 100,01\%$ dari target 80.006 orang atau sebesar 50 %. (siapkan PK eselon 3)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
- b. Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
- c. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- d. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- e. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- f. Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 18 November 2022 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
- b. Di beberapa kegiatan, terdapat rasionalisasi pagu anggaran, baik

karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan sehingga berimbas pada target dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan;

- c. Pada Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi:
 - a) Realisasi Bantuan UEP-KUBE hanya 2 kelompok (12 orang) dari target 30 KUBE;
 - b) Realisasi Bantuan UEP Penyandang Disabilitas 13 orang dari target 15 orang Penerima Bansos UEP PD;
 - c) Bansos UEP-KUBE tidak teralisasi dikarenakan tidak ada Pengajuan Propoal sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 sebagai batas pengajuan proposal bantuan sosial.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapa adalah :

- a. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia dan Bappena RI. terkait penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan bidang teknis pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas/instansi sosial dan atau pemberdayaan masyarakat desa di Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Menyiapkan dukungan terhadap program dan kegiatan yang memiliki hubungan perencanaan dan penganggaran dalam bentuk dana pendampingan atau *cost sharing* serta penguatan/pengembangan program dalam APBD, sehingga pelaksanaan capaian *outcome* kegiatan berjalan maksimal;
- f. Melakukan optimalisasi sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level Pusat- Provinsi, Provinsi - Kabupaten, lintas sektor maupun lintas program/bidang, untuk memaksimalkan pelayanan dan penanganan masalah menjadi lebih baik efektifitas dan juga pemanfaatannya.

2. **Program Pemberdayaan Sosial** dengan sasaran kinerja program Meningkatnya PMKS/PSKS yang terberdayakan, mempunyai Indikator kinerja Persentase PPKS/PSKS yang terberdayakan, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PSKS yg terberdayakan dibandingkan dengan Jumlah PSKS yang ada dikali 100. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $570/778 \times 100\% = 73,26\%$ dari target 778 orang atau sebesar 50 %. (siapkan PK eselon 3)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
- b. Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
- c. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- d. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- e. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- f. Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 18 November 2022 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
- b. Di beberapa kegiatan, terdapat rasionalisasi pagu anggaran, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan sehingga berimbas pada pada target dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan;
- c. Pada Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi :
Pada Tahun 2022, Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada individu pada Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi tidak dicairkan sebesar Rp. 380.114.400,- dengan rincian Tali Asih Pekerja Sosial Masyarakat dan Premi BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Sosial Masyarakat. Selain itu pada Sub Kegiatan Peningkatan Porensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi, Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada individu berupa Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan tidak dicairkan sebesar Rp. 142.000.000,-.

Belanja Bantuan Sosial (tali asih) yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud diatas tidak dicairkan karena berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjelaskan bahwa penggunaan kode akun Bantuan Sosial diperuntukan kepada masyarakat miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mengajukan Bantuan Sosial tersebut menggunakan Proposal. oleh karena itu, menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, maka pembayaran Tali Asih bagi PSM dan TKSK serta Iuran BPJS bagi PSM yang di anggarkan melalui kode akun Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada individu tidak dilanjutkan pembayarannya sehingga mengakibatkan realisasi anggaran tidak tercapai 100%.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia dan Bappena RI. terkait penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan bidang teknis pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas/instansi sosial dan atau pemberdayaan masyarakat desa di Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Menyiapkan dukungan terhadap program dan kegiatan yang memiliki hubungan perencanaan dan penganggaran dalam bentuk dana pendampingan atau *cost sharing* serta penguatan/pengembangan program dalam APBD, sehingga pelaksanaan capaian *outcome* kegiatan berjalan maksimal;
- f. Melakukan optimalisasi sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level Pusat- Provinsi, Provinsi - Kabupaten, lintas sektor maupun lintas program/bidang, untuk memaksimalkan pelayanan dan penanganan masalah menjadi lebih baik efektifitas dan juga pemanfaatannya.

21. Kinerja sasaran Meningkatkan Kesehatan Masyarakat diukur dengan indikator Angka Kesehatan Masyarakat Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut :

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	$Y = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{\Sigma X}$ <p>X₁ = Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat X₂ = Persentase tenaga Kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi X₃ = Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat X₄ = Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)</p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kesehatan Masyarakat adalah 98,28% atau sebesar 113,99% dari target 86,22%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Angka Kesehatan Masyarakat	83,21%	89,75%	86,22	98,28	113,99	86,22	113,99

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Tercapai 98,28%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 113,99%, dengan demikian target tercapai.

- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 89,75%, terhadap target tahun lalu sebesar 83,21% terdapat peningkatan sebesar 8,53%
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran berhasil tercapai

Faktor pendukung tercapainya target kinerja sasaran ini melalui upaya pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi secara intensif terkait program kesehatan masyarakat program pencegahan dan pengendalian penyakit dan program pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, koordinasi dan monitoring terkait penerapan standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, melakukan advokasi dan bimbingan teknis kepada pelaku UMKM bidang usaha obat tradisional serta melakukan survey lapangan terkait izin usaha kecil obat tradisional (UKOT), melakukan pembinaan dan evaluasi terkait pemenuhan Izin pedagang besar farmasi (PBF) dan penyalur alat kesehatan (PAK), pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di fasilitas pelayanan kesehatan, koordinasi lintas sektor yang baik terkait kebijakan gerakan masyarakat sehat (GERMAS) di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota, menjalin Kemitraan dan bekerjasama dengan BUMN, Perusahaan Swasta, ormas, organisasi profesi, dan tokoh Agama dalam pelaksanaan Germas di masyarakat serta adanya dukungan dana baik dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dana Alokasi Khusus dari Kementerian Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non fisik serta dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. **Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat** dengan sasaran kinerja program meningkatnya pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat mempunyai Indikator kinerja Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang merupakan indikator komposit dari persentase peningkatan kesehatan masyarakat, Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya, Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial, Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan lintas kabupaten/kota, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem informasi

kesehatan (SIK), dan Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan. Formula perhitungan indikator ini adalah (Rata-rata nilai Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya, Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial, Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan lintas kabupaten/kota, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem informasi kesehatan (SIK), dan Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan, dengan formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah capaian 7 indikator kinerja/7 X 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(87,56+101,40+87,91+100+100+100+75)/7 \times 100\% = 93,12\%$ dari target 88,61% atau sebesar 105,09%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi secara intensif terkait program kesehatan masyarakat, program pencegahan dan pengendalian penyakit dan program pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- b. Dukungan Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non fisik serta dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat
- c. Koordinasi dan monitoring secara intensif terkait penerapan standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- d. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi madya
 - b. Masih kurang optimalnya kapasitas teknis tenaga kesehatan
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
- a. Mengadvokasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait akreditasi madya fasilitas pelayanan kesehatan
 - b. Meningkatkan kapasitas teknis tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop dan seminar teknis

2. **Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan**

dengan sasaran kinerja program Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan mempunyai Indikator kinerja persentase tenaga Kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi, dengan formulasi perhitungan indikator ini adalah Jumlah

tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi pada tahun berjalan dibagi jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(660/660) \times 100\% = 100\%$ dari target sebesar 85%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 81%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di fasilitas pelayanan kesehatan
- b. Pemberian bantuan tugas belajar kepada dokter / dokter gigi spesialis dan sub spesialis, tenaga kesehatan lainnya yang bertugas di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun di Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- c. Dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih terbatasnya anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi teknis tenaga kesehatan

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Mengirimkan peserta tugas belajar dan PPDS / PPDGS bagi tenaga kesehatan untuk mengikuti pendidikan melalui kegiatan Tugas Belajar menggunakan dana Kementerian Kesehatan RI

3. **Program ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman** dengan sasaran kinerja program Meningkatkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang memenuhi syarat mempunyai Indikator kinerja Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat, dengan formulasi perhitungan indikator ini adalah Jumlah sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat dibagi total sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dalam satu tahun dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(14/14) \times 100\% = 100\%$ dari target sebesar 87%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 87,34%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Melakukan advokasi dan bimbingan teknis kepada pelaku UMKM bidang usaha obat tradisional serta melakukan survey lapangan terkait izin usaha kecil obat tradisional (UKOT)

- b. Melakukan pembinaan dan evaluasi terkait pemenuhan Izin pedagang besar farmasi (PBF) dan penyalur alat kesehatan (PAK)
- c. Dukungan Dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah provinsi Kep. Bangka Belitung, dana Alokasi Khusus dari Kementerian Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik serta dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- 1. Masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya masuk dalam kategori Industri Rumah Tangga Pangan
- 2. Adanya kendala pada aplikasi OSS untuk perpanjangan izin usaha bagi pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK)

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai :

- 1. Melakukan sosialisasi pada pelaku usaha terkait perizinan dan persyaratan kategori industri rumah tangga pangan
- 2. Melakukan koordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab terkait perubahan pada aplikasi perizinan usaha

4. **Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan** dengan sasaran kinerja program Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan mempunyai Indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah kabupaten kota yang memiliki kebijakan GERMAS dalam satu tahun dibagi jumlah kabupaten/kota yang ada X100%. Pada tahun 2022 diselenggarakan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(7/7) \times 100\% = 100\%$ dari target 87% atau sebesar 114,94%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Koordinasi lintas sektor yang baik terkait kebijakan gerakan masyarakat sehat (GERMAS) di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota
- b. Menjalin Kemitraan dan bekerjasama dengan BUMN, Perusahaan Swasta, ormas, organisasi profesi, dan tokoh Agama dalam pelaksanaan Germas di masyarakat
- c. Dukungan Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non fisik serta dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat
- d. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih kurang optimalnya pembudayaan Germas dan PHBS di

masyarakat

- b. Masih kurang optimalnya inovasi pemberdayaan Germas di masyarakat

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan pembudayaan Germas dan PHBS kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. Mengembangkan inovasi dalam pemberdayaan Germas di masyarakat

22. RB Kinerja sasaran Meningkatkan tata kelola pemerintahan diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	$Y = \text{LHE Reformasi Briokrasi Kemen PAN-RB}$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah **68,87***) atau sebesar **102,03** dari target **67,50** Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

(tabel ini dapat di buat landscape)

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022(%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	70	68,87	67,50	68,87	102,03	67,50	102,03

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan tata kelola pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 68,87% (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 102,03 % (kolom 7) (tercapai/tidak tercapai*).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 68,87 % (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 70 (kolom 3)

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut (siapkan PK eselon 3):

1. **Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah** dengan sasaran kinerja program pertama yaitu Meningkatnya sinkronisasi dan keselarasan antar dokumen perencanaan mempunyai Indikator kinerja persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah program RKPD dibagi jumlah program yang sama dalam RPJMD pada tahun rencana x 100 % formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah program RKPD dibagi jumlah program yang sama dalam RPJMD pada tahun rencana x 100 % dan Jumlah program Renstra dibagi jumlah program yang sama dalam RPJMD pada tahun rencana x 100 %. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(434/434) \times 100\% = 100\%$ dan $(434/434) \times 100\% = 100\%$ dengan rerata dari parameter tersebut adalah 100% dari target sebesar 100%. Untuk sasaran kinerja program kedua yaitu Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah perhitungan indikator ini adalah Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti dibagi total jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah x 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 92,59%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan dari eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2023 memberikan semangat bagi peserta Musrenbang untuk selalu berpartisipasi dalam penyampaian usulan-usulan yang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Dengan dukungan SDM perangkat daerah serta mitra Bappeda yang berkualitas membantu mewujudkan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas.
- c. Dukungan anggaran untuk perangkat daerah.
- d. Dukungan sarana prasarana serta ketersediaan perangkat yang memudahkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbasis teknologi informasi.
- e. Dukungan dari *stakeholder* Kementerian/Lembaga/Instansi vertikal dalam pelaksanaan forum FGD bersama mitra PD.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kondisi Pandemi COVID-19 dan dinamika kebijakan baru dari Pemerintah Pusat (Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, perubahan nomenklatur program dan kegiatan) yang belum terakomodir dalam

dokumen perencanaan awal sehingga perlu dilakukan berbagai upaya penyesuaian untuk menjawab dinamika yang terjadi.

- b. Adanya pandemi COVID-19 disertai pembatasan aktivitas kegiatan, sehingga frekuensi kegiatan lewat tatap muka/langsung berkurang;
- c. Seringnya terjadi pergantian pejabat/personal pelaksana yang membidangi perencanaan sehingga perlu penyesuaian dan waktu pembelajaran bagi penggantinya.
- d. Pelaksanaan forum Musrenbang RKPD Tahun 2023 belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan masih adanya pembatasan berkumpul dalam jumlah besar sehingga dirasakan masih kurang efektif atau penyampaian tidak dapat diterima secara penuh dari narasumber yang hadir.
- e. Banyak usulan-usulan dari perangkat daerah, kelompok masyarakat, stakeholder lainnya dari tahun sebelumnya yang belum diakomodir pemerintah provinsi sehingga ada keengganan untuk hadir dalam forum musrenbang.
- f. Revisi anggaran/*Refocussing* (Pengurangan dan Penambahan) secara bertahap, sehingga beberapa agenda yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dan terdapat tambahan target output; sehingga beberapa agenda yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dan terdapat tambahan target output.
- g. Pelaksanaan kegiatan pendukung program yaitu beralihnya bentuk penyelenggaraan rapat desk teknis dari semula luring menjadi berbentuk daring, sehingga guna lebih mengoptimalkan hasilnya maka dilakukan upaya penambahan frekuensi rapat teknis daring dengan pendekatan pemecahan tematik sub sektor dan didukung matrik alat bantu yang lebih rinci agar penyelenggaraan rapat lebih fokus, terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan.
- h. Program/kegiatan yang sudah didesain tidak mempunyai sumbangan yang nyata terhadap pencapaian Indikator atau pencapaian indikator banyak dipengaruhi oleh hal-hal diluar program/kegiatan yang sudah disiapkan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Merumuskan kebijakan pada RPJMD secara lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.
- c. Memantapkan mekanisme dalam proses perencanaan pembangunan sehingga menghasilkan output yang berkualitas.
- d. Melakukan monitoring dalam pelaksanaan program/kegiatan terhadap target indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan stimulus dan inovasi untuk pencapaian program kegiatan yang terdampak dari kondisi covid 19.

2. **Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah** dengan sasaran kinerja program pertama Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan indikator Persentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PD mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang memperoleh skor perencanaan kinerja > 25 pada penilaian Lakip PD dibagi total jumlah PD mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan x 100%, sasaran kinerja program kedua Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dengan Indikator Persentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam perhitungan indikator ini adalah Jumlah PD mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang memperoleh skor perencanaan kinerja > 25 pada penilaian Lakip PD dibagi total jumlah PD mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam x 100, sasaran kinerja program ketiga Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Indikator Persentase kesesuaian dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia perhitungan indikator ini adalah Jumlah PD mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memperoleh skor perencanaan kinerja > 25 pada penilaian Lakip PD dibagi total jumlah PD mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia x 100, sasaran kinerja program keempat Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah perhitungan indikator ini adalah Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti dibagi total jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah x 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Dukungan anggaran dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Adanya komitmen dari pimpinan dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah agar lebih baik.
- d. Perbaikan kualitas data dan informasi rutin dilakukan.
- e. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya kebijakan PPKM.
- b. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium jabatan fungsional baru.
- c. Masih adanya kurang pemahaman dan ketidakpedulian ASN atas substantif dokumen perencanaan yang berkualitas
- d. Administrasi penganggaran APBD-P yang agak terlambat mempengaruhi kepastian penjadwalan kegiatan sehingga mundur dari jadwal semula.

3. **Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah** dengan sasaran program yaitu Meningkatnya kualitas hasil penelitian prioritas pembangunan daerah dan sistem inovasi daerah dengan 2 (dua) indikator yaitu 1.) Persentase hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah hasil penelitian pengembangan yang dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan dibagi total jumlah penelitian pengembangan yang dilakukan dalam tahun x 100%, 2) Persentase hasil inovasi daerah yang dikembangkan dengan formula perhitungan adalah Jumlah inovasi yang dikembangkan dibagi total inovasi yang diusulkan x 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampumengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Dukungan anggaran dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Adanya komitmen dari pimpinan dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah agar lebih baik.
- d. Perbaikan kualitas data dan informasi rutin dilakukan.
- e. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi.
- f. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri RI dalam memfasilitasi penginputan dan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) serta koordinasi yang baik juga dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didalam penginputan data didalam aplikasi IPKD.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya kebijakan PPKM.

- b. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium jabatan fungsional baru.
- c. Administrasi penganggaran APBD-P yang agak terlambat mempengaruhi kepastian penjadwalan kegiatan sehingga mundur dari jadwal semula.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan kompetensi pimpinan dan seluruh perencana dan peneliti dalam menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas.

4. **Program pengelolaan keuangan daerah** dengan sasaran kinerja program sebagai berikut :

1. Sasaran Terlaksananya penyusunan dan penetapan APBD/APBD Perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai Indikator kinerja Persentase ketepatan waktu penetapan APBD dan Perubahan APBD formula perhitungan indikator ini adalah $N = \text{Nilai rata-rata bobot unsur} \times \text{Konstanta}$, dengan Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(100+100/200) \times 100\% = 100\%$ dari target 100 % atau tercapai sebesar 100%;
2. Sasaran Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel mempunyai Indikator kinerja Persentase Kepatuhan penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan formula perhitungan indikator ini adalah $N = (\text{Jumlah LKPJ PD yang sesuai dengan SAP} / \text{Jumlah LKPJ seluruh PD}) \times 100\%$, dengan Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(27/27) \times 100\% = 100\%$ dari target 100 % atau tercapai sebesar 100%;
3. Sasaran terlaksananya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten Kota mempunyai Indikator kinerja Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat WTP terhadap pengelolaan keuangan daerah formula perhitungan indikator ini adalah $N = \text{Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat WTP terhadap pengelolaan keuangan daerah}$ dengan Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 7 Kabupaten/kota dari target 5 kabupaten/kota atau tercapai sebesar 140%;
4. Sasaran terlaksananya pengendalian kas, belanja daerah dan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya mempunyai Indikator kinerja persentase realisasi penyediaan dana belanja APBD formula perhitungan indikator ini adalah $N = (\text{Realisasi target belanja APBD} / \text{target belanja APBD}) \times 100\%$ dengan Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 81.26 % dari target 93.91

% atau tercapai sebesar 86.53 %;

5. Sasaran terlaksananya pengendalian kas, belanja daerah dan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya mempunyai Indikator kinerja persentase realisasi penyediaan dana belanja APBD formula perhitungan indikator ini adalah $N = (\text{Realisasi target belanja APBD} / \text{target belanja APBD}) \times 100\%$ dengan Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 93.91 % dari target 81.25 % atau tercapai sebesar 86.53 %;

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Penyusunan APBD dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga penetapan APBD sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
- b. Penyusunan LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disampaikan tepat waktu, sehingga dapat diaudit oleh BPK sesuai jadwal yang ditentukan
- c. Pembinaan pengelolaan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan baik sehingga seluruh Kabupaten/Kota mendapatkan predikat WTP atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Evaluasi terhadap Perubahan APBD oleh Kementerian Dalam Negeri tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tidak maksimal pelaksanaannya.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melaksanakan peningkatan koordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri agar pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat berjalan dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga capaian target Program dan Kegiatan dapat dicapai sesuai harapan
5. **Program pengelolaan barang milik daerah** dengan sasaran kinerja program Terlaksananya peningkatan pengelolaan barang milik daerah mempunyai Indikator kinerja Nilai Kepatuhan Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan formula perhitungan indikator ini adalah $N = \text{Nilai Kepatuhan Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan} / (\text{Patuh} = 2, \text{Tidak patuh} = 1)$ dengan Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 2 dari target 2 atau sebesar 100%

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Sumber daya penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat

kompetensinya sehingga penata usahaan Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan;

- b. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disampaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Penghapusan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat dilaksanakan pemenuhan syarat administratif terhadap proses tersebut

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi kepada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penatausahaan Barang Milik Daerah,
- b. Menindak lanjuti hasil pemeriksaan / audit BPK RI terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan dengan berkoordinasi dan berkonsolidasi pada semua perangkat daerah.

6. **Program pengelolaan pendapatan daerah** dengan dengan sasaran kinerja program Meningkatnya pendapatan daerah mempunyai Indikator kinerja persentase peningkatan pertumbuhan PAD formula perhitungan indikator ini adalah $N = ((\text{Realisasi PAD th } N - \text{Realisasi PAD th } N(-1)) / \text{Realisasi PAD th } N(-1)) \times 100\%$ dengan Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $((1.068.919.358.907,43 - 813.809.911.776,58) / 813.809.911.776,58) \times 100\% = 19.33\%$ dari target 7.6 % atau sebesar 254.34% .

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mulai membaik setelah pandemi covid 19, sehingga kegiatan perekonomian masyarakat mulai dapat berjalan normal;
- b. Pelaksanaan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotoran dalam rangka peringatan HUT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-22 mendapat atensi yang cukup baik dari masyarakat

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Penetapan target Retribusi daerah tidak sesuai dengan kondisi potensi yang ada, sehingga pencapaian target tidak sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Kurangnya dukungan anggaran terhadap Program dan Kegiatan Teknis pada masing-masing OPD yang mengelola retribusi daerah dalam rangka pencapaian target retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) disesuaikan dengan

- potensi yang ada;
- b. Mengalokasikan dana pengelolaan retribusi pada Organisasi Perangkat Daerah Teknis agar dapat melaksanakan pengelolaan retribusi daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan
7. **Program penyelenggaraan pengawasan** dengan dengan sasaran kinerja program :
- a. Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pengawasan internal kinerja Pemerintah Daerah yang mempunyai Indikator kinerja Persentase Pelaksanaan kegiatan pengawasan kinerja Internal Pemerintah Daerah formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan kinerja dibagi dengan jumlah target Perangkat Daerah dikalikan 100. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(34/34) \times 100\% = 100\%$ dari target 100% (target di PK);
 - b. Meningkatnya Perangkat Daerah yang memperoleh tingkat capaian laporan kinerja BAIK yang mempunyai Indikator kinerja Persentase tingkat capaian perangkat daerah dengan laporan kinerja BAIK, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh laporan kinerja baik dibagi dengan jumlah target Perangkat Daerah dikali 100, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(34/34) \times 100\% = 100\%$ dari target 100% (target di PK).
8. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi** dengan dengan sasaran kinerja program :
- a. Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mempunyai Indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP yang dijadikan sampel dibagi dengan jumlah target Perangkat Daerah dikalikan 100, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(10/10) \times 100\% = 100\%$ dari target 100% (target di PK);

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
 Dengan Penggunaan Aplikasi SI MENTARI (Sistem Infomasi Monitoring Resiko Terintegrasi).

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Struktur anggaran pengawasan yang minim;
- b. Anggaran peningkatan kompetensi SDM pengawas.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Untuk Penambahan anggaran Pengawasan Sesuai dengan Surat dari Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan persentase anggaran pengawasan sebasasr 0,90% bagi Provinsi dengan PAD s.d Rp 4.000.000.000.000,00 sebagai Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah;
- b. Mengalokasikan anggaran pelatihan yang berkelanjutan bagi Auditor dan PPUPD minimal 120 JP per tahun.

9. **Program kepegawaian daerah** (siapkan PK eselon 3 diisi dengan sasaran, Indikator, target dan realisasi Perjanjian Kinerja eselon 3 yang mendukung Program ini, dan bisa lebih dari satu PK eselon 3)

- dengan sasaran kinerja program Terpenuhinya pegawai sesuai kebutuhan dan formasi mempunyai Indikator kinerja Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi dan kepangkatan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah pegawai ASN yang ditempatkan melalui mutasi, promosi dan kepangkatan dibagi jumlah pegawai ASN yang diusulkan melalui mutasi, promosi dan dikelola usulan kenaikan pangkat dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(5.662/5.890) \times 100\% = 96,13\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program/formula perhitungan di dalam PK) dari target 5.478 (target di PK) atau sebesar 93% (realisasi dibagi target di kali 100) (siapkan PK eselon 3)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Proses kenaikan pangkat lebih mudah dan cepat menggunakan aplikasi SiKepang (Sistem Informasi Kenaikan Pangkat)
- sasaran kinerja program Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN mempunyai Indikator kinerja Persentase ASN yang memiliki kinerja dan disiplin baik formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah ASN yang memiliki nilai SKP minimal baik dikurang jumlah ASN yang mendapat hukuman disiplin) dibagi jumlah ASN dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\{(5.890-7)/5.890\} \times 100\% = 99,88\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program/formula perhitungan di dalam PK) dari target 5.879 (target di PK) atau sebesar 99,82% (realisasi dibagi target di kali 100) (siapkan PK eselon 3)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Meningkatnya disiplin pegawai dengan diterapkannya absensi finger print dan absensi mobile
- b. Berkurangnya pegawai yang mendapat hukuman disiplin
- c. Pembinaan disiplin pegawai melalui inspeksi mendadak (sidak)

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Rendahnya kesadaran pegawai dalam meningkatkan kedisiplinan
- b. Kurangnya komitmen atasan dan pimpinan dalam menerapkan disiplin pegawai

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Sosialisasi penerapan disiplin ke Perangkat Daerah, termasuk UPT dan cabdin
- b. Penerbitan Surat Edaran tentang penegakan hukuman disiplin

- sasaran kinerja program Terpenuhinya pegawai sesuai kebutuhan dan formasi mempunyai Indikator kinerja Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan, informasi dan peningkatan kapasitas pegawai formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah pegawai ASN yang ditempatkan melalui pengadaan, informasi dan peningkatan kapasitas pegawai dibagi jumlah pegawai Pemprov dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(5.780/5.890) \times 100\% = 98,13\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program/formula perhitungan di dalam PK) dari target 5.772 (target di PK) atau sebesar 98% (realisasi dibagi target di kali 100) (siapkan PK eselon 3)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Tersedianya sistem pengelolaan data kepegawaian secara digital
- b. Tersedianya sistem pengukuran melalui aplikasi PRIMADONA

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kesadaran pegawai terhadap pengelolaan (updating) data kepegawaian pribadi
- b. Belum tersedianya UPT Asement Center sebagai wadah untuk mengukur kompetensi yang menangani secara khusus

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Pembentukan UPT Asement Center Kerjasama penggunaan aplikasi berbagi pakai pengelolaan data pribadi pegawai dengan BKD Provinsi Jawa Timur

10. **Program pengembangan sumber daya manusia** dengan dengan sasaran kinerja program Meningkatnya kompetensi ASN mempunyai Indikator kinerja Persentase ASN yang meningkat kompetensinya formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah ASN yang berkompeten dibagi Jumlah ASN dikali 100% Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(5.065/5.890) \times 100\% = 85,99\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program/formula perhitungan di dalam PK) dari target 4.888 (target di PK) atau sebesar 83% realisasi dibagi target di kali 100)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Tersedianya berbagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai (diklat, seminar, workshop, bimtek) secara daring
- b. Kerjasama dengan lembaga pengembangan kompetensi teknis (Kemkominfo, BNPB)

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Rendahnya kesadaran pegawai mengikuti pengembangan kompetensi 20JP
- b. Terbatasnya jumlah pendidikan dan pelatihan secara luring

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan jumlah pendidikan dan pelatihan teknis, manajerial dan fungsional bagi pegawai
- b. Menerbitkan Surat Edaran tentang peningkatan pengembangan kompetensi pegawai

11. **Program penataan organisasi** dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

- dengan dengan sasaran kinerja program Meningkatkan Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi mempunyai Indikator kinerja Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi yang disusun formula perhitungan indikator ini adalah Kebijakan Penataan Organisasi yang disusun/ Kebijakan penataan organisasi yang diusulkan x 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 80% dari target PK 80% atau sebesar 100% tercapai.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya kebijakan nasional terkait penyederhanaan birokrasi, mendorong daerah melakukan persepatan proses penataan kelembagaan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Minimnya anggaran di kelembagaan mengakibatkan sosialisasi dan pelaksanaan penyederhanaan Reformasi Birokrasi tidak maksimal sehingga Perangkat Daerah maupun ASN banyak yang tidak paham tentang penyederhanaan birokrasi.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai :

- a. Mendorong Perangkat Daerah untuk aktif melakukan koordinasi mengenai kelembagaan.

- dengan dengan sasaran kinerja program Meningkatkan Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi mempunyai Indikator kinerja Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja yang disusun formula perhitungan indikator ini adalah Kebijakan Daerah dibidang RB dan Akuntabilitas Kinerja yang disusun/ Kebijakan Daerah dibidang RB dan Akuntabilitas Kinerja yang diusulkan x 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 80% dari target PK 80% atau sebesar 100% tercapai.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- b. Adanya SAKIP RB Award mampu meningkatkan Komitmen Pimpinan.
- c. Adanya pembangunan aplikasi Sistem Monitoring pelaksanaan RB Terpadu (Si Molek RB)
- d. Meningkatkan komitmen dan koordinasi antar leading sector 8 area perubahan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Komitmen Pimpinan yang belum optimal;
- b. Tim RB Instansi Belum memahami peran dan fungsinya dalam pelaksanaan RB;
- c. Pelaksanaan RB yang masih bersifat dokumentatif;
- d. Mentalitas Silo yang masih tinggi;
- e. Masih adanya resistensi terhadap perubahan;
- f. Dan monitoring pelaksanaan yang belum dilaksanakan secara berkala.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan koordinasi, peran dan fungsi tim RB Instansi.
 - b. Meningkatkan komponen penilaian SAKIP RB Award sehingga dapat menunjukkan kualitas kinerja perangkat Daerah;
 - c. Mengembangkan aplikasi Si Molek RB agar dapat mengakomodir dan memantau pelaksanaan RB Tematik yang baru dicanangkan sehingga mampu memberi dampak nyata kepada masyarakat;
- dengan dengan sasaran kinerja program Meningkatkan Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi mempunyai Indikator kinerja Persentase Usulan Kebijakan Tatalaksana yang disusun formula perhitungan indikator ini adalah Kebijakan Daerah dibidang Tatalaksana yang disusun/ Kebijakan Daerah dibidang Tatalaksana yang diusulkan x 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 80% dari target PK 80% atau sebesar 100% tercapai.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Bagian Tatalaksana
- a. Kegiatan merupakan kegiatan yang Rutin dilaksanakan tiap tahun,
- b. Terjalannya kerjasama yang baik antar bagian bagian di Biro,
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Kegiatan sudah memadai.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Bagian Tatalaksana
- a. Sarana koneksi jaringan internet yang kurang stabil,
- b. Belum terintegrasinya beberapa aplikasi sistem dalam upaya pencapaian program kegiatan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Bagian Tatalaksana
- a. Meningkatkan lagi Koordinasi dengan Bagian bagian di Biro,
- b. Memaksimalkan penggunaan aplikasi sistem penunjang kinerja,
- c. Membangun Kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya di Indonesia dalam membangun sistem kerja dan program kegiatan yang efektif dan efisien.

12. **Program Kesejahteraan Rakyat** dengan sasaran kinerja program Kesejahteraan Rakyat mempunyai Indikator kinerja Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Usulan Kebijakan} : \text{Jumlah Rekomendasi}) \times 100\%$ Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(50.306.320.904/55.312.135.573) \times 100\% = 90,95\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program/formula perhitungan di dalam PK) dari target 70% (target di PK) atau sebesar 90,95%(realisasi dibagi target di kali 100) Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
- Perencanaan yang optimal,
 - Soliditas Tim Kerja,
13. **Program Fasilitasi dan koordinasi hukum** dengan sasaran kinerja program Persentase usulan kebijakan daerah di bidang hukum mempunyai Indikator kinerja Persentase usulan kebijakan daerah dibidang hukum yang tersusun formula perhitungan indikator ini adalah $\text{Jumlah usulan kebijakan daerah yang disusun} / \text{Jumlah rumusan kebijakan daerah yang diusulkan} \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 1331 dari target 845 (target di PK) atau sebesar 157,5%
Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
- Komitmen
 - Pelayanan Prima
 - Kompeten
 - Profesionalisme
 - Kerjasama
- Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:
- Sarana Prasarana
 - Kurangnya SDM
14. **Program perekonomian dan pembangunan** dengan sasaran kinerja program perekonomian dan pembangunan adalah Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Indikator kinerja Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusun} / \text{Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan}) \times 100\%$, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(14.350/16.204) \times 100\% = 88,56\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program/formula perhitungan di dalam PK) dari target 75 %(target di PK) atau sebesar 100 % (realisasi dibagi target di kali 100).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program dan kegiatan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
- b. SDM yang berkualitas.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Alokasi anggaran belum sepenuhnya mendukung program dan kegiatan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
- b. Terbatasnya ketersediaan SDM yang berkualitas

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Mengusulkan kembali alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung tupoksi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
- b. Mengusulkan penambahan SDM yang berkualitas

15. **Program kebijakan administrasi pembangunan** dengan sasaran kinerja program kebijakan administrasi pembangunan adalah Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan mempunyai Indikator kinerja Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan yang tersusun formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusun} / \text{Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(14.350/16.204) \times 100\% = 88,56\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program/formula perhitungan di dalam PK) dari target 75 % (target di PK) atau sebesar 100 % (realisasi dibagi target di kali 100).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program dan kegiatan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
- b. SDM yang berkualitas.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Alokasi anggaran belum sepenuhnya mendukung program dan kegiatan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
- b. Terbatasnya ketersediaan SDM yang berkualitas

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Mengusulkan kembali alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung tupoksi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

- b. Mengusulkan penambahan SDM yang berkualitas
16. **Program pengelolaan informasi dan komunikasi** publik dengan dengan sasaran kinerja Program Meningkatkan layanan publikasi, informasi dan komunikasi publik mempunyai Indikator kinerja Persentase Layanan informasi yang dipublikasikan untuk masyarakat formula perhitungan indikator ini adalah (Informasi yang dipublikasikan/Keseluruhan jumlah informasi)x 100% Capaian kinerja untuk indikator ini adalah dari target 100% atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Ketersediaan dan peran media serta saluran-saluran komunikasi diantaranya berupa media cetak/surat kabar, media elektronik (TV dan Radio) dan media baru (website dan Media sosial) yang membantu dalam menyebarkan sekaligus menerima informasi dan pesan-pesan baik dari dan kepada internal pemerintah maupun dari dan kepada masyarakat luas.
- b. Tersedianya anggaran untuk pengelolaan informasi dan komunikasi publik meskipun dengan jumlah yang masih terbatas tetapi masih mampu mendukung berjalannya program pengelolaan informasi dan komunikasi public dengan baik.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Dengan teknologi digital yang terus berkembang maka dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM/talenta digital.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Keberhasilan Diskominfo Prov. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan informasi dan komunikasi publik dapat dipengaruhi oleh adanya dukungan hubungan yang baik dengan instansi pemerintah lainya dan masyarakat, untuk mewujudkan hubungan yang baik tersebut diperlukan adanya penyelenggaraan kegiatan Bersama, pengembangan Kerjasama, komunikasi dua arah dan meningkatkan kolaborasi pelaksanaan program tsb.

17. **Program pengelolaan aplikasi informatika** Dengan dengan sasaran kinerja program Meningkatkan penerapan e-Government untuk Layanan Pemerintah dan publik mempunyai Indikator kinerja Persentase penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung formula perhitungan indikator ini adalah (jumlah layanan yang terintegrasi/keseluruhan layanan)x 100%, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 100% atau sebesar 100% Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. **Optimalisasi Data center sebagai Implementasi dari kebijakan pemerintah dalam upaya mewujudkan digitalisasi**

pemerintahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,

- b. Pengembangan aplikasi dipemerintahan untuk mempermudah integrasi data dan efisien dari sisi anggaran untuk operasional maupun pemeliharannya.
- c. Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait aplikasi yang dikembangkan yang dilaksanakan secara efektif dan intensif.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Implementasi kebijakan internal belum optimal hal ini terkendala pada arsitektur dan peta rencana SPBE belum tersusun sehingga sistem elektronik pada perangkat daerah belum terintegrasi baik aplikasi maupun data.
- b. Sistem penganggaran dan perencanaan kebutuhan aplikasi belum dikelola dengan baik, masih sektoral.
- c. Teknologi Informasi dan Komunikasi berkembang sangat pesat.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan Kerjasama, koordinasi dan keterpaduan dalam pengembangan dan pembangunan aplikasi SPBE yang didasarkan pada peta proses bisnis antar PD dan Pemerintah Daerah lainnya,
- b. Dibutuhkan dukungan dari Instansi Pembina yaitu Kementerian Kominfo, komitmen pimpinan tertinggi daerah dan para pemangku kepentingan terhadap penyediaan sarana/prasarana, peremajaan aset TIK sesuai perkembangan teknologi dan peningkatan jaringan infrastruktur internet.

18. **Program penyelenggaraan statistik sektoral** Dengan dengan sasaran kinerja program Meningkatkan layanan penyediaan data dan statistik mempunyai Indikator kinerja Persentase layanan penyediaan Data dan informasi. formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Data dan informasi yang dikelola} / \text{jumlah data dan informasi yang tersedia}) \times 100\%$ Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 96,30% dari target 100% atau sebesar 96,30%

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan dari OPD dalam penyampaian data,
- b. Dukungan Badan Pusat Statistik dalam memberi pembinaan, bimbingan dan fasilitasi,

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Anggaran yang belum memadai,
- b. Kompetensi SDM yang masih terbatas,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Perlunya peningkatan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Teknis Statistik Sektoral yang berkaitan dengan Penerapan Proses Bisnis Kegiatan Statistik untuk menambah pengetahuan Pengolah dan Pengumpul Data OPD mengenai Rekomendasi dan Metadata Statistik Sektoral.

19. **Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi** Dengan dengan sasaran kinerja program penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi mempunyai Indikator kinerja Persentase Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE, formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah layanan keamanan informasi/kesuluruhan ayanan}) \times 100\%$, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 80,00% dari target 85% atau sebesar 94,12% Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kelembagaan sudah cukup optimal dan sesuai,
- b. Dukungan lembaga pengampu (BSSN) dalam memberi pembinaan, bimbingan dan fasilitasi,
- c. Semangat ASN dalam mengembangkan diri dan berkontribusi dalam bidang yang baru dikembangkan cukup membantu.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Anggaran yang belum memadai,
- b. Banyak kebijakan turunan yang harus dibuat,
- c. Jumlah SDM ASN yang belum optimal dalam menjalankan kegiatan,
- d. Kompetensi ASN yang masih terbatas.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Membuat kebijakan-kebijakan teknis dan operasional,
- b. Menambah anggaran kegiatan dalam mendukung peran bidang dalam melakukan tugas pokok fungsi,
- c. Meningkatkan terus Kompetensi ASN.

20. **Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa** dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Kebijakan Daerah dibidang Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai Indikator kinerja Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun formula perhitungan indikator ini adalah $\text{Jumlah realisasi Usulan Kebijakan yang menjadi Kebijakan} / \text{Jumlah target Usulan Kebijakan yang menjadi Kebijakan} \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(100/50) \times 100\% = 100\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program/formula perhitungan di dalam

PK) dari target 50% (target di PK) atau sebesar 100 % (realisasi dibagi target di kali 100)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan. (cth.)
- b. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. (cth.)
- c. Dukungan Pimpinan
- d. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun APBN. (cth.)
- e. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi. (cth.)
- f. Peningkatan Kompetensi Pelaku Pengadaan barang jasa

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya kebijakan PPKM, aturan yang berubah, tidak update dan aturan yang tumpang tindih.
- b. Kurangnya kompetensi SDM
- c. Tidak konsisiten dalam manajemen waktu untuk sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- d. Kebijakan kepegawaian menunggu pembagian pegawai yang sesuai kebutuhan

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Peningkatan anggaran
- b. Peningkatan kompetensi SDM
- c. Peningkatan Koordinasi antar Biro di Sekretariat daerah

21. **Program Pembinaan Perpustakaan** Dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Layanan Perpustakaan Dan Gemar Membaca Masyarakat. Mempunyai Indikator kinerja :

- Persentasi Perpustakaan Yang di Bina.

Formula Perhitungan Indikator Ini Adalah Jumlah Yang Dibina Dibagi Jumlah Perpustakaan Di Babel X 100%.

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(1.200/3.500) \times 100\% = 34,3\%$ dari target 34 % .

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan dan pelestarian perpustakaan,
- b. Masih terdapat wilayah-wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membutuhkan layanan perpustakaan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Belum tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Kompetensi Pengelola Perpustakaan yang masih terbatas,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan Kualitas Layanan Perpustakaan Dan Gemar Membaca Masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan sekolah
- c. Meningkatkan minat dan budaya masyarakat dengan layanan perpustakaan yang berbasis teknologi
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perpustakaan

22. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Mempunyai Indikator kinerja

- Persentase Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno.

Formula perhitungan indikator ini adalah Realisasi Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Per Tahun Dibagi Total Target Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno X 100 %. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(2/2) \times 100\% = 100\%$ dari target 50 %

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya regulasi Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang koleksi pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno,
- b. Masih banyaknya sebaran naskah kuno dan koleksi Nasional di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Belum adanya kesadaran masyarakat pada arti pentingnya Dokumen naskah kuno dan koleksi Nasional untuk di simpan.
- b. Minimnya SDM DKPUS tentang penanganan tentang Naskah kuno dan Koleksi Nasional

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk pengembangan Naskah kuno dan koleksi Nasional perpustakaan,
- b. Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat pada arti pentingnya menjaga dan mengoleksi Naskah kuno dan koleksi Nasional.
- c. Menelusuri naskah kuno dan koleksi Nasional kedaerah daerah wilayah Provinsi Kepulauan Bangka dan wilayah lainnya.

23. **Program Pengelolaan Arsip** Dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar Baku Kearsipan Mempunyai Indikator kinerja :

- Persentase Lembaga Yang Menerapkan Kearsipan Secara Baku.

Formula perhitungan indikator ini adalah

Total Nilai Tahun (n) Di Bagi Total Nilai Standar Tahun (n-1) X 100 %
Dengan Kreteria :

0 - 50 = Buruk

51 - 60 = Kurang

61 - 75 = Cukup

76 - 90 = Baik

91 - 100 = Sangat Baik.

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah Baik dari target 76

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya kesempatan arsiparis untuk bermitra kerja dengan jabatan fungsional lainnya.,
- b. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik sangat diperlukan transparansi dan akuntabilitas kinerja dari aparatur pemerintah yang ditandai dengan ketersediaan arsip yang autentik dan reliable.
- c. Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan dan pelestarian arsip.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih terdapat arsip-arsip yang belum dikuasai dan tertata, baik secara manual maupun elektronik.
- b. Belum tersedianya gedung depo penyimpanan arsip statis dan arsip vital,
- c. Kualitas SDM dan Pelayanan Kearsipan yang masih rendah.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kearsipan kepada masyarakat
- e. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap kearsipan

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan,
- b. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi.

24. **Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip** Dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Layanan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip. Mempunyai Indikator kinerja

- Persentase Arsip Yang di Lindungi dan Di Selamatkan.

Formula perhitungan indikator ini adalah Arsip Yang Di Lindungi Dan Di Selamatkan Pada Tahun (n) Di Bagi Target Arsip Yang Di Lindungi Dan Di Selamatkan Pada Tahun (n) X 100%.

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(1/33) \times 100\% = 3\%$ dari target 4 %

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan regulasi yang telah menetapkan kearsipan sebagai urusan wajib pemerintah daerah serta peraturan yang terkait urusan kearsipan yang telah secara spesifik menetapkan tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan bidang kearsipan daerah..,
- b. Semakin meningkatnya jasa kearsipan dalam usaha pembenahan dan penyimpanan arsip pada instansi pemerintah,

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih rendahnya kesadaran tentang arsip Vital ;
- b. Masih rendahnya kesadaran tentang arsip asset;
- c. Masih rendahnya kesadaran tentang arsip terjaga ;
- d. Masih rendahnya penataan arsip yang sesuai dengan standar kearsipan ;
- e. Masih rendahnya pengetahuan SDM tentang pengelolaan arsip dinamis di 7 (tujuh) Kab/Kota Prov. Kep. Babel

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan
- b. Pembinaan Kearsipan lingkup Daerah
- c. Pengembangan dan sertifikasi SDM Kearsipan
- d. Pelayanan Pendidikan dan pelatihan kearsipan
- e. Pengawasan dan akreditasi kearsipan
- f. Pengolahan arsip Daerah
- g. Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan
- h. Pengelolaan data dan informasi kearsipan

23. Kinerja sasaran Meningkatkan Kebebasan Sipil diukur dengan indikator Nilai Kebebasan Sipil. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kebebasan Sipil	Nilai Kebebasan Sipil	C = Pada pengolahan data diawali dengan penentuan bobot untuk masing-masing aspek, variabel, dan indikator. Proses ini telah dilakukan untuk

		<p>penghitungan IDI tahun 2009 dengan menggunakan analytical hierarchy procedure (AHP). AHP merupakan pendekatan metodologis untuk menentukan prioritas di antara sejumlah kriteria yang kompleks dengan mengandalkan penilaian ahli. Dalam proses AHP untuk bobot IDI, para juri yang diminta penilaian sebanyak 14 orang dari berbagai kalangan. Proses pengolahan data hasil review surat kabar dan review dokumen hingga menghasilkan indeks indikator diawali dengan penghitungan data kuantitatif menjadi skor data kuantitatif. Selanjutnya, skor data kuantitatif dipadukan dengan data kualitatif hasil FGD dan WM sehingga menghasilkan indeks indikator. Skor indikator ini yang akan dihitung untuk indeks variabel, selanjutnya indeks variabel untuk menghitung indeks aspek, dan pada akhirnya dihitung sebagai indeks demokrasi di sebuah provinsi. Untuk IDI nasional, diperoleh melalui IDI seluruh provinsi yang dihitung dengan penimbang.</p>
--	--	--

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 68,80 atau sebesar 78,24% dari target 87,94. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022(%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nilai Kebebasan Sipil	87,82	79,12	87,94	68,80	78,24%	87,94	Sama dengan kolom 7

Analisis Ketercapaian Sasaran Nilai Kebebasan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 68,80 % (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 78,24 % (kolom 7) (tidak tercapai*).

Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 79,12 % (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 87,82 (kolom 3) terdapat penurunan *) sebesar 10,32 (persentase capaian capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu)

- b. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran tidak tercapai
Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut (siapkan PK eselon 3):

1. **Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan** dengan sasaran kinerja program Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap consensus kebangsaan mempunyai Indikator kinerja Jumlah kasus penistaan terhadap symbol symbol negara formula perhitungan indikator ini adalah jumlah kasus penistaan terhadap symbol - symbol negara, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah target 0 atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Terlaksananya kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, Bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
- b. Terkoordinasinya di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, Bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
- c. Terlaksananya monitoring dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, Bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah: -

2. **Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan** dengan sasaran kinerja program meningkatnya kinerja Ormas mempunyai Indikator kinerja ORMAS DENGAN SKOR 180 formulanya adalah nilai INDEKS KINERJA ORMAS) Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah
- Terlaksananya kebijakan di bidang pendaftaran ormas
 - Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.

24. Kinerja sasaran Meningkatkan Hak-hak politik diukur dengan indikator Nilai Hak-hak Politik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Hak-hak politik	Nilai Hak-hak Politik	<p>C = C = Pada pengolahan data diawali dengan penentuan bobot untuk masing-masing aspek, variabel, dan indikator. Proses ini telah dilakukan untuk penghitungan IDI tahun 2009 dengan menggunakan analytical hierarchy procedure (AHP). AHP merupakan pendekatan metodologis untuk menentukan prioritas di antara sejumlah kriteria yang kompleks dengan mengandalkan penilaian ahli. Dalam proses AHP untuk bobot IDI, para juri yang diminta penilaian sebanyak 14 orang dari berbagai kalangan.</p> <p>Proses pengolahan data hasil review surat kabar dan review dokumen hingga menghasilkan indeks indikator diawali dengan penghitungan data kuantitatif menjadi skor data kuantitatif. Selanjutnya, skor data kuantitatif dipadukan dengan data kualitatif hasil FGD dan WM sehingga menghasilkan indeks indikator. Skor indikator ini yang akan dihitung untuk indeks variabel, selanjutnya indeks variabel untuk menghitung indeks aspek, dan pada akhirnya dihitung sebagai indeks demokrasi di sebuah provinsi. Untuk IDI nasional, diperoleh melalui IDI seluruh provinsi yang dihitung dengan penimbang.</p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 77,80 atau sebesar **95,05%** dari target **81,85**.
 umber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nilai Hak-hak Politik	81,85	66,2	81,85	77.80	95,05	81,85	95,05

Analisis Ketercapaian Sasaran Nilai Hak-hak Politik adalah sebagai berikut:

- Tercapai 77,80 % (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 95,05 % (kolom 7) (tidak tercapai*).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 66,2 % (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 81,85 (kolom 3) terdapat peningkatan *) sebesar 11, 6%.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran berhasil tercapai/tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan sasaran kinerja program persentase ketidakhadiran Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada serta Pemantauan situasi politik mempunyai Indikator kinerja formula perhitungan indikator ini adalah 76 % dari target 76% atau sebesar 100 persen.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Meningkatnya kesadaran partisipasi politik masyarakat.
- Rekomendasi pengembangan berdemokrasi

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah: -

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai meningkatkan upaya Pendidikan politik di masyarakat.

25. Kinerja sasaran Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi diukur dengan indikator Nilai Kelembagaan Demokrasi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	Nilai Kelembagaan Demokrasi	<p>C = C = Pada pengolahan data diawali dengan penentuan bobot untuk masing-masing aspek, variabel, dan indikator. Proses ini telah dilakukan untuk penghitungan IDI tahun 2009 dengan menggunakan analytical hierarchy procedure (AHP). AHP merupakan pendekatan metodologis untuk menentukan prioritas di antara sejumlah kriteria yang kompleks dengan mengandalkan penilaian ahli. Dalam proses AHP untuk bobot IDI, para juri yang diminta penilaian sebanyak 14 orang dari berbagai kalangan.</p> <p>Proses pengolahan data hasil review surat kabar dan review dokumen hingga menghasilkan indeks indikator diawali dengan penghitungan data kuantitatif menjadi skor data kuantitatif. Selanjutnya, skor data kuantitatif dipadukan dengan data kualitatif hasil FGD dan WM sehingga menghasilkan indeks indikator. Skor indikator ini yang akan dihitung untuk indeks variabel, selanjutnya indeks variabel untuk menghitung indeks aspek, dan pada akhirnya dihitung sebagai indeks demokrasi di sebuah provinsi. Untuk IDI nasional, diperoleh melalui IDI seluruh provinsi yang dihitung dengan penimbang.</p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 74,93 atau sebesar 93,03% dari target 80,54. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022(%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nilai Kelembagaan Demokrasi	80,56	92,97	80,54	74,93	93,03	80,54	93,03

Analisis Ketercapaian Sasaran Nilai kelembagaan Demokrasi adalah sebagai berikut:

- Tercapai 74,93 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 93,03% tidak tercapai*).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 92,97 terhadap target tahun lalu sebesar 115,40% (kolom 3) penurunan *) sebesar 22,43% .
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran tidak tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut

- Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial** dengan sasaran kinerja program meningkatnya kewaspadaan dini di daerah mempunyai Indikator kinerja jumlah konflik social di daerah formula nya jumlah konflik social di daerah dari target 70 kasus, realisasi 52 kasus atau turun 74,28%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai secara maksimal maka perlu dilakukan penguatan dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

- Kinerja sasaran Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap penanggulangan bencana diukur dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	IKD = (6,0% x Indeks Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan) + (6,0% x Indeks Pengkajian Resiko dan Perencanaan Terpadu) + (7,5% x Indeks Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik) + (10,5% x Indeks Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana) + (21,0% x Indeks Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana) + (35,0% x Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana + (14,% x Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana)

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 0,35 atau sebesar 85,37 % dari target 0,41 Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Ketahanan Daerah	0,3	0,34	0,41	0,35	85,37%	0,41	85,37%

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- Tercapai 0,35, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 85,37 % (tercapai).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 0,34 , terhadap target tahun lalu sebesar 0,30 terdapat peningkatan sebesar 0,01.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. **Program Penanggulangan Bencana** dengan sasaran kinerja program :
 - 1) Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana bencana, mempunyai Indikator kinerja Persentase pelayanan kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota yang diintervensi dalam pencegahan Dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah daerah rawan bencana yang diintervensi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan} / \text{Jumlah daerah rawan bencana}) \times 100 \%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(7/7) \times 100\% = 100\%$ dari target 42,86 atau sebesar 612%.
 - 2) Meningkatnya upaya kedaruratan dan penyiapan Logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana mempunyai Indikator kinerja Persentase pelayanan kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota yang diintervensi dalam kedaruratan. Formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah daerah yang terdampak bencana yang diintervensi dalam kedaruratan bencana} / \text{Jumlah daerah yang terdampak bencana}) \times 100 \%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(7/7) \times 100\% = 100\%$ dari target 100 % atau sebesar 100%.
 - 3) Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana mempunyai Indikator kinerja Persentase pelayanan kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota yang diintervensi dalam kedaruratan. Formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah daerah yang terkena dampak bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi} / \text{Jumlah daerah yang terkena dampak bencana}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(6/7) \times 100\% = 85,71\%$ dari target 85,71 atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Telah tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
- b. Melibatkan multistakeholders dalam memecahkan permasalahan terkait kebencanaan.
- c. Penanggulangan bencana menjadi salah satu sasaran RPJMD Provinsi Kep. Bangka Belitung

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai,
- b. Belum optimalnya koordinasi dan pembagian peran antar multistakeholders terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana.

- c. Masing kurangnya kuantitas dan kualitas SDM terkait teknis pananggulangan bencana

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Memaksimalkan peran dari unsur pentahelix dalam ketangguhan bencana.
- b. Melakukan koordinasi dan harmonisasi intensif baik secara internal BPBD maupun eksternal dengan multistakeholders lainnya.
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM penganggulagn bencana

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	<p>Indeks Ketahanan Daerah</p> <p>IKD = (6,0% x Indeks Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan) + (6,0% x Indeks Pengkajian Resiko dan Perencanaan Terpadu) + (7,5% x Indeks Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik) + (10,5% x Indeks Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana) + (21,0% x Indeks Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana) + (35,0% x Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana + (14,% x Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana)</p> <p>Realisasi = (6,0% x 0,72)+(6,0% x 0,60)+(7,5% x 0,45) +(10,5% x 0,30)+(21% x 0,44)+(35% x 0,25) + (14% x 0,20)= 0,35</p>	0,41	0,35	85,37 %

- 27. Kinerja sasaran Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH_Provinsi = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ <p>Keterangan : IKLH_Provinsi = Indeks Kualitas Lingkungan Tingkat Provinsi IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 71,67 atau sebesar 94,31 % dari target 75,99. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. Kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

(tabel ini dapat di buat landscape)

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,74	72,05	75,99	71,67	94,31.	75,99	94,31

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 71,67 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 94,31% tidak tercapai*).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 72,05 terhadap target tahun lalu sebesar 75,74 prosentase realisasi terhadap target sebesar 95,12 %, terdapat penurunan*) sebesar -0,81%.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran tidak tercapai.

Pada tahun 2022 IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dicapai adalah 71,67 diperoleh dari unsur penilaian Indeks Kualitas Air (IKA) 57,68 (Sedang), Indeks Kualitas Udara (IKU) 89,75 (Baik), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 39,28 (Rendah). Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 39,28 (Rendah), hal tersebut dipengaruhi dengan kondisi lingkungan di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana luas tutupan hutan terjadi penurunan setiap tahunnya akibat penggunaan diluar kegiatan kehutanan, dan luasan tutupan vegetasi non hutan juga mengalami penurunan karena banyaknya alih fungsi untuk kegiatan lainnya.

Faktor pendukung :

7. Kualitas udara memberikan kontribusi yang tinggi, didukung oleh rendahnya kejadian kebakaran hutan dan lahan, dan upaya pengurangan emisi gas buang oleh berbagai sektor.

Faktor Penghambat :

1. Ketersediaan titik pantau yang belum memenuhi proporsi yang diperlukan dan masih rendahnya anggaran terkait pengendalian pencemaran air dan kualitas tutupan lahan.

Upaya yang dilakukan ke depan :

1. Terkait dengan peningkatan kualitas air adalah Meningkatkan pengawasan terhadap industri untuk peningkatan penataan, Meningkatkan pelayanan terhadap IPAL Domaestik, dan Meningkatkan pembinaan terhadap usaha skala kecil.
2. Terkait dengan peningkatan Kualitas Tutupan Lahan adalah Penguatan implementasi dan pengawasan terkait pengendalian kerusakan lahan, Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, Penguatan kerjasama dengan masyarakat, instansi lain dan pemangku kepentingan lainnya, dan Replikasi pemulihan kerusakan lahan di lokasi lain.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. **Program Perencanaan Lingkungan Hidup** dengan sasaran kinerja program:
 - a. Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Dokumen Pendukung Inventarisasi Lingkungan Hidup, mempunyai Indikator kinerja Jumlah Dokumen RPPLH dan Dokumen Pendukung Inventarisasi Lingkungan Hidup. Formula perhitungan indikator ini adalah menghitung jumlah dokumen. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 3 dokumen dari target 3 dokumen atau sebesar 100%.
 - b. Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis, mempunyai Indikator kinerja Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang terselenggara. Formula perhitungan indikator ini adalah menghitung jumlah dokumen KLHS yang tersusun. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 1 dokumen dari target 2 dokumen atau sebesar 50%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. RPPLH sebagai kewajiban amanat undang-undang pada tingkat provinsi

bahwa RPPLH sebagai dokumen penting yang berisi integrasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- b. Matek (Materi Teknis) yang diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan untuk dikaji KLHS disusun sesuai ketentuan dengan data yang baik.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Pemahaman terhadap RPPLH yang masih kurang, sebagai dokumen penting yang berisi integrasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Hambatan pemenuhan target adalah pada pelaksanaan KLHS Tata Ruang, karena materi teknisnya belum diselesaikan Dinas PUPR.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Lebih meningkatkan koordinasi antar sektor yang mengelola materi teknis, sehingga tahapan dapat dilaksanakan secara bersamaan.

2. **Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup** dengan sasaran kinerja program:

- a. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, mempunyai Indikator kinerja Presentase parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi. Formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi}) / (\text{Jumlah parameter usulan kualitas lingkungan yang terlayani}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(48/70) \times 100\% = 68,57\%$ dari target 85,00% atau sebesar 80,67%.
- b. Terpantaunya Kualitas Air Sungai, Air laut Udara, dan emisi gas rumah kaca, mempunyai Indikator kinerja Jumlah Rekomendasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Formula perhitungan indikator ini adalah $\text{Dihitung Jumlah Rekomendasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca}$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 4 rekomendasi dari target 4 rekomendasi atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Sarana dan Prasana Laboratorium yang memadai, Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Kompeten, dan Peningkatan kinerja pelayanan kepada pelanggan/stakeholders.
- b. Terinputnya data hasil inventarisasi emisi gas rumah kaca kewenangan provinsi di sektor Energi, IPPU, AFOLU dan limbah yang diolah dalam aplikasi signsmart KLHK sebagai bahan rekomendasi pengendalian emisi gas rumah kaca sektor Energi, IPPU, AFOLU dan limbah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Petugas Sampling parameter kualitas lingkungan yang ada saat ini

merangkap sebagai Tenaga Analis penguji sample parameter kualitas lingkungan dengan status honorer dan Minimnya SDM yang berstatus PNS Analis Laboratorium.

- b. Data aktivitas sektor Energi, IPPU, AFOLU dan limbah yang kumpulkan dalam kegiatan inventarisasi emisi gas rumah kaca kewenangan provinsi masih terbatas.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Penyederhanaan proses dengan sistem aplikasi laboratorium dari penerimaan sample sampai dengan terbitnya Sertifikat Hasil Uji, baik secara administrasi, teknis maupun mutu, dan Penambahan CPNS/PNS sebagai Tenaga Analis Laboratorium.
- b. Melakukan pengumpulan data aktivitas sektor Energi, IPPU, AFOLU dan limbah ke lembaga penyedia data sesuai sektornya lebih lengkap dan detail baik dari pusat, daerah ataupun dunia usaha.

3. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin**

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan sasaran kinerja program Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mempunyai Indikator kinerja Persentase rekomendasi dari izin lingkungan yang diterbitkan. Formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah rekomendasi izin lingkungan yang diterbitkan) / (Jumlah permohonan izin lingkungan keseluruhan) x 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(13/13) \times 100\% = 100,00\%$ dari target 90,00% atau sebesar 111,11%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Motivasi yang tinggi dari segenap stakeholder dalam memahami bahwa izin lingkungan, dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat penting untuk keberlangsungan usaha dan kesehatan lingkungan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Tidak menjaga konsistensi pelaksanaan teknis ketentuan yang terdapat pada izin lingkungan, dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Menjaga dan meningkatkan kepatuhan pelaksanaan teknis ketentuan yang terdapat pada izin lingkungan, dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat** dengan sasaran kinerja program Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi. Mempunyai Indikator kinerja Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk

Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi. Formula perhitungan indikator ini adalah dihitung Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 6 lembaga dari target 6 lembaga atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kesadaran dan penerimaan yang baik dari berbagai stakeholder akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Sebaran lokasi dan keterbatasan tenaga penyuluh lingkungan hidup.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Meningkatkan variasi metode penyuluhan yang memberikan dampak besar dengan tenaga yang minimal.

5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan sasaran kinerja program Terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi, mempunyai Indikator kinerja Persentase aduan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diverifikasi. Formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah aduan masyarakat yang diverifikasi}) / (\text{Jumlah aduan masyarakat yang masuk}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(19/19) \times 100\% = 100\%$ dari target 100% atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Kesungguhan dalam upaya mendukung pencapaian pengelolaan lingkungan hidup, sehingga seluruh aduan diverifikasi untuk menentukan tindaklanjut.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Validasi dari data aduan yang diterima sangat bervariasi kasus dan lokasinya.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Klasifikasi aduan yang memiliki dampak lingkungan dan sosial yang akan diverifikasi sehingga lebih efektif.

6. **Program Pengelolaan Hutan** dengan sasaran kinerja program:

1. Sasaran Meningkatkan pengelolaan hutan mempunyai Indikator kinerja Persentase pemanfaatan hutan. Formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Luas pemanfaatan hutan}) / (\text{Luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $= (218.360,25 \text{ Hektar}) / (619.495,57 \text{ Hektar}) \times 100\% = 35,25\%$ dari target 36,00% atau sebesar 97,92%.

2. Sasaran Meningkatnya pengelolaan hutan mempunyai Indikator kinerja Persentase luas rehabilitasi hutan dan lahan. Formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Luas rehabilitasi}) / (\text{Luas lahan kritis}) \times 100\%$. Capaian kinerja

untuk indikator ini adalah $(91,18 \text{ Hektar}) / (167.104 \text{ Hektar}) \times 100\% = 0,05\%$ dari target 0,88% atau sebesar 6,20%.

3. Sasaran Meningkatkan pengelolaan hutan mempunyai Indikator kinerja Persentase kerusakan hutan. Formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Luas kerusakan hutan}) / (\text{Luas Kawasan hutan keseluruhan}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(3.505,80 \text{ Hektar}) / (652.541,52 \text{ Hektar}) \times 100\% = 0,54\%$ dari target 25,00% atau sebesar 2,15%.

=== mitra BAPPEDA Cicik Pratiwi

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Luas Kawasan hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 652.541,52 Hektar atau sebesar 39,73 % dari luas daratan (1.642.412 Hektar), dengan berbagai potensi yang ada diatas maupun yang ada didalam tanah, merupakan modal terbesar dalam pemanfaatannya, sedangkan lahan diluar kawasan hutan sudah makin habis untuk berbagai penggunaan.
- b. Upaya rehabilitasi didukung oleh semangat Pj. Gubernur dalam memperbaiki lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui gerakan Hijau Biru Babelku, semakin meningkat kesadaran kelompok masyarakat dalam memperbaiki lingkungan melalui penanaman lahan-lahan kritis.
- c. Rendahnya kerusakan hutan hasil dari upaya penyuluhan bahaya dan pencegahan kebakaran dan musim kemarau basah sehingga kebakaran tidak banyak terjadi, serta semakin tingginya kepatuhan pemegang izin pemanfaatan hutan untuk melaksanakan perlindungan diwilayah izinnya.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Pemanfaatan hutan tidak sesuai peruntukannya dan dilakukan secara illegal.
- b. Ada penolakan pemilik lahan untuk rehabilitasi diluar kawasan hutan.
- c. Adanya penggunaan kawasan hutan secara illegal.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Peningkatan sosialisasi dan pembinaan pemegang izin pemanfaatan kawasan hutan.
- b. Sosialisasi, pemilihan metode rehabilitasi dan jenis tanaman yang produktif.
- c. Terus melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, dan penertiban penggunaan kawasan yang illegal.

7. **Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya** dengan sasaran kinerja program Meningkatkan jumlah sumber daya alam dan ekosistem yang dikonservasi, mempunyai Indikator kinerja Persentase konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Formula perhitungan

indikator ini adalah (Jumlah kawasan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya yang ditetapkan) / (Jumlah usulan kawasan KSDAE) x 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(1/10) \times 100\% = 10,00\%$ dari target 20,00% atau sebesar 50,00%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Pemerintah kabupaten/kecamatan teridentifikasi, mendukung terhadap Program KSDAE yang akan memberikan dampak positif bagi daerah kabupaten/kecamatan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Tahapan dari proses identifikasi, pengusulan dan penetapan tidak diselesaikan dalam tahun yang sama.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Mengoptimalkan data awal hasil identifikasi, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

8. **Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan** dengan sasaran kinerja program Meningkatkan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial. Mempunyai Indikator kinerja Persentase rekomendasi izin perhutanan sosial. Formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah permohonan izin yang terverifikasi) / (Jumlah usulan-permohonan izin) x 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(15/21) \times 100\% = 71,43\%$ dari target 90,00% atau sebesar 79,37%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Usulan dilengkapi data dan lokasi sesuai dengan data PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial).
- b. Penyederhanaan tata urutan proses dari usulan ke verifikasi hingga pengesahan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Terhadap usulan yang disampaikan oleh masyarakat terkadang tidak sesuai PIAPS.
- b. Usulan menunggu proses verifikasi yang dilaksanakan oleh KLHK, yang terjadwal bersamaan seluruh Indonesia.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Sinkronisasi data awal terhadap perubahan PIAPS agar usulan termasuk dalam data PIAPS.
- b. Pengecekan data sebelum usulan disampaikan disesuaikan dengan PIAPS.

9. **Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)** dengan sasaran kinerja program Meningkatkan luas DAS yang dipertahankan dan ditingkatkan daya dukungnya, mempunyai Indikator kinerja Persentase luas DAS yang

dikelola. Formula perhitungan indikator ini adalah (Luas DAS yang dikelola) / (Luas DAS keseluruhan) x 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah (25.000 Hektar) / (1.642.412 Hektar) x 100% = 1,52% dari target 1,64% atau sebesar 92,81%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui kelembagaan Forum DAS yang beranggotakan dari berbagai stakeholder ditingkat provinsi maupun inisiasi pembentukan Forum DAS di Kabupaten/Kota.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Masih adanya kegiatan yang belum tertib dan sadar dalam pengelolaan DAS.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Peningkatan kesadaran seluruh pihak dalam menjaga dan mengelola DAS dan Peningkatan keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan DAS.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi :

1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan
 - a) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c) UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 - d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - e) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 18 Tahun 2018 tentang Pelimpahan dalam Rangka Tugas Pembantuan terhadap lingkup urusan Pemerintah Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas Pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan Pemerintahan Pusat atau Pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskannya.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan pemerintahan tersebut terpilah menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah dengan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Maksud diadakan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah.

3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan 1 Dokumen.
- b. Terlaksananya Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 45.27 Km.
- c. Terlaksananya Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan 1.90 Km.

- d. Terlaksananya Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan 0.10 Km.
- e. Terlaksananya Preservasi Rutin Jembatan 167.73 m.
- f. Terlaksananya Preservasi Jembatan 19.20 m.
- g. Terlaksananya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.00 Layanan.
- h. Terpenuhinya Layanan Umum 1 Layanan.
- i. Terlaksananya Irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara (PEN) 80.00 Km.
- j. Terlaksananya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1 Layanan.
- k. Terlaksananya Layanan Layanan Perkantoranl 1 Layanan.
- l. Tersedianya Sarana Pemasaran 5.00 Unit.
- m. Tersedianya Sarana Pascapanen Hortikultura 1.00 Unit.
- n. Tersedianya Sarana Pengolahan Hortikultura 1.00 Unit.
- o. Tersedianya Prasarana Pascapanen Hortikultura 1.00 unit.
- p. Tersedianya Kawasan Bawang Merah 40.00 Unit.
- q. Tersedianya Kawasan Aneka Cabai 40.00 Unit.
- r. Tersedianya Kawasan Durian 30.00 Unit.
- s. Terlaksananya Layanan Perencanaan Satker Daerah 1.00 Layanan.
- t. Terlaksananya Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah 1.00 Layanan.
- u. Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 1.00 kegiatan.
- v. Terpenuhinya Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan 2.00 layanan.
- w. Tersedianya Sertifikat Produk Tanaman Pangan 2.00 produk.
- x. Tersedianya Sarana Pascapanen Tanaman Pangan 8.00 Unit.
- y. Tersedianya Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (PEN) 2.00 Unit.
- z. Terlaksananya Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi 1000.00 Unit.
- aa. Tersedianya Kawasan Padi (PEN) 1000.00 Unit.
- bb. Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan pelaporan 1.00 kegiatan.
- cc. Tersedianya Area penyaluran benih padi (PEN) 1000.00 Unit.
- dd. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen.
- ee. Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen.
- ff. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Layanan.
- gg. Tersedianya Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)Tanaman Perkebunan (PEN) 100.00 Unit / Ha.
- hh. Tersedianya Kawasan Lada 200.00 Unit / Ha.
- ii. Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen,Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan 2.00 Kegiatan.
- jj. Terpenuhinya Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat (PEN) 800.00 produk STDB.
- kk. Terpenuhinya Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan 3.00 Rekomendasi Kebijakan.
- ll. Tersedianya Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan 1 Unit / 1.00 Ha.
- mm. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen.

- nn. Tersedianya Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (PN) 1.00 Lembaga.
- oo. Tersedianya Hijauan Pakan Ternak (PEN) 3.00 Unit / Ton.
- pp. Terpenuhinya Mutu dan Keamanan Pakan 40.00 Produk / Sampel.
- qq. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan (PEN) 21150.00 layanan.
- rr. Terlaksananya Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi 1.00 Kegiatan.
- ss. Terpenuhinya Ternak Yang Didata dan Ditandai (PEN) 14804.00 Unit.
- tt. Terlaksananya Optimalisasi Reproduksi (PEN) 1000.00 ekor.
- uu. Terlaksananya Sertifikasi Unit Usaha 6.00 Lembaga.
- vv. Terpenuhinya Keamanan dan Mutu Produk Hewan 25.00 Produk.
- ww. Terlaksananya Layanan BMN, Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Data dan Informasi 6.00 Layanan.
- xx. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan 6.00 Dokumen.
- yy. Tersedianya Embung Pertanian, Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat, Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Barat 3.00 Unit, 2.00 Unit, 2.00 Unit.
- zz. Tersedianya Jaringan Irigasi Tersier 12.00 Unit.
- aaa. Terlaksananya Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian 1,00 Kegiatan.
- bbb. Terlaksananya e- RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi 44.585,00 Orang.
- ccc. Terlaksananya Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi 7,00 Layanan.
- ddd. Tersedianya Asuransi Pertanian 1.00 Unit.
- eee. Terlaksananya Layanan Umum 1.00 Layanan.
- fff. Tersedianya Fasilitas Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Kawasan Transmigrasi 2.00 Orang.
- ggg. Tersedianya Fasilitas Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (PN) 220.00 Orang.
- hhh. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi Tugas Pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2022 mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.726.497.000,00,- dengan realisasi Rp. 32.576.512.511,00,- atau 96,59%.

3.1.1. Target Kinerja

1) Dinas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Infrastruktur Konektivitas	(1) Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan 1 Dokumen. (2) Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 45.27 Km. (3) Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan 1.90 Km. (4) Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan 0.10 Km. (5) Preservasi Rutin Jembatan 167.73 m. (6) Preservasi Jembatan 19.20 m.	10.063.208.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	(1) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.00 Layanan. (2) Layanan Umum 1 Layanan.	888.395.000,00
3	Program Ketahanan Sumber Daya Air	(1) Irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara (PEN) 80.00 Km.	3.924.855.000,00
4	Program Dukungan Manajemen	(1) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1 Layanan. (2) Layanan Layanan Perkantoranl 1 Layanan.	695.542.000,00

2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	(1) Sarana Pemasaran 5.00 Unit (2) Sarana Pascapanen Hortikultura 1.00 Unit. (3) Sarana Pengolahan Hortikultura 1.00 Unit . (4) Prasarana Pascapanen Hortikultura 1.00 unit.	856.560.000,00

2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	(1) Kawasan Bawang Merah 40.00 Unit. (2) Kawasan Aneka Cabai 40.00 Unit. (3) Kawasan Durian 30.00 Unit.	940.000.000,00
3	Program Dukungan Manajemen	(1) Layanan Perencanaan Satker Daerah 1.00 Layanan. (2) Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah 1.00 Layanan.	100.000.000,00
4	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	(1) Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 1.00 kegiatan. (2) Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan 2.00 layanan. (3) Sertifikat Produk Tanaman Pangan 2.00 produk. (4) PSarana Pascapanen Tanaman Pangan 8.00 Unit. (5) Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (PEN) 2.00 Unit.	933.457.000,00
5	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	(1) Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi 1000.00 Unit. (2) Kawasan Padi (PEN) 1000.00 Unit. (3) Koordinasi, Bimtek, Monev dan pelaporan 1.00 kegiatan. (4) Area penyaluran benih padi (PEN) 1000.00 Unit.	1.681.210.000,00
6	Program Dukungan Manajemen	(1) Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen. (2) Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen. (3) Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Layanan.	414.658.000,00
7	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	(1) Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan (PEN) 100.00 Unit / Ha. (2) Kawasan Lada 200.00 Unit / Ha. (3) Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan 2.00 Kegiatan. (4) Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat (PEN) 800.00 produk	3.140.544.000,00

		STDB. (5) Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan 3.00 Rekomendasi Kebijakan. (6) Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan 1 Unit / 1.00 Ha.	
8	Program Dukungan Manajemen	(1) Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen.	472.180.000,00
9	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	(1) Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (PN) 1.00 Lembaga.	65.000.000,00
10	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	(1) Hijauan Pakan Ternak (PEN) 3.00 Unit / Ton. (2) Mutu dan Keamanan Pakan 40.00 Produk / Sampel. (3) Pelayanan Kesehatan Hewan (PEN) 21150.00 layanan. (4) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi 1.00 Kegiatan. (5) Ternak Yang Didata dan Ditandai (PEN) 14804.00 Unit. (6) Optimalisasi Reproduksi (PEN) 1000.00 ekor. (7) Sertifikasi Unit Usaha 6.00 Lembaga. (8) Keamanan dan Mutu Produk Hewan 25.00 Produk.	5.489.149.000,00
11	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	(1) Layanan BMN, Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Data dan Informasi 6.00 Layanan. (2) Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan 6.00 Dokumen.	469.138.000,00
12	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	(1) Embung Pertanian, Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat, Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Barat 3.00 Unit, 2.00 Unit, 2.00 Unit. (2) Jaringan Irigasi Tersier 12.00 Unit. (3) Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian 1,00 Kegiatan. (4) e- RDKK untuk Pendataan Penerima	2.861.969.000,00

		Pupuk Bersubsidi 44.585,00 Orang. (5)Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi 7,00 Layanan. (6) Asuransi Pertanian 1.00 Unit.	
13	Program Dukungan Manajemen	(1) Layanan Umum 1.00 Layanan.	570.870.000,00

3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	(1) Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Kawasan Transmigrasi 2.00 Orang. (2) Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (PN) 220.00 Orang.	94.900.000,00
2	Program Program Dukungan Manajemen	(1) Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	64.862.000,00

3.1.2. Realisasi

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Infrastruktur Konektivitas	(1) Terpenuhinya Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan 1 Dokumen. (2) Terlaksananya Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 45.27 Km. (3) Terlaksananya Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan 1.90 Km. (4) Terlaksananya Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan 0.10 Km. (5) Terlaksananya Preservasi Rutin Jembatan 167.73 m. (6) Terlaksananya Preservasi Jembatan 19.20 m.	10.025.223.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	(1) Terlaksananya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.00 Layanan. (2) Terpenuhinya Layanan Umum 1 Layanan.	801.821.293,00
3	Program Ketahanan Sumber Daya Air	(1) Terlaksananya Irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara (PEN) 80.00 Km.	3.876.112.180,00
4	Program Dukungan Manajemen	(1) Terlaksananya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1 Layanan. (2) Terlaksananya Layanan Layanan Perkantoranl 1 Layanan.	611.714.000,00

2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	(1) Tersedianya Sarana Pemasaran 5.00 Unit. (2) Tersedianya Sarana Pascapanen Hortikultura 1.00 Unit. (3) Tersedianya Sarana Pengolahan Hortikultura 1.00 Unit. (4) Tersedianya Prasarana Pascapanen Hortikultura 1.00 unit.	838.455.252,55
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	(1) Tersedianya Kawasan Bawang Merah 40.00 Unit. (2) Tersedianya Kawasan Aneka Cabai 40.00 Unit. (3) Tersedianya Kawasan Durian 30.00 Unit.	930.146.000,00
3	Program Dukungan Manajemen	(1) Terlaksananya Layanan Perencanaan Satker Daerah 1.00 Layanan. (2) Terlaksananya Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah 1.00 Layanan.	99.920.000,00
4	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	(1) Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 1.00 kegiatan. (2) Terpenuhinya Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan 2.00 layanan. (3) Tersedianya Sertifikat Produk Tanaman Pangan 2.00 produk. (4) Tersedianya Sarana Pascapanen Tanaman Pangan 8.00 Unit. (5) Tersedianya Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (PEN) 2.00 Unit.	915.254.588,50
5	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi	(1) Terlaksananya Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi 1000.00 Unit.	1.655.857.158,00

	Pangan Berkualitas	(2) Tersedianya Kawasan Padi (PEN) 1000.00 Unit. (3) Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan pelaporan 1.00 kegiatan. (4) Tersedianya Area penyaluran benih padi (PEN) 1000.00 Unit.	
6	Program Dukungan Manajemen	(1) Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen. (2) Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen. (3) Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Layanan.	406.945.361,20
7	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	(1) Tersedianya Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)Tanaman Perkebunan (PEN) 100.00 Unit / Ha. (2) Tersedianya Kawasan Lada 200.00 Unit / Ha. (3) Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen,Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan 2.00 Kegiatan. (4) Terpenuhinya Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat (PEN) 800.00 produk STDB. (5) Terpenuhinya Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan 3.00 Rekomendasi Kebijakan. (6) Tersedianya Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan 1 Unit / 1.00 Ha.	3.103.327.716,95
8	Program Dukungan Manajemen	(1) Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen.	456.503.624,00
9	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	(1) Tersedianya Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan	64.941.500,00

		ekspor (PN) 1.00 Lembaga.	
10	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	(1) Tersedianya Hijauan Pakan Ternak (PEN) 3.00 Unit / Ton. (2) Terpenuhi Mutu dan Keamanan Pakan 40.00 Produk / Sampel. (3) Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan (PEN) 21150.00 layanan. (4) Terlaksananya Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi 1.00 Kegiatan. (5) Terpenuhi Ternak Yang Didata dan Ditandai (PEN) 14804.00 Unit. (6) Terlaksananya Optimalisasi Reproduksi (PEN) 1000.00 ekor. (7) Terlaksananya Sertifikasi Unit Usaha 6.00 Lembaga. (8) Terpenuhi Keamanan dan Mutu Produk Hewan 25.00 Produk.	4.739.177.994,60
11	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	(1) Terlaksananya Layanan BMN, Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Data dan Informasi 6.00 Layanan. (2) Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan 6.00 Dokumen.	462.054.016,20
12	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	(1) Tersedianya Embung Pertanian, Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat, Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Barat 3.00 Unit, 2.00 Unit, 2.00 Unit. (2) Tersedianya Jaringan Irigasi Tersier 12.00 Unit. (3) Terlaksananya Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian 1,00 Kegiatan. (4) Terlaksananya e-	2.861.713.000,00

		RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi 44.585,00 Orang. (5) Terlaksananya Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi 7,00 Layanan. (6) Tersedianya Asuransi Pertanian 1.00 Unit.	
13	Program Dukungan Manajemen	(1) Terlaksananya Layanan Umum 1.00 Layanan.	570.755.826,00

3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	(1) Tersedianya Fasilitas Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Kawasan Transmigrasi 2.00 Orang. (2) Tersedianya Fasilitas Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (PN) 220.00 Orang.	94.230.000,00
2	Program Program Dukungan Manajemen	(1) Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	62.360.000,00

Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Infrastruktur Konektivitas	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10.063.208.000,00	10.025.223.000,00	99,62	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	99	APBN TH. 2022
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10.063.208.000,00	10.025.223.000,00	99,62	Peningkatan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	99	APBN TH. 2022
		3. UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	1. Output : Dukungan Teknis								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Penyiapan dan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi	152.460.000,00	114.475.000,00	75,09	1 Dokumen	75	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pengendalian Pelaksanaan		Kepulauan Bangka Belitung						
			2. Output : Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)								
			1. Rincian Kegiatan : Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.570.969.000,00	3.570.969.000,00	100,00	45.27 Km	100	APBN TH. 2022
			2. Rincian Kegiatan : Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4.404.236.000,00	4.404.236.000,00	100,00	1.90 Km	100	APBN TH. 2022
			3. Rincian Kegiatan : Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.558.357.000,00	1.558.357.000,00	100,00	0.10 Km	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Output : Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)								
			1. Rincian Kegiatan : Preservasi Rutin Jembatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	250.892.000,00	250.892.000,00	100,00	167.73 m	100	APBN TH. 2022
			2. Rincian Kegiatan : Preservasi Jembatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	126.294.000,00	126.294.000,00	100,00	19.20 m	100	APBN TH. 2022
2.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	888.395.000,00	801.821.293,00	90,26	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	91	APBN TH. 2022
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	888.395.000,00	801.821.293,00	90,26	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	91	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	605.585.000,00	543.004.293,00	89,67	1.00 Layanan	91	APBN TH. 2022
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Umum	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	282.810.000,00	258.817.000,00	91,52	1.00 Layanan	91	APBN TH. 2022
3.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Ketahanan Sumber Daya Air	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.924.855.000,00	3.876.112.180,00	98,76	Terwujudnya Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana pada Prgram Ketahanan Sumber Daya Air	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.924.855.000,00	3.876.112.180,00	98,76	Meningkatnya Persentase Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	100	APBN TH. 2022
		3. UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	1. Output : Prasarana Jaringan Sumber Daya Air								
			1. Rincian Kegiatan : Irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara (PEN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.924.855.000,00	3.876.112.180,00	98,76	80.00 Km	100	APBN TH. 2022
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	695.542.000,00	611.714.000,00	87,95	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	100	APBN TH. 2022
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Ditjen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan	695.542.000,00	611.714.000,00	87,95	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Ditjen	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Sumber Daya Air		Bangka Belitung				Sumber Daya Air		
		3. UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	417.202.000,00	335.235.000,00	80,35	1.00 Layanan	100	APBN TH. 2022
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Layanan Perkantoranl	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	278.340.000,00	276.479.000,00	99,33	1.00 Layanan	100	APBN TH. 2022
5	Kementerian Pertanian	1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	856.560.000,00	838.455.252,55	97,89	Terwujudnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang baik	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	856.560.000,00	838.455.252,55	97,89	Meningkatnya akses pasar hortikultura, jaminan mutu produk hortikultura nasional, dan nilai tambah produk hortikultura	100	APBN TH. 2022
		3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	1. Output : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Sarana Pemasaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	431.560.000,00	413.455.252,55	95,80	5.00 Unit	100	APBN TH. 2022
			2. Output : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Sarana Pascapanen Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	1.00 Unit	100	APBN TH. 2022
			2. Rincian Kegiatan : Sarana Pengolahan Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	1.00 Unit	100	APBN TH. 2022
			2. Output : Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Prasarana Pascapanen Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	235.000.000,00	235.000.000,00	100,00	1.00 unit	100	APBN TH. 2022
6	Kementerian Pertanian	1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Ketersediaan , Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	940.000.000,00	930.146.000,00	98,95	Terwujudnya Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat serta Produksi Buah dan Florikultura	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	760.000.000,00	752.324.000,00	98,99	Meningkatnya Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	100	APBN TH. 2022
		3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	1. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Kawasan Bawang Merah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	280.000.000,00	276.162.000,00	98,63	40.00 Unit	100	APBN TH. 2022
			2. Rincian Kegiatan : Kawasan Aneka Cabai	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	480.000.000,00	476.162.000,00	99,20	40.00 Unit	100	APBN TH. 2022
			2. Kegiatan : Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	180.000.000,00	177.822.000,00	98,79	Meningkatnya Produksi Buah dan Florikultura	100	APBN TH. 2022
			1. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan :	Provinsi Kepulauan	Dinas Pertanian Provinsi	180.000.000,00	177.822.000,00	98,79	30.00 Unit	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kawasan Durian	Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung						
7	Kementerian Pertanian	1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100.000.000,00	99.920.000,00	99,92	Terpenuhinya Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	100	APBN TH. 2022
		2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100.000.000,00	99.920.000,00	99,92	Terlaksananya dan Meningkatnya Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	100	APBN TH. 2022
		3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	1. Output : Perencanaan dan Penganggaran								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan Satker Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	39.700.000,00	39.700.000,00	100,00	1.00 Layanan	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60.300.000,00	60.220.000,00	99,87	1.00 Layanan	100	APBN TH. 2022
8	Kementerian Pertanian	1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	933.457.000,00	915.254.588,50	98,05	Terwujudnya peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	100	APBN TH. 2022
		2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	933.457.000,00	915.254.588,50	98,05	Meningkatnya kualitas komoditas tanaman pangan untuk mendukung ekspor dan Rasio pengajuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pasca panen Tanaman Pangan yang dapat dipenuhi terhadap seluruh	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									permintaan yang masuk		
		3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	1. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	401.800.000,00	383.597.588,50	95,47	1.00 kegiatan	100	APBN TH. 2022
			2. Output : Data dan Informasi Publik								
			1. Rincian Kegiatan : Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00	2.00 layanan	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Output : Sertifikasi Produk								
			1. Rincian Kegiatan : Sertifikat Produk Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	2.00 produk	100	APBN TH. 2022
			4. Output : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	202.257.000,00	202.257.000,00	100,00	8.00 Unit	100	APBN TH. 2022
			2. Rincian Kegiatan : Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (PEN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	2.00 Unit	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Kementerian Pertanian	1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Ketersediaan , Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.681.210.000,00	1.655.857.158,00	98,49	Terwujudnya Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan serta Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	100	APBN TH. 2022
		2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.345.000.000,00	1.323.076.500,00	98,37	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	100	APBN TH. 2022
		3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	1. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	1000.00 Unit	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Kawasan Padi (PEN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.300.000.000,00	1.278.076.500,00	98,31	1000.00 Unit	100	APBN TH. 2022
			2. Kegiatan : Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	336.210.000,00	332.780.658,00	98,98	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	100	APBN TH. 2022
			1. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi, Bimtek, Monev dan pelaporan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	1.00 kegiatan	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Area penyaluran benih padi (PEN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	236.210.000,00	232.780.658,00	98,55	1000.00 Unit	100	APBN TH. 2022
10	Kementerian Pertanian	1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	414.658.000,00	406.945.361,20	98,14	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	100	APBN TH. 2022
		2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	414.658.000,00	406.945.361,20	98,14	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	100	APBN TH. 2022
		3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	1. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20.139.000,00	20.139.000,00	100,00	1.00 Dokumen	100	APBN TH. 2022
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	210.099.000,00	202.386.361,20	96,33	1.00 Dokumen	100	APBN TH. 2022
			3. Rincian Kegiatan : Layanan Manajemen Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	184.420.000,00	184.420.000,00	100,00	1.00 Layanan	100	APBN TH. 2022
11	Kementerian Pertanian	1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.140.544.000,00	3.103.327.716,95	98,81	Terwujudnya Penguatan Perlindungan Perkebunan, Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah, dan Pasca Panen, Pengolahan	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									(Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan serta Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan		
		2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Penguatan Perlindungan Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	263.350.000,00	255.504.288,55	97,0208	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan	100	APBN TH. 2022
		3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	1. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan (PEN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	263.350.000,00	255.504.288,55	97,02	100.00 Unit / Ha	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Kegiatan : Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.992.515.000,00	1.984.943.443,00	99,62	Terlaksananya Kegiatan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	100	APBN TH. 2022
			1. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan :Kawasan Lada	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.992.515.000,00	1.984.943.443,00	99,62	200.00 Unit / Ha	100	APBN TH. 2022
			3. Kegiatan : Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	775.740.000,00	755.182.890,00	97,35	Terlaksananya Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	135.800.000,00	125.521.445,00	92,43	2.00 Kegiatan	100	APBN TH. 2022
			2. Output : Standarisasi Produk								
			1. Rincian Kegiatan : Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat (PEN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	639.940.000,00	629.661.445,00	98,39	800.00 produk STDB	100	APBN TH. 2022
			4. Kegiatan : Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	108.939.000,00	107.697.095,40	98,86	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunann	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Output : Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan								
			1. Rincian Kegiatan : Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79.960.000,00	79.339.047,70	99,22	3.00 Rekomendasi Kebijakan	100	APBN TH. 2022
			2. Output : Sarana Pengembang an Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28.979.000,00	28.358.047,70	97,86	1 Unit / 1.00 Ha	100	APBN TH. 2022
12	Kementerian Pertanian	1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	472.180.000,00	456.503.624,00	96,68	Terpenuhinn ya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									Ditjen Perkebunan		
		2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	472.180.000,00	456.503.624,00	96,68	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	100	APBN TH. 2022
		3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	1. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	472.180.000,00	456.503.624,00	96,68	1.00 Dokumen	100	APBN TH. 2022
13	Kementerian Pertanian	1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	65.000.000,00	64.941.500,00	99,91	Terwujudnya Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	65.000.000,00	64.941.500,00	99,91	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	100	APBN TH. 2022
		3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	1. Output : Fasilitas dan Pembinaan Lembaga								
			1. Rincian Kegiatan :Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (PN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	65.000.000,00	64.941.500,00	99,91	1.00 Lembaga	100	APBN TH. 2022
14	Kementerian Pertanian	1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Ketersediaan , Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5.489.149.000,00	4.739.177.994,60	86,34	Terwujudnya Peningkatan Produksi Pakan Ternak, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Penyediaan	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak, serta Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
		2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	480.000.000,00	479.424.000,00	99,88	Meningkatnya Produksi Pakan Ternak	100	APBN TH. 2022
		3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	1. Output : Bantuan Peralatan / Sarana								
			1. Rincian Kegiatan : Hijauan Pakan Ternak (PEN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	400.000.000,00	399.712.000,00	99,93	3.00 Unit / Ton	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Output : Penyidikan dan Pengujian Produk								
			1. Rincian Kegiatan : Mutu dan Keamanan Pakan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80.000.000,00	79.712.000,00	99,64	40.00 Produk / Sampel	100	APBN TH. 2022
			2. Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.624.439.000,00	2.980.738.633,60	82,24	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	100	APBN TH. 2022
			1. Output : Pelayanan Publik Lainnya								
			1. Rincian Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Hewan (PEN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.624.439.000,00	2.980.738.633,60	82,24	21150.00 layanan	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Kegiatan : Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.156.810.000,00	1.055.126.401,00	91,21	Terlaksananya Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	100	APBN TH. 2022
			1. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	113.000.000,00	79.105.467,00	70,00	1.00 Kegiatan		
			2. Output : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Ternak Yang Didata dan Ditandai (PEN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	371.280.000,00	337.385.467,00	90,87	14804.00 Unit	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Output : Bantuan Hewan								
			1. Rincian Kegiatan : Optimalisasi Reproduksi (PEN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	672.530.000,00	638.635.467,00	94,96	1000.00 ekor	100	APBN TH. 2022
			4. Kegiatan : Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	227.900.000,00	223.888.960,00	98,24	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100	APBN TH. 2022
			1. Output : Sertifikasi Lembaga								
			1. Rincian Kegiatan : Sertifikasi Unit Usaha	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	180.400.000,00	178.394.480,00	98,89	6.00 Lembaga	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Output : Penyidikan dan Pengujian Produk								
			1. Rincian Kegiatan : Keamanan dan Mutu Produk Hewan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	47.500.000,00	45.494.480,00	95,78	25.00 Produk	100	APBN TH. 2022
15	Kementerian Pertanian	1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	469.138.000,00	462.054.016,20	98,49	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	100	APBN TH. 2022
		2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	469.138.000,00	462.054.016,20	98,49	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan BMN, Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Data dan Informasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	251.198.000,00	247.656.008,10	98,59	6.00 Layanan	100	APBN TH. 2022
			1. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	217.940.000,00	214.398.008,10	98,37	6.00 Dokumen	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Kementerian Pertanian	1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.861.969.000,00	2.861.713.000,00	99,99	Terwujudnya Peningkatan Pemenuhan Pengairan Lahan Pertanian, Kemanfaatan Alsintan, Kemanfaatan Distribusi Pupuk dan Pestisida, dan Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian	100	APBN TH. 2022
		2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.704.000.000,00	1.704.000.000,00	100,00	Peningkatan Pemenuhan Pengairan Lahan Pertanian	100	APBN TH. 2022
		3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	1. Output :Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan , dan Lingkungan Hidup								

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Embung Pertanian, Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat, Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Barat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	804.000.000,00	804.000.000,00	100,00	3.00 Unit, 2.00 Unit, 2.00 Unit	100	APBN TH. 2022
			1. Output : OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Jaringan Irigasi Tersier	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	12.00 Unit	100	APBN TH. 2022
			2. Kegiatan : Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan	160.000.000,00	159.872.000,00	99,92	Peningkatan Kemanfaatan Alsintan	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Bangka Belitung						
			1. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	160.000.000,00	159.872.000,00	99,92	1,00 Kegiatan	100	APBN TH. 2022
			3. Kegiatan : Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	986.755.000,00	986.627.000,00	99,99	Peningkatan Kemanfaatan Distribusi Pupuk dan Pestisida	100	APBN TH. 2022
			1. Output : Pelayanan Publik Kepada Masyarakat								
			1. Rincian Kegiatan : e-RDCK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	540.365.000,00	540.301.000,00	99,99	44.585,00 Orang	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Output : Pelayanan Publik Lainnya								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	446.390.000,00	446.326.000,00	99,99	7,00 Layanan	100	APBN TH. 2022
			4. Kegiatan : Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11.214.000,00	11.214.000,00	100,00	Peningkatan Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian	100	APBN TH. 2022
			1. Output : Prasarana Bidang Pertanian , Kehutanan, dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Asuransi Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	11.214.000,00	11.214.000,00	100,00	1.00 Unit	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Kepulauan Bangka Belitung						
17	Kementerian Pertanian	1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	570.870.000,00	570.755.826,00	99,98	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	100	APBN TH. 2022
		2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	570.870.000,00	570.755.826,00	99,98	Terlaksananya Layanan Dukungan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	100	APBN TH. 2022
		3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	1. Output :Layanan Dukungan Manajemen Internal								

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Umum	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	570.870.000,00	570.755.826,00	99,98	1.00 Layanan	100	APBN TH. 2022
18	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	94.900.000,00	94.230.000,00	99,29	Terwujudnya suatu Kawasan Transmigrasi yang merupakan Prioritas Nasional	100	APBN TH. 2022
		2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	94.900.000,00	94.230.000,00	99,29	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan adanya Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	1. Output : Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat								
			1. Rincian Kegiatan : Fasilitas Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	52.800.000,00	52.800.000,00	100,00	2.00 Orang	100	APBN TH. 2022
			1. Output : Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat								
			1. Rincian Kegiatan : Fasilitas Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (PN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	42.100.000,00	41.430.000,00	98,41	220.00 Orang	100	APBN TH. 2022
19	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	64.862.000,00	62.360.000,00	96,14	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan	100	APBN TH. 2022

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									Pengembangan Kawasan Transmigrasi		
		2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	64.862.000,00	62.360.000,00	96,14	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TH. 2022
		3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	64.862.000,00	62.360.000,00	96,14	1.00 Layanan	100	APBN TH. 2022
JUMLAH TOTAL ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2022						33.726.497.000,00	32.576.512.511,00	96,59			APBN TH. 2022

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota
Tugas Pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dilaksanakan.

3.2.1 Tidak ada target kinerja

3.2.2 Tidak ada realisasi

3.3 Permasalahan dan Kendala

- Dinas PU
 1. Faktor Alam yaitu kondisi cuaca mengakibatkan perubahan pada jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 2. Adanya penyesuaian volume pekerjaan terhadap kondisi di lapangan.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 1. Pelaksanaan pembayaran operasional pengobatan PMK sebanyak 3.277 ekor, operasional pengendalian PMK tahap 1 sebanyak 11.446 layanan dan tahap 2 sebanyak 8.047 layanan, Sebagian peternak mandiri tidak mau ternaknya divaksin, sehingga mengurangi target.
 2. Pelaksanaan penandaan ternak sebanyak 10.616 ekor. Sebagian peternak mandiri tidak mau ternaknya ditandai karena dilepas liarkan di perkebunan kelapa sawit, sehingga mengurangi realisasi target.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 1. Kurangnya SDM dalam rangka Optimalisasi Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi.
 2. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam bidang Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

- Dinas PU
 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan Mengakselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek.
 2. Memacu, mengawal, dan monitoring pengendalian setiap proses tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan antara lain dengan membuat rencana jadwal percepatan.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 1. Mengoptimalkan dan Mengintensifkan koordinasi dengan peternak.
 2. Merutinkan monitoring dan evaluasi pada tiap kegiatan.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 1. Melakukan Koordinasi dengan Disnaker dan Diknas Kabupaten/Kota terkait kebutuhan SDM dalam rangka mengotimalkan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi.
 2. Memperkuat koordinasi dan konsultasi kepada instansi/pihak Unit Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

SPM urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan pendidikan antara lain:

- a. Pendidikan menengah dengan indikator pencapaian yaitu jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah;
- b. Pendidikan khusus dengan indikator pencapaian jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pencapaian SPM untuk urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Persentase Target
I.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	55.073	100
	1.	buku teks pelajaran	55.073	100
	2.	perlengkapan belajar	55.073	100
	3.	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.810	100
	4.	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	128	100
	5.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	2.000	100
	6.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	3.641	100
	7.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	128	100

	8.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat		1.035	100
III.	Pendidikan Khusus		Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	1.265	100
	1.	materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas		1.265	100
	2.	perlengkapan belajar		1.265	100
	3.	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c		9	100
	4.	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan		309	100
	5.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		1.265	100
	6.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		281	100
	7.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		9	100
	8.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat		24	100

4.1.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian (Persentase) %
I.	URUSAN PENDIDIKAN				
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			99,64
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah			99,74
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80

	Jumlah yang Harus Dilayani	55.073	55.073	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19,74
	Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barabg/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	98,68
1.	buku teks pelajaran	55.073	55.073	0	100
2.	perlengkapan belajar	55.073	55.073	0	100
3.	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.810	1.810	0	100
4.	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	128	128	0	100
5.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	2.000	2.000	0	100
6.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	3.641	3.540	101	97,23
7.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	128	118	10	100
8.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1.035	1.035	0	100
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus			99,54
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR 80 %	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	1.265	1.265	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19,54
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barabg/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	97,68
1.	materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas	1.265	1.265	0	100
2.	perlengkapan belajar	1.265	1.265	0	100
3.	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	9	9	0	100
4.	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	309	309	0	100
5.	penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1.265	1.265	0	100
6.	kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	281	260	21	92,53
7.	kualitas tenaga kependidikan	9	8	1	88,89

		(kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV				
	8.	kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	24	24	0	100

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan pendidikan sebesar **99,64 %** dengan kategori **tuntas paripurna**. Untuk indikator pendidikan menengah realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 99,74 %. Sedangkan indikator pendidikan khusus, realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 99,54 %.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran 2022:

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program SPM Pendidikan Menengah		66,347,567,223	63,098,883,832	95,10
	1. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (SMK/SMK/Pake C/MA/MAK)		10,244,739,005	9,941,696,400	97,04
	a. Pendataan warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta Didik	88,000,000	88,000,000	100
	b. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik	2,000,000,000	2,000,000,000	100
	c. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik	8,156,739,005	7,853,696,400	96,28
	2. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)		39,280,852,352	39,280,852,352	100
	a. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	44,667,982	44,667,982	100
	b. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	39,236,184,370	39,236,184,370	100
	3. Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)		450,000,000	450,000,000	100
	a. Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya	Kegiatan	450,000,000	450,000,000	100

			penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru				
	4.		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)		14,978,693,720	12,372,512,700	82,60
		a.	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat		14,978,693,720	12,372,512,700	82,60
	5.		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)		989,000,000	989,000,000	100
		a.	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	75,000,000	75,000,000	100
		b.	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	914,000,000	914,000,000	100
	6.		Tingkat penyerapan lulusan (SMK)		149,978,771	0	0
		a.	Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik	Lembaga sertifikasi	149,978,771	0	0
	7.		Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan (SMK)		254,303,375	64,822,380	25,49
		a.	Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja.	Kegiatan	254,303,375	64,822,380	25,49
	2.		Program SPM Pendidikan Khusus		7,205,649,898	6,202,556,281	86,08
	8.		Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus		4,254,268,000	4,175,935,000	98,16
		a.	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	4,254,268,000	4,175,935,000	98,16
	9.		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Khusus		1,299,461,170	867,744,174	66,78
		a.	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	1,299,461,170	867,744,174	66,78
	10.		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan		1,509,437,623	1,049,446,707	69,53
		a.	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat		1,509,437,623	1,049,446,707	69.,3
	11.		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan		92,483,105	59,430,400	64,26
		a.	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	92,483,105	59,430,400	64,26
	12.		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan khusus		50,000,000	50,000,000	100
		a.	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	50,000,000	50,000,000	100

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan pendidikan tahun 2022, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	5013
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	235

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM urusan pendidikan pada tahun 2022 adalah pengumpulan data anak tidak sekolah sulit dilakukan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan meningkatkan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan dalam rangka pendataan anak tidak sekolah.

4.2 Urusan Kesehatan

SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan kesehatan antara lain:

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan indikator jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
 Target pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan
 Bangka Belitung pada tahun 2022 ditampilkan dalam tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Persentase Target (%)
I.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	236	100
	1.	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	236	100
	2.	Makanan Tambahan/ Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll)	1.942	100
	3.	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	27	100
	4.	Dokter	3	100
	5.	Perawat	18	100
	6.	Bidan	3	100
	7.	Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi dan lain lain	550	100
	8.	Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	4	100
	9.	Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	4	100
	10.	Tenaga Penyuluh/promosi	5	100
II.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1.621	100
	1.	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	0	100
	2.	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	1621	100
	3.	Wadah pengiriman specimen (Specimen Carrier)	21	100
	4.	Tempat sampai biologis	0	100
	5.	Formulir: Form Penyelidikan Epidemiologi Form/Lembar KIE Alat Tulis yang Diperlukan	79	100
	6.	Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk Specimen yang berasal dari manusia & Lingkungan sesuai jenis Penyakit	24	100
	7.	Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	9	100
	8.	Dokter	4	100
	9.	Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	11	100
	10.	Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang	4	100

		kehatan lingkungan			
	11.	Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang etemologi		4	100
	12.	Tenaga Laboratorium		6	100
	13.	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan		5	100
	14.	Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi		11	100

4.2.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ditampilkabn pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian (Persentase) %
II.	Urusan Kesehatan				
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				98,02
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	236	236	0	100
	Jumlah Muti Barang/Jasa/SDM	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100
	1. Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	236	236	0	100
	2. Makanan Tambahan/ Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll)	1.942	1.942	0	100
	3. Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	27	27	0	100
	4. Dokter	3	3	0	100
	5. Perawat	18	18	0	100
	6. Bidan	3	3	0	100
	7. Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi dan lain-lain	550	550	0	100
	8. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	4	4	0	100
	9. Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	4	4	0	100
	10. Tenaga Penyuluh/ Pormosi Kesehatan	5	5	0	100
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			96,04
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80 %)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	1.621	1.621	0	100

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR					16,04
Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	80,18
1.	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	0	0	0	0
2.	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	1.621	1.580	41	97,47
3.	Wadah pengiriman specimen (Specimen Carrier)	21	21	0	100
4.	Tempat Sampah Biologis	0	0	0	0
5.	Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/Lembar KIE, Alat Tulis yang diperlukan	79	79	0	100
6.	Alat dan bahan pengambilan specimen (Tabung, Pot, Media Amies dll) untuk specimen yang berasal dari manusia	24	24	0	100
7.	Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	9	9	0	100
8.	Dokter	4	4	0	100
9.	Tenaga Kesehatan Masyarakat yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Epidemiologi	11	11	0	100
10.	Tenaga Kesehatan Masyarakat yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Kesehatan Lingkungan	4	4	0	100
11.	Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	4	1	3	25
12.	Tenaga Laboratorium	6	6	0	100
13.	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	5	5	0	100
14.	Petugas yang teribat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	11	11	0	100

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan kesehatan sebesar **98,02 %** dengan kategori **tuntas utama**. Untuk indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 100 %. Sedangkan indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 96,44 %.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan kesehatan pada Tahun Anggaran 2022.

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		796,128,455	522,576,937	65,64
	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		796,128,455	522,576,937	97,04
	a. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	680,686,091	467,344,237	68.66
	b. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Orang	115,442,364	55,232,700	47,84
2.	Program lainnya		67,949,905	27,447,459	40.39
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi penerapan SPM bidang Kesehatan lintas Kabupaten/Kota		67,949,905	27,447,459	40.39
TOTAL			864.078.360	550.024.396	63,65

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan kesehatan tahun 2022, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	42 orang
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	40 orang

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

- a. Data SPM Kesehatan baru terkumpul di awal bulan, oleh karena itu agar batas waktu penginputan diharapkan setiap tanggal 15;
- b. Masih sulitnya untuk menentukan Target SPM Kesehatan Provinsi , yaitu Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi

dan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi sehingga agak sulit menghitung kebutuhan.

Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Membentuk unit kerja khusus yang menangani krisis Kesehatan;
- b. Melakukan koordinasi peningkatan kinerja Klaster Kesehatan;
- c. Penyusunan rencana kontijensi penanggulangan krisis Kesehatan akibat bencana;
- d. Melakukan koordinasi peningkatan sinergi antar kluster-klaster kebencanaan;
- e. Pembentukan sekretariat SPM Kesehatan Provinsi.;
- f. Pembentukan unit yang menangani pelaksanaan krisis Kesehatan dan KLB, bukan sebatas pengelola/pelaksana yang dapat disinergikan dengan PSC 119;
- g. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung;
- h. Advokasi pimpinan terhadap kabupaten/kota.
- i. Pembentukan unit yang menangani pelaksanaan krisis kesehatan dan KLB, bukan sebatas pengelola/pelaksana yang dapat di sinergikan dengan PSC 119;
- j. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung;
- k. Advokasi pimpinan terhadap kabupaten/Kota.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan pekerjaan umum antara lain:

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;

- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Persentase Target
I.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	1	100
	1.	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang per hari)		0	100
	2.	Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)		0	100
II.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaen/Kota	0	100
	1.	Kualitas akses pengolehan air limbah domestik		0	100
	2.	Kualitas pelayanan air limbah domestik		0	100

4.3.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian (Persentase) %
III.	Urusan Pekerjaan Umum				
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	BELUM TUNTAS			40
I.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota			80
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Terlayani	1	1	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				0

	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	0
1.	Kuantitas (Kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	0	0	0	0
2.	Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	0	0	0	0
II.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaen/Kota			0
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	0
	Jumlah yang Harus Terlayani	0	0	0	0
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				0
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	0
1.	Kualitas akses pengolahan air limbah domestik	0	0	0	0
2.	Kualitas pelayanan air limbah domestik	0	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan pekerjaan umum sebesar **40 %** dengan kategori **belum tuntas**. Untuk indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum regional lintas kabupaten/kota realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 80 %. Sedangkan indikator penyediaan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 0 %.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan pekerjaan umum Tahun Anggaran 2022.

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		800,000,000	771,223,782	96,40
	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		800,000,000	771,223,782	96,40
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	800,000,000	771,223,782	96,40
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		598,720,000	0	0

	2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		598,720,000	0	0
	a.	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pembinaan penyediaan prasarana Cubluk		598,720,000	0	0
TOTAL				1,398,720,000	771,223,782	55,14

4.3.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan pekerjaan umum tahun 2022, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator SPM	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	PNS 8 orang PHL 2 orang
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	PNS 8 orang PHL 2 orang

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

- a. Belum disusunnya data air minum yang membutuhkan pelayanan SPAM Regional;
- b. Belum adanya dokumen perencanaan;
- c. Penyusunan Dokumen RISPAM Regional Provinsi sedang dilakukan di tahun 2022;
- d. Belum adanya lokasi yang ditetapkan sebagai SPAM Regional Provinsi;
- e. Setiap kabupaten dan kota telah memiliki SPAM lokal;
- f. Belum memiliki dokumen RISPAL untuk pengolahan air limbah;
- g. Belum adanya Lokasi yang akan dibangun IPAL/IPLT.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan perumahan rakyat antara lain:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Persentase Target
I.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	n/a	100
	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana		n/a	100
	2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		n/a	100
	3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana		n/a	100
	4. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana		n/a	100
II.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Rumah yang Layak Huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	0	100
	1. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan		0	100
	2. Subsidi uang sewa		0	100
	3. Penyediaan Rumah Layak Huni		0	100

4.4.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian (Persentase) %
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					50
IV.	Urusan Perumahan Rakyat					
I.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi		Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR 980 %)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	
	Jumlah yang Harus Dilayani		n/a	n/a	n/a	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)					20
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100
	1.	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	n/a	n/a	n/a	100
	2.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	n/a	n/a	n/a	100
	3.	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	n/a	n/a	n/a	100
	4.	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	n/a	n/a	n/a	100
II.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi		Jumlah Rumah yang Layak Huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi			0
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	0
	Jumlah yang Harus Dilayani		0	0	0	0
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)					0
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	0
	1.	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau	0	0	0	0

		Bangunan				
	2.	Subsidi uang	0	0	0	0
	2.	Penyediaan Rumah Layak Huni	0	0	0	0

Berdasarkan tabel tersebut, indeks pencapaian SPM urusan perumahan rakyat sebesar **50 %** dengan kategori **tuntas muda**. Untuk indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar capaiannya sebesar 100 %. Sedangkan indikator fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar capaiannya sebesar 0 %. Hal ini karena tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki program yang menyebabkan terjadinya relokasi masyarakat.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM perumahan rakyat Tahun Anggaran 2022.

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran	Realisasi	%	
1.	Program Pengembangan Perumahan			441,089,873	376,048,250	85.25	
	1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		441,089,873	376,048,250	85.25	
		a.	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Provinsi	Dokumen	441,089,873	376,048,250	85.25
TOTAL				441,089,873	376,048,250	85.25	

4.4.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan perumahan rakyat tahun 2022, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Dukungan Personil
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	5 orang PNS 3 orang PHL
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	5 orang PNS 3 orang PHL

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM urusan perumahan rakyat antara lain:

- a. belum adanya identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana dan perumahan yang terkena relokasi akibat program pemerintah provinsi sehingga rencana penanganannya tidak tertuang dalam RPJMD maupun renstra Dinas PUPRPRKP;
- b. belum terdapat nomenklatur pengadaan tanah untuk relokasi yang terkena program pemerintah di dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019 maupun Permendagri Nomor 050 tahun 2020 dan perubahannya.

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Persentase Target
I.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	39	100
	1.	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	10	100
	2.	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	5	100
	3.	Standar operasional prosedur Satpol PP	21	100
	4.	Standar Sarana Prasarana Satpol PP	200	100
	5.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	24	100
	6.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	5	100

4.5.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian (Persentase) %
V.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS MADYA			89,87 %
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			89,87
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang harus dilayani	39	39	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				9,87

	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	49,33
1.	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	10	0	10	0
2.	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	5	0	5	0
3.	Standar Sarana Prasarana Satpol PP	200	192	8	96
4.	Standar operasional prosedur Satpol PP	21	21	0	100
5.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	24	24	0	100
6.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	5	0	5	0

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum sebesar **89,87 %** dengan kategori **tuntas madya**. Capaian indikator pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar capaiannya sebesar 89,87 %.

4.5.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)		9,538,920,556	6,826,135,069	71.56
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		9,290,315,971	6,647,372,969	71.55

	a.	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Kasus	8,671,340,522	6,502,480,907	74.99
	b.	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	49,999,868	49,098,462	98.20
	c.	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	88,369,788	82,935,600	93.85
	d.	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	465,699,750	9,168,000	1.97
	e.	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	14,906,043	3,690,000	24.76
	2.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		248,604,585	178,762,100	71.91
	a.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	140,346,647	110,551,000	78.77
	b.	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	108,257,938	68,211,100	63.01
2.		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)		1,057,185,098	1,043,926,576	98.75

		a.	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	1,057,185,098	1,043,926,576	98.75
TOTAL					10,596,105,654	7,870,061,645	74.27

4.5.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2022, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	Satpol PP PNS = 74 orang Satpol PP Non PNS = 116 orang

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan implementasi SPM adalah sebagai berikut:

- a. Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya;
- b. Sulitnya memetakan dampak yang akan terjadi serta memproyeksi perencanaan dan kebutuhan penganggaran untuk memenuhi SPM Sub kegiatan ketertiban umum;
- c. Sulitnya menentukan hasil capaian sub urusan apabila tidak ada dampak dari penegakan hukum perda dan perkara;
- d. Belum ada tahapan penerapan SPM sub urusan trantibum secara rinci (baru akan dimuat dalam revisi Permendagri Nomor 121 tahun 2018);
- e. Pelayanan sub urusan trantibum terfokus pada "pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada" dan belum mengoptimalkan pelayanan lain, seperti

1. SOP Satpol PP, Standar sarana dan prasarana Satpol PP;
 2. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Linmas.
- f. Belum adanya Standar Operasional Prosedur, jenis belanja, kode rekening yang jelas dalam pelaksanaan dan penganggaran terhadap pencairan ganti rugi uang atau aset pada saat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perka dan Perkada;
 - g. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan perda atau perkada;
 - h. Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan perda dan perkada;
 - i. Terbatasnya kemampuan baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan untuk melakukan penyebaran informasi kebencanaan secara langsung kepada masyarakat;
 - j. Belum tersedianya peta rawan kebakaran diwilayah Provinsi Bangka Belitung
 - k. Belum tersusunnya Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - l. Belum terbentuknya Satgas relawan kebakaran;
 - m. Terbatasnya aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi pendidikan;
 - n. Belum memadainya sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Solusinya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan ini antara lain:

- a. Perlu segera dilakukan revisi Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan keteritiban umum diprovinsi dan kabupaten/kota sehingga pelaksanaan SPM didaerah lebih optimal;

- b. Perlunya dilakukan bimbingan teknis secara langsung oleh Kementerian Dalam Negeri agar pengisian E-SPM dapat dilakukan secara benar;
- c. Penidistribusian bantuan sarana dan prasarana serta Dana DAK oleh Kementrian Pusat agar lebih terarah sehingga lebih jelas peruntukan dan penggunaannya;
- d. Bimbingan teknis terkait pendidikan dan pelatihan simulasi kebakaran dan *animal rescue* agar lebih sering dilaksanakan supaya kompetensi satgas pemadam kebakaran lebih meningkat dan optimal dalam melaksanakan pelayanan SPM.

4.6 Urusan Sosial

SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan sosial antara lain:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial dengan indikator capaian jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam Panti Sosial dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti;

- e. Perlindungan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 ditampilkan pada table berikut ini :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Persentase Target (%)
I.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	30	100
	1. Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas		0	100
	2. Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat		0	100
	3. Penyediaan Sandang		30	100
	4. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas		0	100
	5. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas		0	100
	6. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat		0	100
	7. Penyediaan Alat bantu		0	100
	8. Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti		20	100
	9. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual		50	100
	10. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		0	100
	11. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk		0	100
	12. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga		17	100
	13. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		15	100
	14. Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas		20	100
	15. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		9	100
II.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	130	100
	1. Pengasuhan		150	100
	2. Penyediaan Permakanan bagi Daerah yang Memiliki Panti Anak		0	100
	3. Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak		0	100

	4.	Penyediaan Sandang		30	100
	5.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Anak		0	100
	6.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak		0	100
	7.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti		30	100
	8.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual		120	100
	9.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		30	100
	10.	Fasilitas Pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak		0	100
	11.	Akses ke Layanan Pendidikan		0	100
	12.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga		30	100
	13.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		0	100
III.	Rehabilitas Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial		Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial	21	100
	1.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia		0	100
	2.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat		0	100
	3.	Penyediaan Sandang		21	100
	4.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia		0	100
	5.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia		0	100
	6.	Penyediaan Alat bantu		5	100
	7.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Sosial		10	100
	8.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat		0	100
	9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual		63	100
	10.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		0	100
	11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk		0	100
	12.	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar		0	100
	13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga		15	100
	14.	Akses layanan pengasihan kepada keluarga pengganti		0	100
	15.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		0	100
	16.	Pemulasaraan		10	100
	17.	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak dan merujuk ke Panti Masyarakat		0	100
	18.	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak dan merujuk ke Panti Masyarakat		0	100
	19.	Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia		0	100
IV.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya	8	100
	1.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang		0	100

		Belum Memiliki Pantii Gelandangan dan Pengemis			
	2.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Pantii Gelandangan dan Pengemis Merujuk Ke Pantii Masyarakat		0	100
	3.	Penyediaan Sandang		0	100
	4.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Pantii Gelandangan dan Pengemis		0	100
	5.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Pantii Gelandangan dan Pengemis		0	100
	6.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Pantii Gelandangan dan Pengemis dan Merujuk Ke Pantii Masyarakat		0	100
	7.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Pantii		0	100
	8.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial		0	100
	9.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari		0	100
	10.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar		0	100
	11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		0	100
	12.	Akses ke Layanan Pendidikan		0	100
	13.	Pemulangan ke Daerah Asal		4	100
	V.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	67	100
	1.	Penyediaan Permakanan		66	100
	2.	Penyediaan sandang		0	100
	3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		20	100
	4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan		10	100
	5.	Pelayanan Dukungan Psikososial		625	100

4.6.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian (Persentase) %
VI.	Urusan Sosial				
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS MADYA			84,31
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pantii	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Pantii yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			89,33
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	30	30	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU				9,33

MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	46,67
1.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0
2.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0
3.	Penyediaan Sandang	30	30	0	100
4.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0
5.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0
6.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0
7.	Penyediaan Alat bantu	0	0	0	0
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	20	20	0	100
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	50	50	0	100
10.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	0	0	0	0
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk	0	0	0	0
12.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	17	17	0	100
13.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15	15	0	100
14.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas	20	20	0	100
15.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	9	9	0	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			75,90
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	70,15
Jumlah yang Harus Dilayani		130	114	16	87,69
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)					5,74
Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	28,72
1.	Pengasuhan	150	150	0	100
2.	Penyediaan Permakanan bagi Daerah yang Memiliki Panti Anak	0	0	0	0
3.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak	0	0	0	0
4.	Penyediaan Sandang	30	14	16	46,67
5.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Anak	0	0	0	0
6.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak	0	0	0	0
7.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	30	14	16	46,67
8.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	120	104	16	86,67
9.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	30	14	16	46,67
10.	Fasilitas Pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	0	0	0	0
11.	Akses ke Layanan Pendidikan	0	0	0	0

	12.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	30	14	16	46,67
	13.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	0	0
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial			85,37
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani		21	21	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)					5,37
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	26,84
	1.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia	0	0	0	0
	2.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0
	3.	Penyediaan Sandang	21	21	0	100
	4.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia	0	0	0	0
	5.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia	0	0	0	0
	6.	Penyediaan Alat bantu	5	5	0	100
	7.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Sosial	10	10	0	100
	8.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0
	9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	63	63	0	100
	10.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	0	0	0	0
	11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk	0	0	0	0
	12.	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	0	0	0	0
	13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	15	15	0	100
	14.	Akses layanan pengasihan kepada keluarga pengganti	0	0	0	0
	15.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	0	0
	16.	Pemulasaraan	10	1	9	10
	17.	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	0	0
	18.	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	0	0
	19.	Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia	0	0	0	0
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			81,54
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani		8	8	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)					1,54
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah	Jumlah	Jumlah	0

		yang Harus Dilayani	yang Terlayani	yang Belum Terlayani	
1.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	0	0	0	0
2.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis Merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0
3.	Penyediaan Sandang	0	0	0	0
4.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	0	0	0	0
5.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	0	0	0	0
6.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0
7.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	0	0	0	0
8.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	0	0	0	0
9.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari	0	0	0	0
10.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	0	0	0	0
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0
12.	Akses ke Layanan Pendidikan	0	0	0	0
13.	Pemulangan ke Daerah Asal	4	4	0	100
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			89,40
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	67	67	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)				9,40
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	47
1.	Penyediaan Permakanan	66	66	0	100
2.	Penyediaan Sandang	0	0	0	0
3.	Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	20	5	15	25
4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10	1	9	10
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	625	625	0	100

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan sosial sebesar **84,31 %** dengan kategori **tuntas madya**. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 89,33 %. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan

persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 75,90 %. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 85,37 %. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 81,54 %. Capaian SPM untuk indikator perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 89,40 %.

4.6.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan sosial Tahun Anggaran 2022.

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Rehabilitasi Sosial		1,489,423,725	1,249,814,706	83.91
	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti		905,091,639	755,835,581	83.51
	a. Penyediaan permakanan	Orang	232,449,414	192,024,000	82.61
	b. Penyediaan sandang	Orang	58,260,244	57,495,471	98.69
	c. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	29,995,060	28,681,600	95.62
	d. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	132,775,640	114,051,050	85.90
	e. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	349,750,000	310,300,000	88.72
	f. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	28,275,000	15,600,700	55.17
	g. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	50,582,000	25,232,500	49.88
	h. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	Dokumen	23,004,281	12,450,260	54.12
	2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		289,953,235	251,425,423	86.71
	a. Pengasuhan	Orang	84,233,115	81,702,958	97.00
	b. Penyediaan Sandang	Orang	8,573,025	8,573,025	100
	c. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	4,106,095	3,201,840	77.98
	d. Pemberian bimbingan	Orang	145,586,000	111,799,600	76.79

		fisik, mental, spiritual dan sosial				
	e.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	14,400,000	14,400,000	100
	f.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	4,510,000	4,510,000	100
	g.	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Orang	28,545,000	27,238,000	95.42
	3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		249,874,317	206,222,062	82.53
	a.	Penyediaan sandang	Orang	28,132,336	26,606,636	94.58
	b.	Penyediaan alat bantu	Orang	8,384,000	6,220,800	74.20
	c.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	Orang	30,242,869	26,452,506	87.47
	d.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	108,937,912	85,516,120	78.50
	e.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	19,260,000	16,960,000	88.06
	f.	Pemulasaraan	Orang	4,000,000	1,000,000	25.00
	g.	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen	50,917,200	43,466,000	85.37
	4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		44,504,534	36,331,640	81.64
	a.	Pemulangan ke daerah asal	Orang	14,532,000	8,975,470	61.76
	b.	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen	29,972,534	27,356,170	91.27
	2.	Program Penanganan Bencana		960,120,715	819,950,728	85.40
	5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		960,120,715	819,950,728	85.40
	a.	Penyediaan Permakanan		716,703,776	640,216,000	89.33
	b.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		48,674,600	19,483,000	40.03
	c.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		38,311,323	25,361,928	66.20
	d.	Pelayanan Dukungan Psikososial		156,431,016	134,889,800	86.23
TOTAL				2,449,544,440	2,069,765,434	84.50

4.6.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan sosial tahun 2022, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak	ASN 9 orang Non ASN 20 orang

		terlantar di dalam panti	
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	ASN 22 orang Non ASN 15 orang
3.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	ASN 13 orang Non ASN 5 orang
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	ASN 14 orang Non ASN 475 orang

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM urusan sosial antara lain :

1. Proses perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya memperhatikan hubungan erat antara kemampuan pembiayaan perangkat daerah dan penerimaan/pendapatan pemerintah daerah, hal ini berpengaruh kepada konsistensi dan kontinuitas program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2. Belum kuatnya komitmen atau dukungan terhadap program dan kegiatan yang memiliki hubungan perencanaan dan penganggaran dalam bentuk dana pendampingan atau cost sharing sertapenguatan/pengembangan programdalam APBD, sehingga pelaksanaan capaian outcome kegiatanbelum berjalan maksimal;
3. Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level Pusat-Provinsi, Provinsi-Kabupaten, lintas sektor maupun lintas program/bidang, hal ini menyebabkan pelayanan dan penanganan masalah menjadi kurang maksimal baik efektifitas dan juga pemanfaatannya;

4. Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 18 November 2022 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
5. Ada beberapa kegiatan, terdapat rasionalisasi pagu anggaran baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan;
6. Pada belanja perjalanan dinas, terdapat sisa dana yang tidak terealisasi, karena selisih harga hotel/penginapan dan harga tiket pesawat yang *at cost*;
7. Pada belanja rutin, terdapat sisa dana yang tidak terealisasi, karena belanja dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan/tagihan:
8. Terdapat permasalahan yang terjadi pada beberapa Kegiatan antara lain:
 - a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi:
 - Sisa dana yang tidak terealisasi karena tidak adanya pengajuan permohonan bantuan BBR dari Kab/Kota;
 - Minimnya pengajuan permohonan pemulangan keluarga rentan.
 - b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti di Sub Kegiatan Pemulangan ke Daerah Asal, sisa pagu yang tidak terealisasi karena :
 - biaya transportasi tiket pesawat untuk klien hanya untuk sekali jalan bukan PP;
 - tidak ada lagi biaya Tes Covid.

- c. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti di Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial pada UPT. PSBS, Sisa dana yang tidak terealisasi, karena tambahan anggaran Pengasuh sebanyak 1 (satu) orang selama 12 bulan di APBDP, namun yang bersangkutan mulai bekerja efektif pada tanggal 1 November 2022.
- d. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti di Sub Kegiatan Pemulasaraan pada UPT. PSBS, Sisa dana yang tidak terealisasi, karena klien yang meninggal dunia hanya 1 orang.
- e. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti di Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga pada UPT. PSBL, Sisa dana yang tidak terealisasi, karena berkas yang lengkap secara administrasi untuk diseleksi hanya 4 orang yang siap untuk diseleksi, karena anggaran menggunakan APBD Perubahan.
- f. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti di Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga pada UPT. PSBL, Sisa dana yang tidak terealisasi, karena :
 - biaya pemulangan sudah diakomodir untuk seleksi;
 - pemulangan beberapa penerima manfaat sudah dibantu oleh dinas;
 - pemulangan beberapa penerima manfaat tidak menggunakan anggaran APBD Perubahan yang tersedia karena dilakukan antar Kabupaten (Kabupaten Belitung Timur ke Kabupaten Belitung).
 - tidak tercapainya target karena minimnya klien anak terlantar yang direhab didalam panti

Adapun upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung maupun dengan antar bidang teknis pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.7 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan urusan wajib pelayanan dasar yang melaksanakan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, adalah sebagai berikut :

4.7.1 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- Pengelolaan Pendidikan Khusus

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- Pemandahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

- Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- Pengelolaan Pendidikan Khusus

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- Pengelolaan Pendidikan Khusus

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Pengelolaan Pendidikan Khusus
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Pengelolaan Pendidikan Khusus

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- Pengelolaan Pendidikan Khusus

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Khusus
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Khusus

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Khusus

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKA

- Pengelolaan Pendidikan Khusus

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Khusus

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Pengelolaan Pendidikan Khusus

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- Pengelolaan Pendidikan Khusus

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- Pengelolaan Pendidikan Khusus

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Pengelolaan Pendidikan Khusus

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

4.7.2 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

- Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
- Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

- Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

- Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

- penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

- Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

4.7.3 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

- Penyelenggaraan Jalan Provinsi

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi

4.7.4 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

- Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

- Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

4.7.5 Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

- Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

4.7.6 Program dan Kegiatan Urusan Sosial

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

- Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah

Kabupaten/Kota

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
- Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

- Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi

**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

- Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terdiri dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pada Tahun 2022.

Substansi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencakup data profil daerah, perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sumber data dan informasi utama dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah yang hasilnya disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai umpan balik dalam meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah.

Jika dilihat dari hasil yang dicapai, maka dapat dikatakan secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2022 mencapai kinerja baik. Namun demikian perlu disadari pula bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan yang menyebabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal diantaranya ada beberapa Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, insidental dan kondisi geografis yang mengakibatkan beberapa Indikator Kinerja Kunci dalam LPPD capaiannya rendah. Diharapkan Pemerintah mempertimbangkan dan menguji kembali Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan disusun pada tahun selanjutnya sehingga tidak ada lagi Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tidak didapatkan informasi.

Kekurangan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini juga tidak terlepas dari berbagai keterbatasan Pemerintah Daerah, baik dalam aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, regulasi maupun anggaran serta pandemi covid-19. Meskipun demikian, dengan segala kekurangan dan hambatan tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu menunjukkan hasil kerjanya yaitu dengan memperoleh capaian penyelenggaraan pemerintahan dengan predikat baik pada tahun sebelumnya. Perolehan tersebut tidak lepas dari hasil kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan support dan partisipasi konstruktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun efisiensi penyelenggaraan pemerintahan terhadap pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan diraihnya predikat WTP atas LKPD Tahun 2021.

Demikian Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya serta Laporan ini dapat menjadi referensi sekaligus bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Pemerintah.